

# ZULKIFLI HASAN: PEMILU AJANG ADU GAGASAN, BUKAN PERPECAHAN

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

EDISI NO.05/TH.XII/MEI 2018



# MAJELIS

**INI BARU**  
**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI

Perpres No.20 Tahun 2018

# ANTARA TENAGA KERJA ASING DAN TENAGA KERJA LOKAL



**18** Nasional  
20 Tahun Reformasi: Kembali ke Orba  
Seperti Mengubah Siang Menjadi Malam

**39** Selingan  
Jalan Buntu untuk  
Melanjutkan Kekuasaan

**54** Sosialisasi  
Waspada! Penjajahan  
Model Baru

ISSN 0854-6371  
9 770854 637158



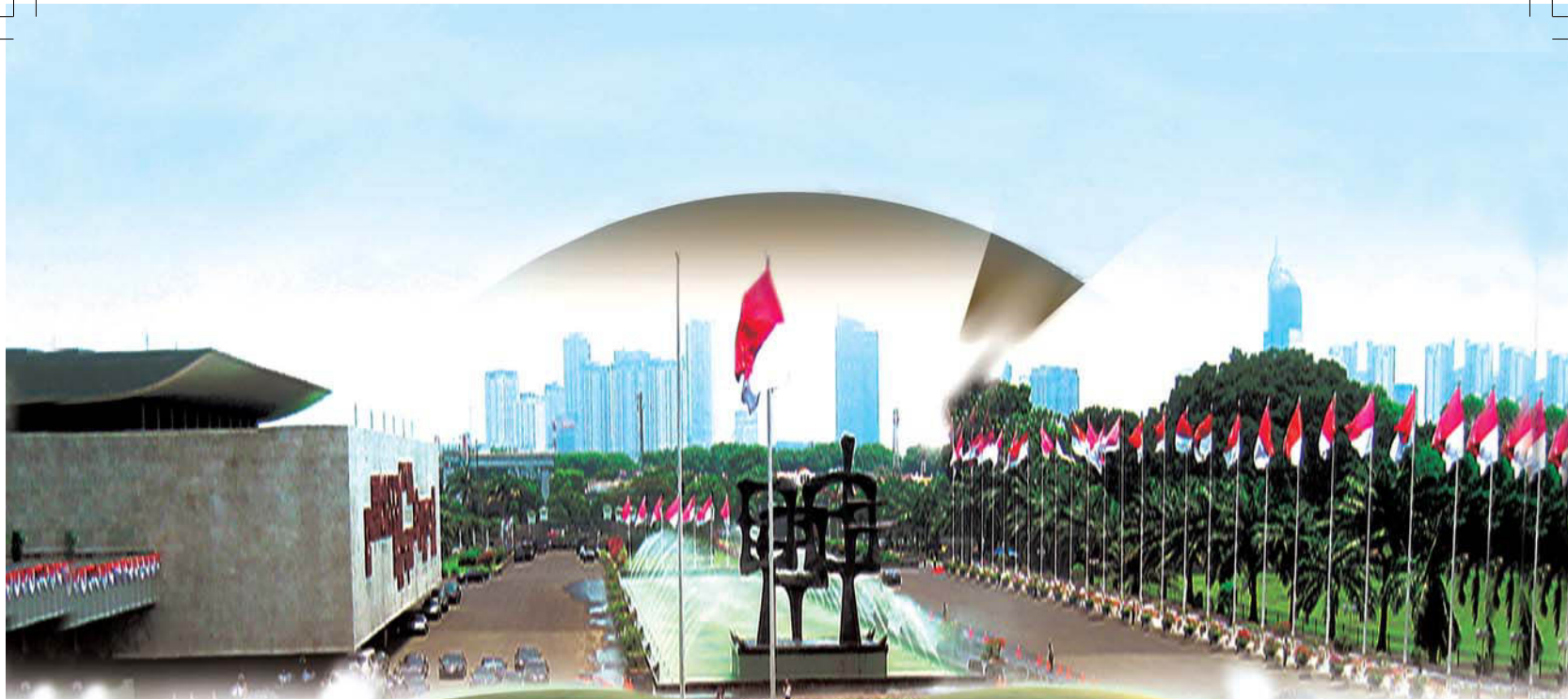
# **EMPAT PILAR MPR RI**

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
NKRI Sebagai Bentuk Negara  
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



**INI BARU**  
**INDONESIA**





MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# Daftar Isi

EDISI NO.05/TH.XII/MEI 2018



## 10 BERITA UTAMA

### Antara TKA dan Tenaga Kerja Lokal

Dengan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemerintah berharap terjadi peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Namun, Perpres itu memicu pro kontra di masyarakat.



## 18 Nasional

### Ketua MPR: Kembali ke Orba Seperti Mengubah Siang Menjadi Malam



## 57 Sosialisasi

### MPR Sebarkan Empat Pilar Pada Ormas Wanita Islam



## 39 SELINGAN

### 20 Tahun Reformasi



## 78 Profil

### Sulaeman L. Hamzah

Pengantar Redaksi .....	04
Opini .....	06
Kolom .....	08
Gema Pancasila .....	38
Aspirasi Masyarakat .....	47
Debat Majelis .....	48
Majelis Khusus .....	50
Wawancara .....	70
Varia MPR .....	72
Figur .....	74
Ragam .....	76
Catatan Tepi .....	82



## COVER

Edisi No.05/TH.XII/Mei 2018

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

## Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing

**P**ADA 26 Maret 2018 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA). Perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan

budsmen juga menyebut bahwa para TKA ini datang dengan menggunakan dua pesawat setiap harinya.

Data menunjukkan jumlah tenaga kerja asing hingga tahun 2017 mencapai 126.000 orang, atau meningkat 69,85% dibanding akhir 2016. Mayoritas mereka berasal dari China.



ILUSTRASI: SUSTHANTO

perbaikan ekonomi nasional. Dengan penerbitan Perpres ini, pemerintah telah mempermudah perizinan dan prosedur bagi tenaga kerja asing.

Kemudahan proses izin TKA membuat kedatangan pekerja asing tak terelakan. Sudah ada laporan dan temuan dari Ombudsman RI terkait dampak langsung dari berlakunya aturan tersebut. Data Ombudsman RI mengungkapkan bahwa TKA hampir setiap hari masuk ke dalam negeri. Sebanyak 70% TKA di antaranya didatangkan menggunakan pesawat terbang. Sedangkan 30% sisanya menggunakan transportasi laut. Dalam temuan tersebut, Om-

Parahnya lagi, banyak TKA justru bekerja di bidang teknis sebagai buruh kasar.

Penerbitan Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) ini justru menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak pihak yang mengkhawatirkan Perpres ini bakal mengancam tenaga kerja lokal. Pasalnya, hingga kini warga negara yang menganggur masih menjadi persoalan serius. DPR melalui Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai inisiator akan membentuk Pansus Hak Angket tentang TKA.

*Majelis* edisi Mei 2018 akan mengupas masalah ini dalam laporan utama. □



### **PENASEHAT**

Pimpinan MPR-RI

### **PENANGGUNG JAWAB**

Ma'ruf Cahyono

Selfi Zaini

### **PEMIMPIN REDAKSI**

Siti Fauziah

### **DEWAN REDAKSI**

Yana Indrawan, M. Rizal,

Suryani, Tugiyana, Heri Herawan,

Maifrizal

### **REDAKTUR PELAKSANA**

Muhamad Jaya

### **KOORDINATOR REPORTASE**

Budi Muliawan

### **REDAKTUR FOTO**

Supriyanto, Euis Karmilah,

Sucipto

### **REPORTER**

Indra Ardianto, Ana Suzana,

Mery S. Magdalena, Rahayu

Nafisah, Sugeng Cahyono

### **FOTOGRAFER**

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

### **PENANGGUNG JAWAB**

### **DISTRIBUSI**

Elen Magdalena

### **KOORDINATOR DISTRIBUSI**

Cucu Riwayati

### **STAF DISTRIBUSI**

Armansyah, Retno Megahwatie,

Amiruddin, Dhita Fitasari

Junaid

### **SEKRETARIS REDAKSI**

Djarot Widiarto

### **TIM AHLI**

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

### **ALAMAT REDAKSI**

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



**Implementasi Sila-sila Pancasila**



- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur



- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.



- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan



- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah bertampang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah



- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

**EMPAT PILAR MPR RI**

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
 NKRI Sebagai Bentuk Negara  
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

**MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI**

**MANIFESTO**

Masih Indonesiakah kita setelah sekian banyak jatuh bangun setelah sekian banyak tertimpa dan tertimpa setelah sekian banyak terbentuk dan terbentuk

Masihkah kita meletakkan harapan di atas kekecewaan perlawanan di atas penindihan musyawarah di atas amarah kejujuran di atas kepentingan

Ataukah ke-Indonesia-an kita telah pudar dan hanya tinggal slogan dan gambar?

Tidak!

Karena mulai kini nilai-nilai itu kita tahirkan kembali Kita banyakin dan kita bumikan menjadi jiwa dan raga setiap manusia Indonesia

Dari Sabang sampai Merauke kita akan melihat lebih banyak lagi senyum ramah dan tapir sapa gotong royong dan tolong menolong kesantunan bukan anjuran tapi kebiasaan kepedulian menjadi dorongan

Dari terbit hingga terbenamnya matahari kita melihat orang-orang berpeluh tanpa mengeluh berkerlingat karena semangat kerja keras menjadi lompatan ketahanan menjadi keadilan kejujuran menjadi bagian harga diri dan kehormatan

Wajah mereka adalah wajah Indonesia yang sebenarnya tangan mereka adalah tangan Indonesia yang sejati keluhuran budi mereka adalah keluhuran Indonesia yang sesungguhnya

Hari ini kita gemakan, Ini Baru Indonesia!

**INI BARU**  
**INDONESIA**

**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT



ISTIMEWA

## UU Antiterorisme Persulit Gerakan Para Teroris

**H**ARI itu, Ahad (13/5), masyarakat Surabaya dikagetkan dengan rentetan aksi teror bom bunuh diri yang menyerang tiga gereja. Ledakan pertama terjadi di gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela. Lalu disusul lagi ledakan kedua di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surabaya, dan ketiga dengan sasaran Gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang jadi sasaran. Tak berakhir sampai di situ. Eso harinya, Senin (14/5), aksi bom bunuh diri juga menyerang Polrestabes Surabaya.

Jadi, aksi teror bom bunuh diri di Surabaya tersebut menyebabkan 18 jiwa melayang. Kejadian itu dengan cepat viral ke seluruh Indonesia dan dunia internasional. Yang membuat publik tersentak adalah para pelaku bom bunuh diri itu ternyata dari dua keluarga, yang melibatkan ibu bapak, dan anak-anaknya.

Aksi teror tak berakhir sampai di situ. Dua hari kemudian, tepatnya Rabu (16/5), aksi teror terjadi di markas Polda Riau. Menggunakan mobil, komplotan teroris menerobos pintu gerbang Polda Riau, lalu melakukan aksi dengan cara menabrakkan mobil ke anggota kepolisian, dan juga serangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya, seorang anggota kepolisian tewas, dan empat lainnya menderita luka-luka. Sementara, empat pelaku tewas dan seorang lagi dibekuk.

Presiden RI Joko Widodo segera mengutuk aksi teror tersebut, dan memerintahkan Polri untuk bertindak cepat membasmi para terorisme. "Aksi terorisme harus diberantas sampai tuntas, saya sudah sampaikan ini pada Kapolri. Saya juga berharap agar revisi UU Terorisme segera dipercepat. Saya keluarkan Perpu jika revisi berjalan lambat," tegasnya.

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengungkapkan, rangkaian aksi teror mulai dari kerusuhan di Mako Brimob, aksi bom bunuh diri di tiga gereja Surabaya, dan aksi penyerangan Mapolda Riau beberapa waktu lalu, saling terkait. Aksi itu tidak lepas dari peran organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terkoneksi dengan kelompok ISIS di Suriah.

"Kasus aksi teror di Surabaya, Polri didukung TNI langsung melakukan penindakan. Hasilnya, dalam waktu 8 hari (13-21 Mei), 74 orang ditangkap dan 14 orang di antaranya terbunuh karena melawan petugas. Ke-74 terduga teroris itu dibekuk di Jatim 31 orang, Jabar 8 orang, Banten 16 orang, Sumatera bagian Selatan 8 orang, Riau 9 orang, Sumut 6 orang. Ada barang bukti disita baik bom siap pakai maupun materi bahan peledak lainnya dan kemudian baterai, *switch* dan lain-lain," urainya, usai bertemu Presiden RI, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Melihat kegelisahan masyarakat yang sangat khawatir akan terus terjadi aksi terorisme, Pansus RUU Terorisme DPR RI kemudian mempercepat pembahasan dan secepatnya membuat keputusan. Pembahasan sempat macet lantaran definisi terorisme antara pemerintah dan para Wakil Rakyat tidak nyambung, karena belum satu kata soal definisi terorisme.

Namun, dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (25/5/2018), di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme atau RUU Terorisme menjadi UU. □

DER

## Kontroversi Daftar 200 Nama Mubaligh Rujukan Kemenag

**K**EMENTERIAN Agama RI, pada 18 Mei 2018 mengeluarkan daftar rekomendasi penceramah atau Mubaligh Indonesia yang bisa dijadikan rujukan masyarakat dengan tiga kriteria, yakni: memiliki kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Dalam rilis yang beredar luas, terdapat 200 nama, diantaranya ada nama Abdullah Gymnastiar (AA Gym), Dedeh Rosidah (Mama Dedeh), Prof. Didin Hafidhuddin, Emha Ainun Najib (Cak Nun), Habib Hasan bin Ja'far As Segaf, KH. Haedar Nasir, Hidayat Nur Wahid, M. Quraish Shihab, Ma'ruf Amin, dan lainnya.

Namun, begitu rilis tersebar di masyarakat dan menjadi viral rekasi

pro dan kontra pun muncul. Banyak yang menyatakan keberatan karena ulama atau penceramah idola mereka tidak mau. Dan banyak mubaligh dan da'i yang namanya masuk 200 daftar rujukan merasa tidak nyaman dengan terjadinya pro kontra tersebut. Akibatnya, banyak mubaligh tersebut meminta agar namanya dicabut dari 200 daftar rujukan, dengan alasan untuk menghindari berbagai prasangka dan perpecahan antarulama dan umat.

Menyikapi hal tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sepakat mengatakan bahwa daftar tersebut blunder dan berpotensi mengakibatkan konflik dan perpecahan. Ketua MPR dan Ketua DPR juga sepakat bahwa Kemenag mesti



ISTIMEWA



menarik kembali atau menganulir daftar tersebut sehingga tidak ada lagi perdebatan di tengah masyarakat.

Melihat banyaknya reaksi yang muncul pasca rilis rujukan, terutama dari para mubaligh, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin dalam satu kesempatan di Jakarta meminta maaf jika terdapat ketidaknyamanan itu. Lukman menjelaskan, 200 nama tersebut bukanlah hasil seleksi, bukan pula akreditasi, apalagi standarisasi. Namun merupakan bentuk dari pelayanan sebagai jawaban atas permintaan publik kepada Kemenag. Kriterianya pun hasil masukan dari para tokoh agama dan publik.

“Rilis tersebut bukan memilah-milah mubaligh dan rilis itu masih bersifat dinamis. Tidak ada motif negatif, apalagi politik. Rilis itu keluar atas dasar permintaan publik yang menyampaikan kepada kami dan sudah masuk di kami,” jelas Lukman Hakim Saifuddin.

Menag menyatakan, daftar mubaligh dibuat secara alamiah sesuai daftar usulan yang masuk dari pengurus ormas keagamaan, Mesjid Besar, dan lainnya. Intinya, kami masih membuka diri menerima aspirasi dari publik, mana-mana mubaligh yang menurut masyarakat bagus. Kami akan terus meng-update. “Jadi para mubaligh yang

namanya tidak tercantum dalam rilis bukan berarti tidak masuk tiga kriteria tersebut,” terangnya.

Kontroversi seputar rilis 200 nama mubaligh tersebut mendapatkan perhatian serius Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sangat berharap agar rilis Kemenag itu tidak menjadi polemik berkepanjangan. “Untuk ulama dan umat, serta masyarakat, kami harapkan agar perilsan 200 nama mubaligh jangan dijadikan polemik berkepanjangan, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan,” ujar Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi, di Jakarta pertengahan Mei 2018.

Mengutip pernyataan Menteri Agama RI, Zainut menegaskan kembali bahwa rilis Kemenag tersebut nanti akan terus berkembang, bertambah dan terus di-update, karena bukan rilis final. Hal tersebut diharapkan dimengerti publik.

Zainut menyatakan, MUI bisa memahami tujuan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merilis daftar itu. Namun, Zainut meyakini, masih banyak nama mubaligh lainnya yang layak masuk dalam daftar Kemenag tersebut. Rekomendasi dari kemenag tersebut, menurut dia, juga bukan menjadi keharusan untuk diikuti, tetapi hanya pertimbangan yang sifatnya tidak mengikat. □

DER

## Dolar Tunjukkan Taringnya, Rupiah Coba Bertahan

DARI April hingga hari ini, akhir Mei 2018, pergerakan US Dolar terhadap Rupiah naik secara bertahap dan sangat cepat hingga menembus angka 14.205 Rupiah per US Dolar (*Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dolar rate (Jisdor) Bank Indonesia*). Depresiasi yang sangat cepat ini membuat khawatir publik Indonesia.

Depresiasi rupiah ini memberikan banyak dampak terhadap perekonomian nasional. Bahkan, utang pemerintah pun makin bengkak karena rupiahnya melemah. Publik berharap pemerintah tidak tinggal diam dengan fenomena pelemahan rupiah, karena ketidakpastian global ini.

Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, Erwin Ginting seperti dikutip *detikFinance*, Mei 2018, mengatakan bahwa pelemahan Rupiah terhadap Dolar akan mengakibatkan total utang pemerintah pun akan menjadi lebih besar. Total utang pemerintah akan bertambah Rp 10,96 triliun setiap terjadi pelemahan Rp 100 per dolar AS.

“Jadi dengan stok utang valas sebesar US\$ 109,6 miliar, bisa terjadi depresiasi Rp 100 per dolar AS, utangnya nambah Rp 10,96 triliun,” kata Erwin.

Namun, Erwin meminta masyarakat tidak terlalu khawatir. Utang pemerintah dalam mata uang asing ini tidak serta merta dibayar atau dilunasi pada saat ini juga, melainkan sesuai dengan jatuh temponya. Keseluruhan utang itu punya jadwal jatuh temponya yang dikelola sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan saat pembayaran kembali.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS bisa berdampak positif dan bisa juga negative, terutama bagi pelaku industri. Positif, karena



ISTIMEWA

bagi para eksportir akan mendapatkan penghasilan lebih besar, sedangkan para importir pengeluarannya akan lebih banyak.

Maka dari itu, Airlangga meminta kepada Bank Indonesia (BI) untuk tetap menstabilkan nilai tukar Rupiah. “Yang penting Rupiah harus stabil, kalau impor sudah pasti lebih mahal, kalau ekspor bisa dapat tambahan, kalau utang ya tambah. Tugas utama Bank Indonesia kan menjaga stabilitas mata uang,” tandasnya.

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta (OSO) merespon fenomena tersebut. Ia mengatakan, masyarakat Indonesia tidak perlu cemas soal fenomena pelemahan Rupiah. “Gak usah cemas, fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara lain juga begitu. Bolehlah marah jika masalah ini hanya terjadi di Indonesia. Saya yakin pemerintah memerhatikan serius hal ini dan akan menempuh langkah-langkah yang diperlukan,” katanya usai bertemu Presiden RI Joko Widodo, di Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (9/5/2018).

OSO menekankan bahwa yang terpenting adalah bagaimana rakyat Indonesia menumbuhkan perekonomian dengan kekuatan yang ada, terutama perekonomian daerah. Untuk itulah sistem perekonomian yang sesuai dengan Pancasila harus dipegang teguh. “Keberpihakan dan penguatan kepada daerah sangat diutamakan. Ini bukan daerahisme atau ego kedaerahan, namun keberpihakan pada daerah untuk membangun dari pinggiran daerah ke kota,” tandasnya.

Lagipula analisa para ekonom mengatakan bahwa pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS terjadi bukan karena kondisi ekonomi yang memburuk, tapi bisa berpotensi besar jika nilai Rupiah terhadap Dolar AS sedang menuju titik ekuilibrium atau keseimbangan baru. □

DER



**Baharuddin Aritonang**  
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

## Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

**D**I SAMPING kewenangan MPR sebagaimana dirumuskan UUD NRI Tahun 1945 kini para anggota MPR juga disibukkan dengan tugas sosialisasi Empat Pilar MPR. Bahkan dapat dikatakan, tugas ini acapkali amat menyita perhatian para anggota MPR (yang juga adalah anggota DPR dan anggota DPD), bisa mengabaikan tugas utama, berupa ketiga fungsi yang selalu disebut: legislasi, budget, dan kontrol.

Lihatlah dalam praktik pelaksanaan sehari-hari. Amat terbatas terlihat tugas atau peran ketiga fungsi tersebut. Sedikit sekali undang-undang yang dihasilkan lembaga perwakilan tersebut. Apakah itu DPR (secara penuh) maupun DPD (secara terbatas). Begitu juga pembahasan tentang anggaran (lebih-lebih dikaitkan dengan hasil pemeriksaan BPK). Yang banyak justru persoalan dana yang melilit anggota DPR. Demikian pula halnya pengawasan alias kontrol jalannya pemerintahan negara. Apalagi kontrol yang disertai solusi.

Berbeda dengan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR. Yang tentu juga menyita waktu para anggota dewan (DPR dan DPD), setidaknya di kala melakukan reses (yang menurut maksud dan tujuannya, tak lain bekerja di lapangan atau di luar kantor). Setidaknya melakukan sosialisasi terhadap konstituen masing-masing. Karena itulah banyak yang melihat agar tugas sampingan berupa sosialisasi Empat Pilar ini saatnya untuk dikurangi. Waktu lebih banyak difokuskan melakukan tugas

utama tadi. Banyak undang-undang harus dirumuskan, banyak anggaran yang perlu dibahas dan dipikirkan, serta banyak pemerintahan negara yang harus diawasi.

Kalaupun sosialisasi Empat Pilar perlu dilakukan, cukup dibatasi 2 kali setahun di lingkungan konstituen masing-masing. Apalagi daerah pemilihan terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Sebagian tugas sosialisasi ini dibagi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru saja dibentuk Presiden. Apalagi posisi BPIP ini sama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang lain, seperti LIPI, BPPT, BPOM, dan puluhan yang lain. Karena itu, dalam pertemuan Kepala BPIP dengan Lembaga Pengkajian MPR, banyak yang mengusulkan agar BPIP dibentuk sampai ditingkat provinsi.

Memang perlu kajian bersama. Termasuk istilah Empat Pilar. Lebih-lebih di kala Pancasila disebut Pilar. Walau sudah dibatalkan oleh MK tentang istilah Empat Pilar berbangsa dan bernegara, MPR mengubahnya dengan Empat Pilar MPR. Ahli bahasa juga mengiyakan istilah ini. Sejalan dengan KBBI yang merumuskan bila Pilar juga dapat diartikan sebagai dasar. Padahal KBBI sendiri banyak salahnya. Saya selalu menunjukkan contoh yang ditemukan dilema Badan, bahwa BPK itu ditulis sebagai instansi pemerintah. Padahal BPK adalah lembaga negara.

Karena itu, usulan berbagai pihak atas istilah ini perlu dipikirkan. Ada yang mengusulkan Empat Konsensus Nasional (Konnas), ada pula Empat



Kesepakatan berbangsa, ada lagi yang lain. Artinya, perlu dicari yang disepakati bersama dan tidak menyebabkan kontroversi. Tapi untuk itu memang perlu sifat kenegarawanan. Yang tidak selalu merasa benar sendiri. Khususnya dari kalangan yang sudah bersusah payah melahirkan istilah Empat Pilar atau 4 P (bukan P4) ini.

Tentu saja bahasan terhadap materi sosialisasi, perlu koordinasi antara MPR (Badan Sosialisasi MPR) dengan pemerintah (khususnya BPIP). Karena setelah saya baca, dalam materi sosialisasi Empat Pilar MPR yang diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR (Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) ternyata banyak yang perlu disempurnakan. Bisa jadi perlu disusun buku terpisah antara pegangan narasumber dengan buku lain yang dibagikan kepada peserta sosialisasi.

Bersamaan dengan itu perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan atas metoda yang diterapkan dalam sosialisasi Empat Pilar. Secara garis besarnya metode untuk para narasumber serta untuk masyarakat umum. Bahkan dengan variannya bagi setiap komponen masyarakat.

Yang paling umum memang materi ceramah dan tanya jawab, dilengkapi dengan diskusi untuk pendalaman materi. Sesungguhnya langkah seperti ini sudah amat terbiasa ditempuh, sejak masa penataran P 4 dulu. Tapi dibutuhkan pemberi materi yang bertanggungjawab mengemban tugas-tugasnya. Yang pertama adalah soal disiplin. Baik disiplin waktu maupun isi materi yang disosialisasikan.

Langkah seperti itu juga menyangkut pendalaman materi. Perlu konsistensi atas materi yang diceramahkan. Apalagi judul-judul diskusi yang dilontarkan dalam bentuk kasus-kasus. Contohnya di dalam Sosialisasi Empat Pilar bagi kalangan Menwa di Medan tanggal 20-23 April 2018. Topik kasus 5 "Bocah 13 tahun diarak dan ditelanjangi depan orangtua, pelaku ditangkap". Topik ini mungkin diambil dari judul berita sebuah koran. Menarik dijadikan diskusi dalam pendalaman materi sebelumnya.

Tapi yang memimpin diskusi seyogyanya mengikuti pemberian materi sosialisasi sebelumnya. Dengan begitu, maka diskusi bisa diarahkan untuk melengkapi yang belum sempat diceramahkan narasumber. Jadi diskusinya bisa mendalami pemahaman terhadap sosialisasi.

Artinya banyak sekali penyempurnaan yang harus dilakukan agar tepat sasaran. Sejalan dengan itu perlu disadari bila tugas ini adalah tugas bersama dalam membangun bangsa. Tidak hanya tugas lembaga tertentu, atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan begitu, akan terasa manfaatnya. □

Perpres No.20 Tahun 2018

# Antara Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal

Dengan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemerintah berharap terjadi peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Namun, Perpres itu memicu pro kontra di masyarakat.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**D**I JAKARTA, ribuan buruh turun ke jalan merayakan Hari Buruh Dunia (May Day) yang jatuh pada 1 Mei. Pada hari libur itu, Selasa (1/5/2018), sejak pagi ribuan buruh yang datang dari daerah penyangga ibukota (Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok) berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka mengenakan seragam berbagai warna. Ada yang mengenakan baju warna merah hitam, ada putih biru, dan lain-lain.

Para buruh juga membawa berbagai bendera dan atribut lain, seperti spanduk. Spanduk-spanduk itu bertuliskan tuntutan mereka. Di antaranya tuntutan untuk menurunkan harga listrik, BBM, dan beras. "Turunkan harga listrik, BBM dan Beras. Bangun ketahanan pangan dan energi." Tuntutan lainnya adalah tolak upah murah dan menolak adanya tenaga kerja asing (TKA) kasar dari Tiongkok.

Ribuan buruh pun menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPD/DPD, Senayan. Di tempat ini Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, Ketua Komisi IX Dede Yusuf, dan tokoh reformasi Amien Rais memberi semangat. Salah satu isu dalam aksi ini adalah menolak Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo. Perpres ini dinilai sebagai karpet merah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

"TKI kita sendiri kelimpungan dalam bekerja, tetapi buruh kasar

asing berbondong-bondong didatangkan. Mungkin sampai ratusan ribu, mungkin sampai angka-angka yang sangat mengerikan," pekik Amien Rais pun secara demonstratif merobek topeng tenaga kerja asing di depan aksi buruh. "Sobek, sobek topeng orang asing," teriak para buruh.

Tidak hanya di Jakarta, aksi buruh dalam memperingati Hari Buruh Dunia (Mayday) 2018 juga berlangsung di berbagai kota besar. Di Surabaya, ribuan buruh menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan Nomor 110, Bubutan, Surabaya. Salah satu tuntutan mereka adalah menolak tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Jawa Timur. Tuntutan yang sama disuarakan ribuan buruh lainnya di Bandung, Medan, dan kota lainnya.

Memang salah satu isu penting yang diusung para buruh saat turun ke jalan merayakan Hari Buruh Internasional adalah pencabutan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres itu pada 26 Maret 2018. Dengan Perpres ini pemerintah berharap bisa mempermudah perizinan dan prosedur TKA masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Menurut data, saat ini tercatat 126.000 TKA di Indonesia. Dari jumlah itu sekitar 24.000 TKA berasal dari Tiongkok.



Namun, penerbitan Perpres ini justru menimbulkan polemik di masyarakat. Perpres ini dinilai sebagai karpet merah bagi masuknya TKA. Banyak pihak yang mengkhawatirkan Perpres ini bakal mengancam tenaga kerja lokal. Pasalnya, hingga kini warga negara yang menganggur masih menjadi persoalan serius. Di sisi lain, isu santer terdengar bahwa TKA dari Tiongkok mengalir deras masuk ke Indonesia.

Itu sebabnya para buruh menuntut pencabutan Perpres ini. Tidak hanya kalangan buruh, sejumlah politikus di Senayan pun bersikap sama. Bahkan, mereka menginisiasi pembentukan Pansus TKA. Wacana pembentukan Pansus TKA ini direalisasikan pertama kali oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan anggota DPR Romo Syafii. Pada 26 April 2018 kedua politikus Gerindra itu menandatangani Term of Reference (TOR) pembentukan Pansus TKA sebagai respons atas Perpres Nomor 20 tahun 2018.

### Pro Kontra Perpres

Kepada *Majelis*, Ketua Komisi IX yang membidangi sektor tenaga kerja, Dede Yusuf menilai, pro dan kontra terhadap Perpres No. 20/2018 karena maraknya pemberitaan di media *mainstream* ataupun media sosial mengenai TKA dari Tiongkok mengalir deras memasuki Indonesia. Apalagi hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebutkan, banyak TKA yang melanggar aturan (lihat bagian kedua, "Temuan Ombudsman dan LIPI soal TKA"). Misalnya, Ombudsman menemukan banyak TKA yang menjadi buruh kasar atau sopir. Selain itu, banyak TKA yang tidak memiliki izin bekerja atau masa izin tinggal di Indonesia sudah habis.

Dede Yusuf mengapresiasi upaya pemerintah mempercepat proses birokrasi demi percepatan investasi. Namun dia meminta upaya itu tidak menabrak aturan yang berlaku. "Sebaiknya, jika ada Perpres

atau Inpres (instruksi presiden) disesuaikan dengan aturan yang berlaku, lalu diteruskan ke permen (peraturan menteri)," ujarnya.

Dede berujar, pemerintah juga harus selektif memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing dengan melihat jenis pekerjaannya. Menurut dia, pemerintah tetap harus memprioritaskan pekerja lokal untuk beberapa jenis pekerjaan. "Untuk level supervisor dengan *skill* tertentu bisa ditawarkan kepada asing. Ini hal yang ada di PP (peraturan pemerintah) sebelumnya," ucapnya.

Politikus Partai Demokrat itu mengingatkan janji Presiden Jokowi untuk membuka 10 juta lapangan pekerjaan harus dipenuhi. "Tinggal kita lihat apakah investasi memberikan lapangan kerja lebih kepada warga Indonesia atau tidak," tuturnya.

Tidak jauh berbeda, Wakil Ketua Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay, melihat Perpres No. 20/2018 itu tidaklah terlalu *urgent*. Pasalnya, tanpa Perpres itu, investasi asing dan orang

asing bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Bahkan, kata Saleh, investasi asing itu terasa belum begitu menguntungkan masyarakat luas. Pro kontra muncul, menurut Saleh, karena investasi asing itu mensyaratkan tenaga kerja asing juga.

“Kalau investasi asing masuk dan pekerjaannya dari luar, masyarakat setempat tentu tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Artinya, investasi itu tidak bisa menciptakan lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Yang diuntungkan hanya pihak investor asing. Inilah kekhawatiran kita,” ujarnya kepada *Majelis*.

Menurut politisi PAN itu, apabila pekerja asing adalah profesional dan melakukan *transfer of knowledge*, masuknya TKA tidak menjadi masalah. Persoalannya, TKA yang masuk adalah pekerja kasar. Ini fakta yang sudah banyak ditemukan di daerah-daerah. Apalagi ada perbedaan upah antara TKA dan pekerja lokal untuk pekerjaan yang sama. Tentu hal ini akan menimbulkan kecemburuan dan disharmoni di tempat kerja.

Lebih gamblang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat mengungkapkan, pro kontra terhadap Perpres No.20/2018 disebabkan karena kekhawatiran terhadap serbuan TKA dari Tiongkok. Sumirat menyebutkan, di Banten ada 700 TKA Tiongkok yang tercatat dalam izin sebagai profesional level *skill*, seperti *engineering*, manager, namun kenyataannya mereka pekerja kasar *unskill*. Dia juga menduga proyek kereta api cepat banyak diisi TKA *unskill*. Karena itu, Sumirat berharap, pemerintah menyelidiki perusahaan di berbagai daerah yang mempekerjakan TKA yang tak bisa berbahasa Indonesia sebagai syarat bekerja. “Faktanya banyak pelanggaran tetapi TKA bisa bekerja di Indonesia,” katanya kepada *Majelis*.

Sumirat juga mengungkapkan angka 10 juta TKA dari Tiongkok bisa menjadi kenyataan. “Pada 27 Mei 2015, seorang Wakil Perdana Menteri Tiongkok di forum yang diselenggarakan di UI, menyebutkan akan mendatangkan 10 juta TKA ke Indonesia secara bertahap untuk mengisi bidang



Dede Yusuf

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pekerjaan, mulai dari keamanan, teknologi, sampai infrastruktur. Banyak pihak, baik pemerintah maupun lainnya, membantah hal ini,” ujar Sumirat.

Membanjirnya TKA dari Tiongkok, lanjut Sumirat, menimbulkan kerisauan. Pasalnya, ada sekitar 7 juta pengangguran dan setiap tahun lahir ratusan ribu angkatan kerja baru, sementara lapangan kerja tidak banyak tersedia. Tetapi, tiba-tiba ada informasi jutaan TKA masuk mengisi lapangan kerja di Indonesia. “Karena itu harus dibuka secara transparan. Ada kerjasama apa antara pemerintah dengan Tiongkok? Apakah karena pinjaman ke Tiongkok itu diikuti syarat membawa gerbong TKA ke Indonesia? Kalau benar, tentu tidak bisa seperti itu,” katanya.

Meskipun banyak kalangan menolak Perpres No. 20/2018, ada juga yang berpikir positif dengan Perpres itu. Anggota MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani

Chaniago, misalnya, meminta Perpres No. 20/2018 tidak dijadikan polemik yang berlebihan. “Isi Perpres itu tidak seperti yang diduga-duga sebagian masyarakat. Saya sudah sangat memahami Perpres itu, jadi tidak perlu dikhawatirkan,” katanya kepada *Majelis*.

Irma meminta semua pihak untuk membaca lebih dulu Perpres itu. “Dibaca dulu dan dipahami secara detil. Pro kontra ini terjadi karena belum apa-apa kita semua sudah ribut, sudah alergi. Perpres itu nanti akan diatur melalui peraturan menteri. Nah, detilnya ada di peraturan menteri,” ujar anggota Komisi IX ini.

Menurut Irma, Perpres No.20/2018 bukan berarti mempermudah masukan TKA. Bahkan ada satu pasal dalam Perpres itu menyebutkan, tenaga kerja lokal harus diutamakan ketimbang TKA. Perpres itu hanya untuk TKA level direksi dan pemegang saham serta TKA yang mempunyai *skill* khusus yang dibutuhkan dunia kerja dan pemerintah Indonesia. Memang ada TKA yang terkait dengan investasi, tetapi bukan TKA buruh kasar dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 20% dari total pekerja.

“Pemerintah tetap mengutamakan pekerja lokal sesuai Pasal 4 dalam Perpres itu. Jika ada TKA masuk tanpa prosedur dan melanggar aturan maka bisa dideportasi. Jadi, saya rasa Perpres itu melindungi pekerja lokal. Masuknya TKA memang harus dikontrol ketat,” ujarnya.



Mirah Sumirat



Irma Suryani Chaniago

## Pansus TKA

Pro kontra Perpres No. 20/2018 belum berakhir. Untuk mengakhiri polemik ini dua langkah sedang berjalan. Pertama, langkah politik melalui DPR. Kedua, langkah hukum dengan mengajukan *judicial review* Perpres itu ke Mahkamah Agung (MA). Di DPR sedang bergulir langkah politik dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) TKA. Tetapi, sebelumnya, Komisi IX sudah memanggil Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Dede Yusuf menjelaskan, pada 26 April 2018, Komisi IX menggelar rapat dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Dalam rapat dibahas mengenai Perpres TKA. Beberapa kesimpulan dalam rapat itu, antara lain untuk meminimalisir pro dan kontra, Menaker diminta membuat aturan turunan terhadap pelaksanaan Perpres No. 20/2018. Dalam aturan itu juga dibuat agar tidak terjadi diskriminasi upah antara pekerja asing dan pekerja lokal.

Komisi IX juga mendesak Menteri Tenaga Kerja, Kepala BKPM, Dirjen Imigrasi, Kemenkumham, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri untuk menginventarisir data tentang angkatan kerja dan kebutuhan lapangan kerja dalam proyek investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Termasuk data tentang investasi khususnya yang menyertakan pekerja asing, data tentang orang asing yang masuk dan melintas di Indonesia, data kebutuhan unit pelaksana teknis untuk mengawasi TKA.

Pada 17 Mei telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan TKA yang terdiri dari gabungan 24 kementerian dan lembaga. Pembentukan Satgas ini merupakan rekomendasi Komisi IX. "Kami bersepakat tidak menolak TKA bila sesuai aturan yang ada. Jika ada temuan TKA yang diduga ilegal, tidak berizin, agar dilaporkan ke Satgas. Komisi IX juga membentuk tim untuk mengawasi Satgas ini," kata Dede.

Dede mempersilakan bila ada pihak-pihak yang mengajukan uji materi Perpres ini ke MA. Begitu juga dengan pembentukan Pansus. "Bila Satgas tidak bisa bertindak sesuai dengan temuan dan rekomendasi Panja, bisa naik menjadi Pansus. Sesuai



### Saleh Partaonan Daulay

mekanisme di DPR, Pansus adalah politis karena menjadi teguran kepada pemerintah," tuturnya.

Saleh Daulay juga menilai Pansus bisa saja dibentuk untuk mendalami persoalan TKA. Saleh meminta pemerintah tidak perlu khawatir dengan pembentukan Pansus ini. "Justru Pansus ini bisa membantu pemerintah," katanya.

Menurut Saleh, DPR adalah lembaga politik. Di lembaga ini banyak kepentingan politik. Karena itu, Pansus tentu saja mengandung unsur politik. Tetapi tidak semua yang mengandung unsur politik itu buruk. "Bukankah banyak hal yang dilakukan bagi

tahun politik. Saya berharap jangan juga Perpres dan masalah TKA ini menjadi konsumsi untuk dipolitisasi. Perhatikan dan simak dulu semua penjelasan dengan basis data yang ada," pintanya.

Bagi Irma, persoalan Perpres dan TKA ini murni karena pemerintah ingin membela kesejahteraan buruh. "Mari kita berdiskusi dan mencari upaya-upaya yang tepat. Tetapi kalau sudah ada unsur jatuh menjatuhkan itu sudah masuk politisasi. Janganlah (Perpres) ini dimainkan menjadi alat politik," tuturnya.

Terlepas dari langkah politis dan hukum atas Perpres No. 20 Tahun 2018 ini, Saleh Daulay mengatakan, jalan keluar dari persoalan ini adalah pemerintah perlu memastikan bahwa semua program yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk kerjasama dengan investor asing. "Dan, kalau Perpres ini terbukti tidak menguntungkan dan hanya berorientasi pada kepentingan asing, saya kira perlu dipikirkan agar pemerintah mencabut Perpres ini. Sudah banyak permintaan seperti itu. Di sinilah letak pentingnya Pansus," kata Saleh Daulay.

---

UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negara atas lapangan kerja dan penghidupan yang layak, seperti bunyi Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

---

kebaikan masyarakat diputuskan lewat jalur politik? Bukankah Pilkada, Pileg, dan Pilpres, juga politik?" ujarnya.

Sebaliknya, Irma menyebutkan, sebelum membentuk Pansus ada baiknya "bertabayun" dengan memanggil Menaker terlebih dahulu untuk mendengarkan penjelasan dan mengklarifikasi polemik yang luar biasa atas Perpres ini. Dia menambahkan, pembentukan Pansus TKA juga tidak sembarangan. Harus ada persetujuan dari fraksi-fraksi di DPR. Usulan Pansus itu juga harus disahkan melalui rapat paripurna DPR.

"Soal adanya politisasi, sekarang adalah

Selain itu, di era global dan kompetisi antarnegara ini, lanjut Saleh, pemerintah juga harus membekali tenaga kerja lokal dengan keahlian dan keterampilan. Tanpa keahlian dan keterampilan pekerja lokal akan tertinggal dan kalah bersaing dengan pekerja dari negara lain. "Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendidikan vokasional sekaligus pelatihan kerja di banyak tempat. Ini perlu dilakukan secara masif, terstruktur, dan terukur. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kerjasama dengan pihak swasta dan dunia usaha," katanya. □

Tim Majelis

Tenaga Kerja Asing

# Temuan Ombudsman dan LIPI Soal TKA Tiongkok

Pemerintah Tiongkok memiliki kebijakan *law of the control of the exit and entry citizen* pada 1986. Dengan kebijakan ini, penanaman investasi di luar negaranya harus diikuti dengan ekspor tenaga kerja. Sebab, di Tiongkok surplus tenaga kerja.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**M**ASIH ingat peristiwa helikopter yang jatuh di Morowali, Sulawesi Tengah? Sebuah helikopter milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) mengalami kecelakaan di Desa Fatufia, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada Jumat (20/4/2018), sekitar pukul 09.20 waktu setempat. Saat kejadian, helikopter itu sedang membawa enam orang penumpang dan dua orang kru. Kecelakaan tunggal helikopter menyebabkan satu orang karyawan PT IMIP meninggal dunia dan enam orang penumpang serta dua kru mengalami luka-luka.

Helikopter itu awalnya akan terbang menuju Kendari. Pada pukul 09.15, helikopter itu lepas landas dari helipad PT. IMIP. Namun, pada pukul 09.17, helikopter secara tiba-tiba berbalik arah menuju landasan. Saat di tengah perjalanan menuju landasan, helikopter nahas itu terjatuh dan menimpa satu orang karyawan bernama Aris. Sedangkan para penumpang, di antaranya Xi Lai Wang, Yan Yun, Di Yi Fei, Guan, Zhao Yipu, dan Du Gui, selamat dari insiden itu.

Peristiwa itu tampaknya hanya sebuah kecelakaan biasa. Tapi, di balik kejadian ini, terungkap fakta bahwa di perusahaan itu

ada tenaga kerja berkewarganegaraan Tiongkok. Perusahaan PT. IMIP ternyata mempekerjakan sedikitnya 3.000 warga negara Tiongkok. Memang, PT. IMIP merupakan perusahaan patungan antara Tsinghsan Group Tiongkok dan Bintang Delapan Group Indonesia. Keenam penumpang luka-luka dalam helikopter nahas tersebut merupakan karyawan sebuah rumah produksi (*production house*) di Tiongkok. Mereka datang ke IMIP untuk membuat video dokumenter (*company profile*) perusahaan yang bergerak dalam penambangan nikel yang memiliki areal seluas hampir 47.000 hektare di Kabupaten Morowali itu.

Fakta tentang pekerja Tiongkok di Morowali itu sejalan dengan temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ketika marak isu tenaga kerja asing (TKA), terutama asal Tiongkok, setelah beredar sejumlah foto dan video di media sosial, ORI sudah melakukan investigasi terlebih dulu soal isu ini. Investigasi dilakukan pada Juni – Desember 2017 di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Ke-

pulauan Riau. Hasil temuan Ombudsman cukup mengejutkan publik.

Ombudsman menemukan ada ketidaksesuaian data tenaga kerja asing antara yang dimiliki pemerintah dan temuan di lapangan. “Yang legal ada 21 ribu (TKA) dengan jenis pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan pemerintah. Fakta di lapangan berbeda signifikan. TKA yang *unskill labor*



Laode Ida



(tanpa keterampilan), *low level*, banyak di lapangan,” kata Komisioner Ombudsman RI Laode Ida dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Kamis (26/4/2018).

Laode mencontohkan hasil investigasi di salah satu perusahaan di Gresik, Jawa Timur. Di sana hampir seluruh tenaga kerjanya adalah TKA, termasuk juru masaknya. “Di Morowali, sopir-sopir (di salah satu perusahaan) orang asing. Padahal di Sulawesi banyak mobil tronton dibawa orang lokal. Jadi tidak ada alasan menyatakan orang lokal tidak bisa,” katanya.

Temuan lainnya, TKA yang masuk ke Indonesia cukup mengkhawatirkan. Laode mengatakan, dalam sehari ada dua pesawat yang membawa TKA melalui Bandara Haluoleo Kendari, setelah sebelumnya transit di Bandara Soekarno-Hatta. Para TKA tersebut kemudian menyebar ke Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

“Ada kondisi arus TKA, khususnya dari Tiongkok, deras sekali tiap hari masuk ke negara ini. Sebagian besar mereka *unskill labor* (tanpa keterampilan). Jalur Cengkareng-Kendari saja, di pagi hari, arusnya 70-80% penumpang Lion Air dan Batik Air itu tenaga kerja asing. Beberapa kali saya tumpang, 90% asing,” kata Laode.

Laode mengatakan, pada umumnya para TKA asing tersebut bekerja di proyek-proyek yang investasinya memang berasal dari negara mereka. Mereka juga mendapatkan bayaran (upah) lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja asal Indonesia dalam pekerjaan yang sama. Bahkan, perbedaan upah atau gaji pekerja lokal dan TKA bisa mencapai satu berbanding tiga. “Orang Indonesia hanya menerima sepertiga, paling besar hanya sepertiga dari gaji TKA. Sopir Indonesia, misalnya, hanya mendapat Rp 5 juta, sopir TKA bisa Rp 15 juta. Itu informasi dari lapangan,” tambah Laode.

Hal yang mengejutkan dari temuan Ombudsman, kata Laode, gaji para TKA itu langsung ditransfer ke rekening bank negara asal mereka. Hal ini jelas merugikan Indonesia karena tidak mendapatkan pajak penghasilan dari para TKA. “Kerugian negara pasti karena pajak penghasilan dari mereka tidak masuk kas negara,” jelas Laode.

Selain Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga ikut serta membahas isu TKA asal



**Devi Asianti**

Tiongkok ini. Lembaga ini menggelar diskusi bulanan dengan mengambil tema TKA pada Selasa (8/5/2018). Dari hasil kajian, peneliti ketenagakerjaan P2K LIPI, Devi Asianti, mengungkapkan, beberapa temuan mengenai TKA asal Tiongkok di antaranya peningkatan jumlah TKA asal Tiongkok seiring dengan meningkatnya investasi negara Tirai Bambu itu di Indonesia. Berdasarkan data BKPM, Tiongkok adalah salah satu negara yang melakukan investasi cukup besar di Indonesia. Jumlah investasinya meningkat dari peringkat ke-10 pada 2010, menjadi peringkat ke-8 pada 2014, dan di posisi ke-3 pada 2016 sebagai negara investor terbesar di Indonesia.

LIPI juga mencatat investasi Tiongkok di Indonesia lebih banyak ke bidang Sumber Daya Alam (SDA) seperti tambang, migas, dan perkebunan. Selain itu investor Tiongkok lebih banyak masuk ke sektor infrastruktur, seperti konstruksi dan kelistrikan yang rata-rata kontraktor dan pembiayaannya memang



**Rudolf Yuniarto**

dari negara itu juga.

Tetapi bila dibandingkan dengan investasi dari Singapura, kondisinya berbanding terbalik. Berdasarkan data BKPM dan Kemenaker pada 2016 yang diolah LIPI, jumlah investasi dari Singapura di Indonesia mencapai US\$ 9,17 miliar, tapi jumlah TKA hanya sebanyak 1.700 orang. Fakta sebaliknya terlihat dari investasi Tiongkok. Jumlah investasi Tiongkok hanya sebesar US\$ 2,6 miliar, namun TKA dari negara ini mencapai 21.300 orang. Sementara Jepang yang ada di posisi kedua dengan nilai investasi sebesar US\$ 5,4 miliar, jumlah TKA mencapai 12.500 orang. “Memang kalau dibandingkan dengan Singapura ini berbanding terbalik,” tutur Devi Asianti.

Mengapa investasi dari Tiongkok harus diikuti dengan tenaga kerjanya? Jawabannya, pemerintah Tiongkok memiliki kebijakan bahwa penanaman investasi di luar negaranya harus diikuti dengan ekspor tenaga kerja. “Itu berdasarkan kebijakan *law of the control of the exit and entry citizen* pada 1986 yang mendorong tenaga kerja ke luar negeri seiring dengan investasinya. Karena di negaranya terjadi surplus tenaga kerja,” kata Devi.

Sementara Peneliti Migrasi Tenaga Kerja Internasional PSDR LIPI, Rudolf Yuniarto, mengungkapkan, kebijakan itu tercium oleh beberapa negara sehingga mereka menolak investasi dari Tiongkok yang lebih besar. Negara India menolak proyek Jalur Sutra Baru yang digaungkan oleh Presiden China Xi Jinping lewat program *One Belt One Road* (OBOR) untuk meningkatkan perdagangan dengan banyak negara. “India khawatir investasi yang dilakukan perusahaan dan bank Tiongkok akan membebani utang negara dan stabilitas tenaga kerja lokal,” tuturnya.

Selain itu, Rudolf mengungkapkan, negara-negara Eropa juga menolak masuknya investasi dari Tiongkok. Negara-negara barat curiga proyek Jalur Sutra Baru dibuat untuk memperkuat pengaruh Tiongkok di kawasan, serta menjaga stabilitas tenaga kerja dan ekonomi dalam negeri. “Di Eropa juga sudah banyak pengungsi dari Suriah dan sebagainya, kalau masih menerima investasi dari Tiongkok mereka kesulitan untuk mengaturnya,” ujarnya. □

**BSC**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Ahmad Muzani**, Wakil Ketua MPR RI

## Kita Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah pada Tenaga Kerja Lokal

**P**ADA 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA). Perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Dengan penerbitan Perpres ini, pemerintah telah mempermudah perizinan dan prosedur bagi tenaga kerja asing.

Namun, penerbitan Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) ini justru menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak pihak mengkhawatirkan Perpres yang memudahkan tenaga kerja asing ini bakal mengancam tenaga kerja lokal. Pasalnya, hingga kini warga negara yang menganggur masih menjadi persoalan serius. Untuk itu, DPR melalui Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai inisiator akan menggulirkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Hak Angket tentang TKA.

Bagaimana pandangan MPR terhadap persoalan ini? Berikut wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani

seputar masalah tenaga kerja asing. Petikannya.

**Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Bagaimana pendapat Bapak tentang Perpres tersebut?**

Saya kira Perpres No. 20 Tahun 2018 adalah sebuah peraturan presiden yang memungkinkan tenaga kerja asing bisa bekerja di Indonesia tanpa harus menguasai atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Padahal tenaga kerja asing itu bekerja di Indonesia. Maka, kalau ada peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengharuskan tenaga kerja asing agar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi adalah hal wajar. Tapi, dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 itu, aturan menguasai bahasa Indonesia itu ditiadakan. Inilah yang membuat banyak orang berteriak menolak Perpres tersebut.

Kedua, Perpres No. 20 Tahun 2018 juga meniadakan ketentuan apabila perusahaan mempekerjakan seorang tenaga kerja asing maka harus membawa minimal 10 tenaga

kerja lokal. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi tempat kepada pekerja lokal agar sebanding dengan jumlah tenaga kerja asing. Dalam Perpres No. 20 Tahun 2018, ketentuan itu juga dihilangkan. Artinya, sebuah perusahaan bisa mempekerjakan seluruh pekerja asing tanpa adanya pekerja lokal. Ini tentu menjadi masalah. Perpres itu memungkinkan tenaga kerja asing dalam pekerjaan apapun bisa bekerja di Indonesia dalam satu perusahaan. Inilah yang mengancam tenaga kerja lokal.

Ketiga, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak perlu mendapatkan visa dari Dinas Tenaga Kerja (Kementerian Tenaga Kerja). Mereka bisa mendapatkan visa dari kedutaan. Ini menyebabkan penyaringan terhadap tenaga kerja asing lebih mudah, tapi di sisi lain kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal terancam.

Itulah beberapa hal yang membuat Perpres No. 20 Tahun 2018 itu menjadi kontroversial. Karena itu beberapa anggota DPR kemudian mengambil inisiasi untuk mengajukan sebuah panitia khusus (Pansus). Pansus ini untuk melakukan penyelidikan atas Perpres No. 20 Tahun 2018, khususnya terhadap

keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Melalui Pansus ini kita bisa mendengarkan penjelasan dari pemerintah. Bagaimana pandangan pemerintah dengan adanya pengangguran. Apakah pemerintah tidak melihat bahwa tenaga kerja kasar di Indonesia masih banyak, begitu juga dengan tenaga ahli yang kita miliki pun masih banyak. Apakah pemerintah tidak belajar dari sebuah proses masuknya tenaga kerja asing seharusnya hanya untuk pekerjaan yang belum ada tenaga ahli dari Indonesia. Jadi, Pansus ini untuk menjernihkan duduk masalah tentang tenaga kerja asing ini.

**Apakah Bapak melihat urgensi dari dikeluarkannya Perpres ini?**

Saya tidak melihat ada urgensinya. Karena itu banyak yang menolak Perpres tersebut. Pemerintah mengatakan, urgensinya adalah untuk mengundang arus investasi. Tapi, tidak ada buktinya. Faktanya investasi dalam sektor minyak dan gas ternyata nihil. Tidak ada proyek minyak dan gas yang berjalan, termasuk blok Masela. Investasi besar-besaran pun tidak ada yang jalan.

Jadi, menurut saya, Perpres ini tidak lain adalah sebuah peraturan yang mungkin hanya dimaksudkan untuk melindungi satu kepentingan saja. Satu kepentingan negara tertentu, atau perusahaan tertentu. Saya kira kalau ada kecurigaan seperti itu adalah hal yang wajar saja.

**Apakah Bapak melihat ada kesalahan di pemerintahan sehingga presiden mengeluarkan Perpres tersebut?**

Saya kira presiden tidak mendapatkan informasi yang baik dari para pembantunya tentang persoalan (tenaga kerja asing) ini, sehingga presiden mengambil keputusan



yang menjadi kontroversi di masyarakat itu.

**Dalam Perpres itu, selain untuk menarik investasi asing, pemerintah juga beralasan untuk mendorong kesempatan buat tenaga kerja lokal. Tapi kelihatannya justru keahlian tenaga kerja lokal diabaikan. Apa pandangan Bapak?**

Saya melihatnya seperti itu. Saya melihat ada ketidakpercayaan pemerintah terhadap tenaga kerja kita sendiri. Saya melihat pemerintah tidak percaya dengan profesionalitas tenaga kerja kita sendiri. Saya juga melihat adanya keraguan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal. Sebenarnya, tugas pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja adalah meningkatkan daya saing, keahlian, profesionalisme, tenaga kerja Indonesia agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Bukan malah memberi karpet merah untuk tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia, dan tenaga kerja lokal kita hanya menjadi penonton.

**Jika demikian, pemerintah memang kurang berpihak pada tenaga kerja lokal? Apalagi masih banyak pengangguran terdidik dan tidak terdidik di negara kita?**

Itulah yang kita pertanyakan kepada

pemerintah. Padahal, kita masih ingat, pada waktu kampanye pemilihan presiden, presiden berjanji akan membuka 10 juta lapangan kerja. Janji yang manis dan enak. Kita semua bersukaria mendengar janji itu. Tapi, pada hari ini, boroboro 10 juta tenaga kerja, sampai tahun keempat pemerintahan ini, belum sampai jutaan yang mendapat pekerjaan. Jauh panggang dari api, menurut saya.

**Pansus DPR untuk tenaga kerja asing itu apakah bisa diterima anggota DPR?**

Pansus ini memang baru pada tahap pengusulan. Sesuai syarat pembentukan Pansus, harus ada usulan dari lebih 25 anggota DPR meliputi lebih dari dua fraksi di DPR. Baru kemudian Pansus itu diajukan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus lalu membawa usulan Pansus itu ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota. Dalam rapat paripurna itulah nanti diputuskan apakah Pansus ini bisa diteruskan atau tidak.

**Ada beberapa kelompok masyarakat yang akan mengajukan judicial review Perpres ini ke Mahkamah Agung. Apa pendapat Bapak?**

Silakan saja bagi kelompok-kelompok masyarakat yang akan menggugat Perpres ini ke MA. Semua perjuangan untuk menggagalkan Perpres yang merugikan rakyat banyak ini juga tidak dilarang.

**Sebagai pimpinan lembaga negara, apa yang bisa dilakukan lembaga seperti MPR dalam masalah ketenagakerjaan ini?**

Kalau kita di MPR, konteksnya adalah kebangsaan. Persoalan ketenagakerjaan dilihat juga dalam konteks kebangsaan dan keberpihakan kita pada kepentingan nasional. Karena itu, kita di MPR tidak pernah bosan untuk mengajak semua elemen bangsa agar tetap menjaga persatuan dan persaudaraan, dan tetap bepijak pada kebenaran. Kita mengingatkan bahwa Pancasila adalah dasar, landasan, dan ideologi negara yang sudah final. Kita tetap mengingatkan bahwa bhinneka adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri sebagai bangsa. Kita juga mengingatkan bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik yang sudah disepakati. Sebagai pimpinan MPR saya tidak akan pernah bosan mengingatkan soal-soal kebangsaan itu. □



Peringatan 20 Tahun Reformasi

Ketua MPR:  
**Kembali ke Orba Seperti**  
 Mengubah Siang Menjadi Malam



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**M**ENGENAKAN kemaja putih dibalut jas biru, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berjalan beriringan dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Tepat di tengah panggung yang sudah terpasang mik di atasnya, kedua tokoh nasional itu berdiri bersebelahan. Tak lama berselang Ketua DPR mulai membaca puisi karya WS. Rendra.

Kemudian, di sepertiga bagian puisi tentang nukilan sajak bersejarah berjudul 'Sajak Bulan Mei 1998,' giliran Zulkifli Hasan melanjutkannya. Salah satu bagian yang dibaca oleh Zulkifli Hasan itu bercerita tentang perjuangan melawan putus asa.

"Bagian yang paling menarik dari puisi WS Rendra ini adalah melawan putus asa, menunggu-nunggu Ratu Adil. Yang harus dilakukan adalah mewujudkan hukum yang adil, bukan pasrah menunggu Ratu Adil", demikian bunyi bait puisi Rendra yang dibacakan Ketua MPR.

Pembacaan puisi oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo merupakan bagian dari prosesi peringatan 20 tahun Reformasi. Acara itu berlangsung di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV Kompleks MPR, DPR dan DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

Hadir dalam acara tersebut Ketua KPK Agus Rahardjo; Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Usai pembacaan puisi tersebut Zulkifli Hasan mengingatkan, makna perjuangan Reformasi adalah mewujudkan janji kemerdekaan. Cita-citanya adalah Indonesia yang sejahtera semuanya. "Janji kemerdekaan harus dilunasi selunas lunasnya. Dan, reformasi adalah jalan sejarah menuntaskan janji itu, Indonesia yang adil, setara, dan sejahtera untuk semua," kata Zulhasan, sapaan untuk Zulkifli Hasan.

Peringatan 20 tahun Reformasi, lanjut Zulkifli, mengingatkan kita bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dari ikhtiar melunasi janji kemerdekaan itu. Sudah banyak yang dihasilkan melalui reformasi, seperti kebebasan pers, otonomi daerah, dan demokrasi. Tetapi masih banyak PR yang juga harus segera diselesaikan. Antara lain, korupsi dan kesenjangan yang masih lebar antara kaya miskin serta Jawa-Luar Jawa.

"Sebagai bangsa yang ber-Tuhan kita patut mensyukuri apa yang sudah kita capai. Tetapi juga harus mewujudkan apa yang belum



dapat kita raih”, ungkap Zulhasan.

Ketua MPR menolak jika pekerjaan rumah yang belum terselesaikan selama reformasi

menjadikan alasan bagi bangsa Indonesia untuk kembali seperti pada era Orde Baru. “Itu namanya menjadikan siang seperti

malam, sangat sulit dan itu mustahil. Karena itu lebih baik bangsa Indonesia meneruskan apa yang belum tercapai itu secara bersama-sama,” ujar Zulhasan.

Zulkifli mengaku, dia adalah seorang pengusaha dan belum berkiprah di politik saat reformasi berlangsung. Karena itu, ia merasakan betul bagaimana dampak reformasi terhadap perekonomian. Apalagi, saat itu, Zulkifli menyempatkan diri melihat langsung akibat yang ditimbulkan oleh gerakan reformasi, kerusakan dan penjarahan ada di mana-mana.

Mendekati tahun politik 2019, secara khusus Zulhasan berpesan agar masyarakat kembali mewujudkan semangat reformasi dengan bersama mendahulukan Merah Putih. “Pilihan boleh beda, tapi Merah Putih kita tetapkan sama”, ujarnya. □

**MBO**

Bertemu Rizal Ramli

# Zulkifli Hasan: Pemilu Ajang Adu Gagasan, Bukan Perpecahan

Pemilu merupakan hajatan yang digelar secara reguler. Karena itu, masyarakat hendaknya tidak terpecah oleh berbagai ketegangan yang disulut oleh kepentingan elit.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR Zulkifli Hasan bertemu dengan mantan Menko Kemaritiman era Jokowi, Rizal Ramli. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Sebelum berbicara empat mata, Rizal Ramli menyebut Zulkifli Hasan sebagai sosok politisi yang gaul dan luwes. "Bapak Ketua MPR, beliau ini orangnya dinamis, luwes, dan yang penting itu gaul. Jago gaul itu penting, agar rakyat itu nyaman. Banyak ngomong saya rakyat, semua pihak. Kalau ketua MPR zaman dulu belum tentu jago gaul, kalau sekarang jago gaul itu penting. Tadi, kita berdiskusi tentang kesejahteraan dan keadilan daerah," kata Rizal di sela-sela sesi foto dengan awak media.

Zulkifli Hasan pun menyambut baik kedatangan Rizal Ramli untuk menyampaikan berbagai gagasan. Menurut Zulkifli, semakin banyak dialog antartokoh bangsa akan mengurangi ketegangan jelang tahun politik.

"Jadi MPR memfasilitasi bahwa perjumpaan di antara tokoh itu penting. Tidak

memandang beda partai, beda pilihan. Merah Putih kita sama. Kita jahit lagi persatuan kita. Silaturahmi gagasan ini yang perlu lebih banyak, dibanding kita saling jelek-menjelekan. Banyak persoalan di daerah yang perlu diselesaikan, mulai dari kemiskinan, pekerjaan, sampai pendidikan," kata Zulkifli.

Pemilu merupakan hajatan yang selalu digelar secara reguler. Zulkifli mengajak masyarakat agar tidak terpecah dengan berbagai ketegangan yang disulut oleh kepentingan elit.

"Kita mau pemilu yang berkualitas. Gagasan yang didahulukan, bukan emosi. Masyarakat kita sudah terbelah. Tentu kita tidak mau persaudaraan kita rusak oleh event yang reguler ini (Pemilu). Lima tahun lagi ada pemilu lagi, terus kita bersitegang lagi. Kapan kita punya waktu untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini bersama-sama?" kata Zulkifli.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Rizal sempat menyampaikan gagasannya tentang desentralisasi. Dia berharap agar Ketua MPR RI menyampaikan

kepada pemerintah, agar daerah-daerah yang memiliki wilayah yang luas dan angka kemiskinan tinggi menerima insentif khusus.

"Kami sambut ide ini untuk bertukar pikiran, salah satunya adalah selama ini kompetisi politik di Indonesia modalnya hanya pencitraan, sudah lama sekali," ujar Rizal Ramli menimpali.

Sehingga, kata Rizal, tokoh bangsa seperti Soekarno, Bung Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim pasti kalah jika ikut kompetisi politik hari ini. "Karena enggak bisa pencitraan apalagi Agus Salim naik sepeda kemana-mana," katanya.

Namun, kata Rizal lebih lanjut, Soekarno, Bung Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim memiliki gagasan besar untuk Indonesia. "Pada waktu itu kompetisinya adalah kompetisi gagasan, bagaimana buat dan dorong Indonesia merdeka, lalu habis merdeka mau ngapain. Masing-masing tokoh nyumbang ide dan pikiran," tuturnya.

Rizal melanjutkan, Indonesia akan sulit menjadi bangsa yang besar jika tenggelam dalam politik pencitraan. □

BSC

Bertemu Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo

## Di Tahun Politik, Sepakat Jaga Merah Putih

Jangan sampai kontestasi lima tahunan Pemilu ini malah memecah belah persatuan kita sebagai bangsa. Pilihan kita boleh beda, Merah Putih kita sama.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**M**ANTAN Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/5/2018). Sebelum Gatot, Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu juga menerima Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Zulkifli Hasan dan Gatot sepakat untuk menjaga dan mendahulukan Merah Putih di tahun politik ini. "Bersama Pak Gatot kami bicara sesuatu yang lebih dari sekedar kekuasaan. Kita bicara kepentingan semua elemen bangsa. Bangsa ini akan dibawa kemana, 10 sampai 15 tahun kedepan," kata Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan ingin mengajak semua tokoh nasional membicarakan isu-isu yang lebih substantif. Dia mengajak semua pihak untuk berpartisipasi mendorong pesta demokrasi

yang berkualitas. "Kita sepakat pemilu nanti harus berkualitas. Jangan sampai kontestasi lima tahunan ini malah memecah belah persatuan kita sebagai bangsa. Pilihan kita boleh beda, Merah Putih kita sama," kata Ketua Umum PAN ini.

Zulkifli juga menjelaskan, banyak persoalan mendesak yang membutuhkan masukan dari berbagai tokoh nasional. Dia ingin diskusi publik lebih berfokus kepada isu-isu yang substantif. "Dolar sekarang sudah Rp 14.000. Kita harus pikirkan persoalan ini bersama-sama. Jelas ini masalah buat sebagian pelaku usaha kita. Jangan sampai, pemilu membuat kita lupa persoalan yang lebih mendesak," tambahnya.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan, sudah lama sebenarnya ingin bertemu Zulkifli di MPR. "Ini kesempatan yang baik buat kami tukar pikiran bagaimana

bersama-sama menjaga Merah Putih. Dan berkaitan dengan Pilpres saya sampaikan bahwa kita mencari pemimpin terbaik," kata Gatot kepada wartawan.

Bagi Gatot, Zulkifli Hasan adalah sosok negarawan yang selalu mengutamakan persatuan dan mendahulukan Merah Putih. "Beliau sudah membuktikan kapasitasnya sebagai Ketua MPR adalah sosok yang mempersatukan. Sosok yang selalu bicara bagaimana menjaga Pancasila kita," kata Gatot.

Gatot juga menyebut Zulkifli Hasan sebagai sosok yang fisiknya selalu terjaga dan tidak pernah lelah. "Saya ikut intip-intip juga di media beliau satu hari bisa sampai 4 titik. Beliau selalu sehat dan terjaga tapi yang ikut beliau malah katanya banyak yang sakit," kata Gatot sembari bercanda. □

BSC

Bertemu Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang

## Membahas Politik dan Ekonomi

Setelah bertemu Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Rizal Ramli, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga bertemu Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang. Apa saja yang mereka bicarakan?



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**J**ELANG pileg dan pilpres 2019 sejumlah tokoh nasional secara bergantian datang menemui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Setelah sebelumnya bertemu Mantan Palima TNI Gatot Nurmantyo dan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Rabu (9/5) giliran Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menyambangi kantor Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9 Kompleks MPR, DPR dan DPD RI Senayan, Jakarta.

Majdi datang mengenakan kemeja batik warna hijau dipadupadankan dengan peci dan celana kain warna hitam. Ia tiba di kompleks Parlemen tampak rada tergesa-gesa karena sudah mepet dengan jadwal waktu untuk bertemu Ketua MPR. Bahkan, karena terjebak kemacetan TGB tak segan naik Gojek, supaya sampai di gedung MPR tepat waktu.

Bigitu tiba TGB langsung bergegas menuju ruang Ketua MPR di lantai 9 Gedung Nusantara III. Di sana sudah berkumpul puluhan awak media, kameramen, dan fotografer untuk merekam peristiwa itu. Sejumlah fotografer pun langsung membidikkan kameranya untuk mengabadikan peristiwa kedatangan TGB di ruang kerja

Ketua MPR tersebut.

Sebelum pertemuan berlangsung, di hadapan insan pers ketua MPR Zulkifli Hasan memuji tamunya, Muhammad Zainul Majdi. Bagi Zulkifli Hasan, pertemuan dengan TGB adalah untuk saling tukar pikiran dan gagasan mengenai Indonesia ke depan, khususnya aspirasi masyarakat dari luar Jawa. Buat Ketua MPR, TGB adalah sosok yang komplet. Dia adalah interpreneur, ilmuwan penghafal Quran. TGB, menurut Zulkifli, adalah ulama yang umaro, dan umaro yang ulama.

“Beliau, Pak TGB, memimpin NTB selama 2 periode. Kita ingin mendengarkan ide, pengalaman, dan juga aspirasi dari daerah. Tentu ujungnya gagasan untuk Indonesia lebih baik,” kata Ketua Umum PAN ini.

Selama kepemimpinan TGB, menurut Zulkifli Hasan, NTB mengalami kemajuan pesat. NTB menjadi tempat tujuan wisata internasional. Punya bandara internasional, Islamic Center yang besar, dan kemajuan ekonominya menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan juga mengajak TGB untuk menyambut tahun politik sebagai kontestasi pemikiran, bukan ajang saling menyerang. Seperti diketahui,

nama TGB juga masuk dalam bursa capres/cawapres di masyarakat.

“Bersama Pak TGB ini kita bangun kesepakatan bersama agar pemilu damai, berkualitas dan legitimasinya kuat. Pilihan politik boleh beda, tapi persatuannya tetap dijaga,” pinta Zulkifli Hasan. Karena, katanya lebih lanjutnya, ada banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan bersama dan tak bisa sendiri sendiri. “Temu tokoh ini adalah ikhtiar untuk menghadirkan solusi bersama untuk bangsa,” tutup Zulkifli Hasan.

Usai pertemuan, kepada awak media TGB menyatakan bahwa dirinya sudah berkawan lama dengan Zulkifli Hasan. Karena itu, saat mendapat undangan untuk bertemu dan membahas kepentingan bangsa, ia langsung memenuhi undangan tersebut. TGB menyatakan, Zulkifli Hasan adalah sosok pemimpin yang punya keinginan kuat. Terutama untuk menjaga agar hiruk pikuk tahun politik tetap berada dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

“Beliau memiliki sikap kenegarawanan yang sangat besar, dan selalu memikirkan kepentingan bangsa dan negara”, ujar Zainul Majdi. □

MBO



## Pertemuan Zulhasan dan Cak Imin

# Akan Mempelopori Pemilu Damai

Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR Cak Imin melakukan pertemuan di ruang kerja Ketua MPR. Usai pertemuan Zulkifli Hasan menyatakan: “Saya dan Cak Imin akan menjadi pelopor Pemilu damai.”



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menemui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan) di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Dalam pertemuan tersebut, Zulhasan menegaskan bahwa dia dan Cak Imin akan menjadi pelopor pemilu damai. “Jadi sebagai Ketua MPR, saya tegaskan berkali-kali dalam berbagai kesempatan bahwa kita semua menginginkan Pemilu ini menjadi Pemilu damai. Itulah tugas kita semua. Saya dan Cak Imin akan menjadi pelopor Pemilu Damai, dan kami mengajak tokoh-tokoh nasional lainnya agar menjaga supaya pelaksanaan Pemilu menjadi damai, adem dan lancar tanpa gejolak negatif,” katanya.

Zulhasan mengungkapkan bahwa tahun

politik yang ditandai dengan pelaksanaan Pilkada, Pileg, Pilpres adalah sesuatu yang biasa di negara Indonesia. Semua momen tersebut adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jangan sampai demokrasi yang dibangun dengan susah payah pecah berantakan karena saling berkonflik gara-gara merebut kekuasaan. Kekuasaan penting, tapi menjaga persatuan serta kesatuan bangsa jauh lebih penting.

“Nanti saya sama Cak Imin akan pakai kaos bertuliskan Pemilu Damai dan Berkualitas. Intinya, mari kita laksanakan pemilu dengan damai, dan syukur-syukur nanti kita akan dapatkan pemimpin yang baik untuk masa depan Indonesia. Soal Cak Imin mau maju jadi Cawapres saya dukung. Itu kan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih,” ujarnya.

Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa

seluruh rakyat Indonesia harus bekerja keras untuk menyukseskan pemilu. Cak Imin mengaku, pertemuan dengan Zulhasan adalah momen yang sangat baik untuk berdiskusi berbagai hal.

Tahun politik 2018 dan 2019 adalah pelaksanaan demokrasi Indonesia dan merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Partisipasi rakyat sangat menentukan sukses tidaknya tahun politik dan yang terpenting persatuan serta kesatuan bangsa tidak boleh hancur hanya gara-gara beda pilihan.

“Dari pertemuan dengan Bang Zul banyak sekali yang kita bicarakan, antara lain bagaimana menjalankan pemilu yang berkualitas, persaingan yang sehat dan saling memuliakan. Dan, saya apresiasi Bang Zul mendukung saya maju Cawapres,” ujarnya. □

DER

UIN Jakarta

# Ketua MPR: Universitas Negeri Bagus, Swasta Juga

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyemangati para peserta Fun Try Out SBMPTN 2018 di UIN Jakarta. Dia juga mendoakan agar para peserta Try OUT diterima di perguruan tinggi yang dicita-citakan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ADA Minggu siang (29/4) Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendapat sambutan hangat dari 2000 calon mahasiswa. Itu terjadi pada saat ia mendarat lokasi *Fun Try Out SBMPTN* Tahun 2018 di Auditorium Haris Nasution, UIN Jakarta. Begitu tiba di tempatnya berlangsungnya acara itu, dia disambut tepuk tangan riuh rendah, dan jepretan lampu kamera HP.

Kehadiran Zulkifli Hasan di sana, juga diikuti Ketua Umum Yayasan Generasi Pintar, Raja Sapta Oktohari, dan Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada MA. Tiba di sana, Ketua MPR langsung berjalan menuju podium. Tak lama berselang, lagu kebangsaan Indonesia Raya pun dikumandangkan, dan dinyanyikan dengan penuh khidmat.

Saat menyampaikan sambutan, Ketua MPR Zulkifli Hasan antara lain mengatakan, sudah ada ratusan orang yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka itu antara lain, anggota DPR, bupati, walikota, dan gubernur.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat negara itu, menurut Zulkifli Hasan, tidak semata-mata merupakan kesalahan mereka. Tetapi, ada juga kesalahan masyarakat, karena telah memilih mereka menjadi pejabat. Karena, dalam konstitusi kita dikatakan, rakyatlah yang berdaulat. Rakyatlah yang memilih bupati, walikota, gubernur dan anggota DPR. “Jadi, kalau sekarang mereka ditangkap KPK, berarti kesalahan rakyat”, ujar Zulkifli Hasan menegaskan.

Karena itu, Zulkifli mengajak para calon mahasiswa untuk menjadi agen perubahan. Memberikan pendidikan kepada masyarakat agar memilih calon bupati, walikota, gubernur dan anggota DPR yang jelas rekam jejaknya, pendidikan, dan teman-temannya. Jangan memilih calon yang tidak jelas asal-usul serta kredibilitasnya. Dan, jangan pula memilih seorang calon karena materinya. Apalagi kalau tidak tahu dari mana asal usul hartanya.

“Mahasiswa harus mampu mengubah cara pandang masyarakat yang salah dalam memilih pemimpinnya. Jangan memilih karena sudah menerima sembako, kerudung, sarung, atau uang transport. Agar kesalahan memilih pemimpin seperti terjadi selama ini tidak terulang lagi”, katanya.

Kepada para peserta Try Out, Zulkifli Hasan meminta agar tidak sekali-kali meninggalkan Pancasila. Dia lalu mengajak para calon mahasiswa untuk terus menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila berasal dari dalam perut bumi Indonesia, sehingga sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan tak lupa mendoakan agar para peserta Try Out diterima di perguruan negeri yang dicita-citakan. Supaya mereka bisa menjadi profesor atau pengusaha muda yang berhasil. “Tetapi kalau tidak berhasil juga tidak boleh putus asa. Saya sekolah di PGA,



lalu kuliah di swasta, tapi mampu jadi pengusaha, kemudian menteri, dan sekarang menjadi Ketua MPR”, kata Zulkifli lagi.

Jelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, Zulkifli mengingatkan agar melalui

tahun politik dengan cara-cara yang baik. Dalam hal persaingan, kata Zulkifli, suasana panas adalah hal biasa. Yang penting, semua pihak tidak saling menista dan merendahkan. Intinya, jangan memper-

taruhkan segalanya, jangan mempertaruhkan persatuan. Karena dalam kontestasi Pilkada yang dihadapi adalah sesama anak bangsa. □

MBO

## Global Council Tolerance and Peace (GCTP)

# Bersama Membangun Perdamaian Dunia

Ketua MPR Zulkifli Hasan diajak Ahmed Aljarawan ikut membangun perdamaian dunia. Menjaga perdamaian merupakan amanat konstitusi.

**K**ETUA MPR Zulkifli Hasan mendukung misi yang dibawa oleh Ahmed Aljarawan. Pria asal Uni Emirat Arab yang tak lain adalah Ketua Global Council Tolerance and Peace (GCTP) pada 2 Mei 2018 melakukan kunjungan kehormatan ke Ketua MPR Zulkifli Hasan dan diterima di Lt. 9 Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPRI/DPD Senayan, Jakarta.

Kepada tamunya, Zulkifli Hasan menjelaskan, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ada amanat bangsa yang menegaskan agar Indonesia ikut menjaga perdamaian dunia. “Jadi kalau kita membela Palestina, Rohingya, dan negara tertindas lainnya, itu merupakan perintah konstitusi,” ujarnya. “Bukan karena membela negara-negara Islam,” tambahnya.

Lebih lanjut Zulkifli menyatakan, Islam dan demokrasi di Indonesia bisa seiring sejalan. Beragam etnis, bahasa, suku, dan perbedaan lainnya bisa hidup berdampingan. “Islam di Indonesia adalah Islam toleran,” tegasnya. Di Indonesia, menurut Zulkifli Hasan, semua agama ada. “Perbedaan yang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ada tak menghalangi masing-masing kelompok untuk bisa saling kerja sama,” paparnya.

Di Indonesia, kata Zulkifli, banyak tokoh toleransi. Putri Gus Dur, Yenny Wahid, yang hadir dalam kesempatan itu disebutnya sebagai salah satu tokoh toleransi di Indo-

nesia. “Yenny adalah tokoh perdamaian, dialog antaragama, kesetaraan, dan Islam kebangsaan,” ucapnya.

Ahmed Aljarawan dalam kesempatan itu mengajak Zulkifli Hasan untuk ikut bergabung dalam GCTP dan *International Parliament Tolerance and Peace* (IPTC). Ajakan kepada

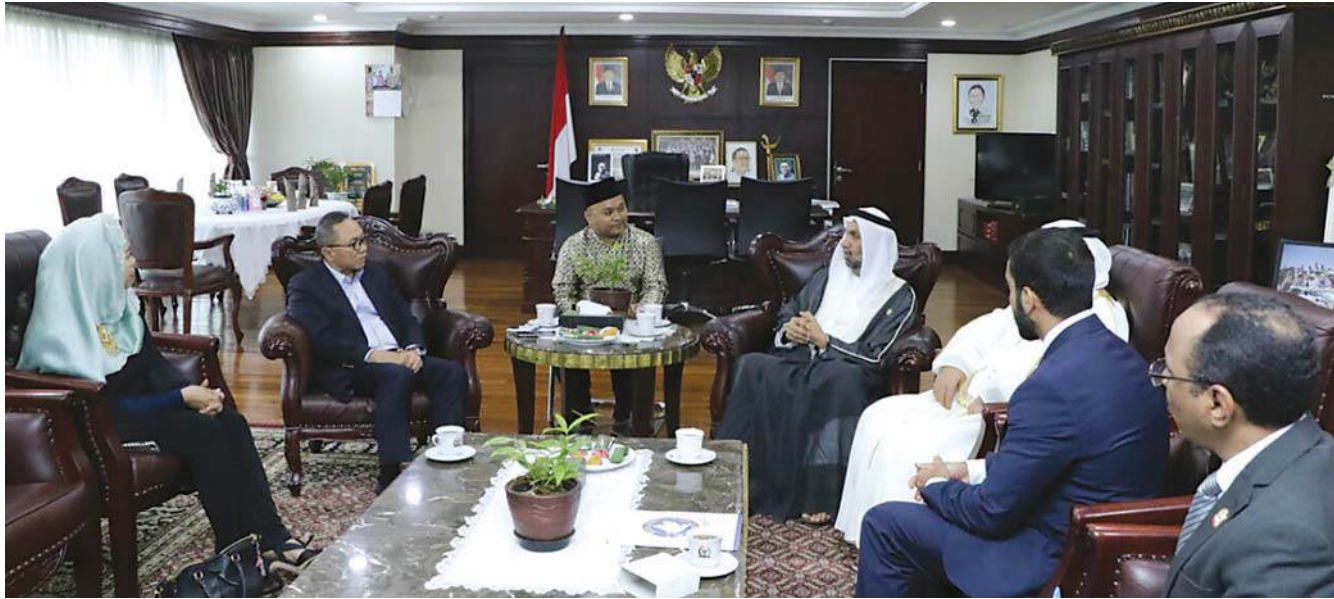


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Zulkifli Hasan sebab dia menganggap Indonesia negara besar di Asia. Tak hanya itu, dia mengakui, Indonesia merupakan negara yang toleran. Dia berharap, sikap seperti itu bisa ditularkan kepada negara-negara lain. "Saya datang ke Indonesia untuk mengajak bersama mewujudkan perdamaian dunia," ujarnya.

Dalam organisasi yang tujuan mengajak terciptanya perdamaian dunia tersebut, Ahmed Aljarawan menyebut, beranggotakan tokoh-tokoh perdamaian dunia dari 50 negara. "Kami meminta yang mulia Zulkifli Hasan terlibat aktif dalam organisasi ini," pintanya. Kelak organisasi ini akan membuka cabang di negara-negara anggota. Keinginan Ahmed Aljarawan tersebut didukung oleh Zulkifli Hasan. "Tugas perdamaian dunia memang amanat konstitusi," tegasnya.

### Bertemu SMMI

Selepas menerima Ahmed Aljarawan, selanjutnya Ketua MPR Zulkifli Hasdan bertemu dengan Sarekat Mahasiswa Muslim Indonesia (SMMI). Ketua SMMI, Azizi Rais, menyampaikan pesan bahwa organisasinya akan memberi gelar kepada pria asal Lampung itu sebagai Tokoh Pemimpin Bangsa Yang Inspiratif. Pemberian gelar itu, menurut Azizi, dengan alasan mantan Menteri Kehutanan itu adalah tokoh yang dekat dengan umat dan rakyat. "Hal inilah yang membuat kami memberi anugrah

tersebut," ujarnya. Azizi mengaku sering bertemu dengan Zulkifli Hasan dalam berbagai kegiatan generasi muda dan diskusi lainnya. "Saat dalam Forum Cibodas bersama HMI, GMNI, PMII, GMKI, dan lainnya kita bertemu Pak Zul," ungkapnya.

Pemberian anugerah itu, rencananya dilaksanakan pada pertengahan Mei 2018. Kehadiran SMMI ke gedung parlemen juga untuk menyatakan anggota organisasi yang memiliki cabang di berbagai kota di Indonesia itu ingin diberi Sosialisasi Empat Pilar.

Mendapat dukungan dari SMMI, Zulkifli Hasan merasa bangga. Selanjutnya dia berpesan kepada generasi muda agar mereka tetap eksis. Sebagai mahasiswa,

tentu mereka menjadi penerus bangsa. Dia berharap, mereka benar-benar menguasai ilmu agar bangsa ini tidak dibodohi oleh bangsa-bangsa yang lain. "Generasi muda harus cerdas agar negara ini tidak mudah ditekan dan dikendalikan oleh negara lain," tegasnya. "Jangan mau ditekan oleh tenaga kerja dari asing," tambahnya.

Untuk memberi penguatan jiwa-jiwa kebangsaan tersebut maka MPR siap untuk menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota SMMI. "SMMI di manapun cabangnya bisa bertemu dengan saya untuk diskusi mengenai wawasan kebangsaan," paparnya. □

AWG



Kuliah Kebangsaan di Universitas Riau

# Oesman Sapta: Implementasikan Empat Pilar dari Hal Sederhana

Implementasi Empat Pilar MPR mulailah dari hal-hal sederhana, lama kelamaan akan berkembang dalam tataran bangsa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**AAT rangkaian kunjungannya di Provinsi Riau, Selasa (8/5/2018), Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menggelar Kuliah Kebangsaan dengan tema 'Merawat Indonesia Dengan Empat Pilar Kebangsaan'. Acara ini diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

Acara yang digelar di Aula Rusli Zainal, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau ini dihadiri Kepala Badan Pembinaan ideologi Pancasila Yudi Latief, Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI Prof. Bachtiar Aly, Wakil Rektor Universitas Riau Dr. Syapsan, para dekan, dosen dan ratusan mahasiswa berbagai fakultas Universitas Riau.

Dalam *keynote speech*-nya di hadapan para peserta, Oesman Sapta mengingatkan, para mahasiswa sebagai generasi muda bangsa harus memahami dan mengamalkan betul-betul nilai-nilai Empat Pilar MPR yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman Empat Pilar yang baik akan memunculkan karakter bangsa yang kuat.

"Bangsa ini sangat membutuhkan generasi yang memiliki karakter kuat. Dari hal yang sederhana saja, yakni cinta keluarga, terutama hormati, sayangi dan cintai ibu kita. Lalu dalam konteks yang luas cinta pada bangsa dan negara dengan sebenarnya cinta," katanya.

Bukti pemahaman dan implementasi Empat Pilar, menurut OSO, juga bisa dalam bentuk partisipasi aktif dalam tahun politik 2018 dan 2019. Caranya, dengan memilih berdasarkan hati nurani masing-masing. Memilih parpol, caleg bahkan capres sesuai harapan bangsa, harapan rakyat yang mampu membawa bangsa dan rakyat sejahtera.

"Generasi muda bangsa yang berkarakter Empat Pilar juga akan menjaga generasi muda dari bahaya narkoba. Generasi muda penerus bangsa pasti akan menghindari dan menjaga diri dari narkoba, karena dampaknya sangat merusak semuanya, mulai dari merusak diri sendiri. keluarga hingga bangsa," tandasnya.

Berbicara soal Pancasila, Prof. Bachtiar Aly mengungkapkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia telah meletakkan dasar-

dasar berbangsa puluhan tahun lalu, dan generasi saat ini tinggal merawatnya dan lebih menguatkan lagi.

Salah satu contoh peletakan dasar berbangsa, menurut Bachtiar Aly, adalah soal bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, medium komunikasi yang diterima baik seluruh suku bangsa Indonesia, yakni bahasa Melayu. Para pendiri bangsa sangat hebat, mereka telah menjadi teladan betapa kesatuan bangsa di atas segalanya tanpa memikirkan ego kedaerahan. Mereka memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bukanlah bahasa Jawa padahal dulu mayoritas. Inilah yang mesti diteledani generasi sekarang," ungkapnya.

Bahkan, negara lain yang memiliki banyak suku bangsa dan bahasa sangat sulit menentukan satu bahasa pemersatuannya, karena terhalang ego kedaerahan yang sangat kuat. Indonesia bisa karena Pancasila sebagai nilai luhur bangsa telah mengakar kuat dalam perilaku dan karakter bangsa Indonesia sehingga kepentingan bersama lebih utama dibanding ego kedaerahan. □

DER

Hardiknas 2018

# Zulkifli Hasan Pimpin Deklarasi Implementasi Pengajaran Pendidikan Pancasila

Deklarasi Implementasi Pengajaran Pendidikan Pancasila penting agar nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan dimulai sejak usia dini.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**B**ERTEPATAN dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin Deklarasi Implementasi Pengajaran dan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah. Deklarasi diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kaukus Pancasila DPR RI, Yayasan Cahaya Guru, di Gedung Nusantara IV, Parlemen, Jakarta, Rabu (2/5).

Deklarasi ini dihadiri anggota MPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi keagamaan, perwakilan sekolah-sekolah, dan masyarakat sipil. Deklarasi bersamaan dengan Festival Pendidikan Pancasila ini juga dihadiri ratusan siswas-siswi dari 12 lembaga pendidikan yang telah melakukan internalisasi Pancasila dalam kegiatan belajar di sekolah masing-masing.

Menurut Zulkifli Hasan, selama 20 tahun, sejak reformasi ini, pelajaran Pancasila mulai hilang. Dulu dikenal ada pelajaran Civic, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

yang diajarkan di sekolah-sekolah. "Tentu hal itu tidak bagus untuk ketahanan nasional, untuk wawasan kebangsaan, dan untuk membangun karakter anak-anak muda kita," kata Zulkifli Hasan usai deklarasi.

"Deklarasi ini penting agar nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan itu dimulai sejak usia dini, di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas," sambungnya. □

BSC

## Berikut isi Deklarasi Implementasi Pengajaran dan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah:

Mengingat bahwa sektor pendidikan menjadi kunci pembentukan karakter siswa dan bangsa maka Pancasila beserta nilai-nilainya perlu diajarkan dan diintegrasikan dalam pendidikan dasar dan menengah.

Sehingga MPR RI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kaukus Pancasila DPR RI, dan Yayasan Cahaya Guru bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi keagamaan, perwakilan sekolah-sekolah, dan masyarakat sipil menyatakan:

1. Sesuai konstitusi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Segala bentuk kebijakan pendidikan yang mengatur kurikulum, wajib mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang berintikan inklusivitas, dari kebhinnekaan.
2. Mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk berupaya mengajarkan kembali Pancasila dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam segala kebijakan dan praktik pendidikan di berbagai tingkatan.

Milad ke-56 Wanita Islam

## Zulkifli Hasan Ajak Aktivistis Perempuan Cegah Politik Uang

Politik transaksional akan menghasilkan pemimpin yang transaksional juga. Politik uang, bagi-bagi sembako merupakan politik transaksional.

Merah Putih. Kita jaga persatuan. Pilkada, Pileg, dan Pilpres adalah hal yang biasa dilakukan rutin dalam demokrasi,” katanya.

“Ternyata Wanita Islam juga memiliki aspirasi yang sama dengan kita, yaitu menolak politik uang,” tutup Zulkifli Hasan.

Dalam pembukaan Milad ke 56 ini, Ketua Umum Wanita Islam Hj. Marfuah Mustofa juga mengungkapkan Wanita Islam harus melek



**K**ETUA MPR Zulkifli Hasan meminta Wanita Islam untuk melakukan edukasi politik untuk menghindari politik uang dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.

“Ini tahun politik, saya minta kepada wanita Islam untuk melakukan edukasi politik untuk menghindari politik uang,” kata Zulkifli Hasan usai membuka seminar politik dalam rangka milad ke-56 Wanita Islam di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

Menurut Zulkifli Hasan, politik transaksional akan menghasilkan pemimpin yang transaksional juga. Politik uang, bagi-bagi sembako merupakan politik transaksional.

“Politik transaksional seperti itu akan menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan,” ujarnya.

Untuk itu Zulkifli mengajak Wanita Islam ikut menjalankan demokrasi yang berkualitas dan demokrasi yang sarat dengan nilai-nilai. “Bukan demokrasi yang diwarnai politik uang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dan sebar sembako,” ujarnya.

Pada tahun politik ini, Zulkifli juga mengajak Wanita Islam untuk bersatu dan menjaga persatuan. Pemilihan kepala daerah, Pileg, dan Pilpres adalah sesuatu yang biasa. “Dalam tahun politik ini mari kembali menjahit

dan mengetahui politik. Seperti bagaimana memilih pemimpin yang mempunyai kepedulian pada umat dan bangsa. “Karena itu Wanita Islam menyuarakan tolak politik uang,” katanya. □

BSC

Launching Pesona Khazanah Ramadhan 2018

# Zulkifli Hasan: Rakyat Jangan Mau Dibodohi

Bulan Ramadhan penuh berkah. Ini momen yang baik untuk menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



apa Islam itu sebenarnya,” ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan), saat meresmikan Launching ‘Pesona Khazanah Ramadhan 2018 di Bumi Seribu Masjid’ dengan tema: ‘Perkuat Silaturahmi untuk Kekuatan Bangsa’, di Selasar Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH. Muhammad Zainul Majdi, Ketua Bidang Takmir Masjid Istiqlal Buya KH. Adnan Harahap, Wapemred Republika dan ratusan masyarakat dari berbagai ormas Islam dan umum.

Zulhasan menyatakan, mengapa umat Islam perlu mengaktualisasikan dirinya, sebab sejarah panjang peradaban Islam berisi segala kejayaan Islam yang sangat luar biasa. Kejayaan Islam yang mengubah peradaban dunia berawal dari masjid yang sederhana di Madinah yang dibangun oleh seorang manusia luarbiasa, utusan Allah SWT Muhammad SAW.

Di masjid itu lahir peradaban Islam yang agung. Masjid sederhana tersebut selain menjadi pusat keagamaan, juga sebagai tempat segala peradaban dan aktifitas umat.

Dari masjid itulah lahir ilmuwan-ilmuwan Islam yang mengubah peradaban dunia dengan berbagai bidang ilmu, antara lain astronomi, kedokteran yang pada masanya mengalahkan peradaban Barat yang masih dalam era kegelapan.

“Intinya, Islam jaya karena ulamanya adalah seorang ilmuwan, saudagar dan umaro bahkan gabungan ketiganya. Ayo kita bangkit tunjukkan bahwa Islam itu keren, Islam itu luar biasa, Islam itu jaya, Islam itu saudagar, pengusaha, politisi handal, ilmuwan hebat, ayo bangkit. Kita tidak akan bisa berubah nasib kita sebelum kita mengubah diri kita sendiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhasan juga mengingatkan agar umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya jangan mudah diadu-adu sesama umat dan lain umat. Jangan mau diprovokasi untuk berkonflik. Umat Islam dan rakyat Indonesia jangan mau dibodohi. Negara lain sudah memikirkan ruang angkasa, rakyat Indonesia masih saja mau diadu-adu untuk ribut karena perbedaan. □

DER

**U**MAT Islam menyambut kedatangan bulan mulia, bulan penuh kebaikan dan hikmah, yakni Ramadhan. Bulan suci Ramadhan adalah momen yang tepat bagi umat Islam Indonesia untuk mengaktualisasikan Islam yang sebenarnya, yakni Islam yang penuh kedamaian, prestasi, dan rahmatan lil alamin.

“Mari di momen Ramadhan kita sama-sama tunjukkan bahwa Islam itu tidak gampang marah, Islam bukan radikal, umat Islam adalah kedamaian, entrepreneur, umaro, ilmuwan. Umat Islam terhormat tidak mau disuap saat pemilu. Mari kita tonjolan



Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

## Gelar Petinggi Agung Buat Cak Imin

Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar mendapat gelar dari Kesultanan Melayu Sintang. Alasannya, Cak Imin diakui mempunyai jasa kepada bangsa dan negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**AMIS, 10 Mei 2018, di Istana Al Muqarammah, Kesultanan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, berlangsung prosesi agama, adat, dan budaya. Sultan Sintang Kesuma Negara V dan para pangeran terlihat sibuk dalam acara yang digelar di Balai Perangin-Angin itu. Masyarakat di sekitar keraton pun ikut memeriahkan acara yang dimulai sejak pagi itu. Hajatan besar yang digelar oleh kesultanan yang berdiri pada Abad IV itu dalam rangka pemberian anugerah gelar kehormatan kepada Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar.

Mendapat gelar *Datuk Petinggi Agung*

*Mangku Benoa*, Muhaimin Iskandar mengucapkan terima kasih kepada Sultan Sintang. "Gelar ini menjadi amanah bagi saya untuk ikut menjaga Kesultanan Sintang," ujarnya. "Saya dan seluruh keluarga merasa bangga dan berterima kasih atas acara yang digelar," tambahnya.

Dalam sambutan, Cak Imin menyebut Kesultanan Sintang memiliki khasanah adat, budaya, dan tradisi serta pengalaman sejarah yang memberi inspirasi dan semangat untuk mengabdikan pada NKRI. "Kalau dirunut dari sejarah, Kesultanan Sintang merupakan salah satu kesultanan yang membentuk NKRI," ungkapnya.

Cak Imin menyakini banyak pihak yang belum mengetahui bahwa lambang negara Garuda Pancasila itu inspirasinya adalah dari lambang Kesultanan Sintang. "Dari sinilah anak negeri perlu diingatkan sejarah lambang Garuda Pancasila berasal dari Sintang," paparnya. Lambang Garuda Pancasila pun secara resmi telah ditetapkan menjadi lambang negara Indonesia. Menurut Cak Imin, bangsa Indonesia berhutang budi pada Kesultanan Sintang. "Selayaknya pemerintah memerhatikan keberadaan Kesultanan Sintang," tegasnya.

Cak Imin dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi kepada Kesultanan Sintang sebab kesultanan itu ikut membangun karakter dan kepribadian bangsa. "Mari kita teruskan nilai-nilai Kesultanan Sintang," tegasnya.

Sultan Sintang dalam sambutannya memaparkan, gelar diberikan kepada Cak Imin sebab pria asal Jombang, Jawa Timur, ini telah berjasa kepada bangsa dan negara. Cak Imin dinilai mampu menjaga nilai-nilai luhur bangsa. "Untuk itu kita menitipkan Pancasila agar nilai-nilainya berakar dan hidup di tengah masyarakat," harapnya.

Dikatakan bahwa kesultanan yang dipimpinnya itu merupakan salah satu kesultanan yang ada di Kalimantan Barat yang terus berupaya menjaga kearifan lokal. "Kesultanan Sintang berusaha memberi warna terhadap peradaban," ujarnya. Diakui selama ini kesultanan yang berada di tepi Sungai Kapuas dan Malawi itu mampu memberi pengayoman bagi semua. Di tengah kemajuan peradaban, Sultan Sintang mengatakan, kekuasaan yang ada harus mampu menjawab tantangan yang ada. "Kesultanan masih eksis sebuah bukti kita mampu merawat kearifan lokal," paparnya.

Bupati Sintang, Djarot Winarno, dalam sambutannya, mengucapkan selamat atas anugerah gelar kehormatan yang diterima Cak Imin. "Dengan gelar itu maka Cak Imin menjadi keluarga orang Sintang," ujarnya. "Kita bangga atas anugerah ini," tambahnya. □

AWG



**Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2018 di USU Medan**

# Mendapat Sambutan Hangat Para Pengunjung

Untuk ketiga kalinya MPR bersama MK dan KPK menyelenggarakan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi. Kali ini bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**F**ESTIVAL Konstitusi dan Antikorupsi 2018 yang diselenggarakan oleh tiga lembaga Negara: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama Universitas Sumatera Utara (USU) digelar selama dua hari (14-15 Mei 2018) di Auditorium USU Medan, Sumatera Utara, Selasa (15/5/2018).

Festival yang mengambil tema: 'Mengawal Demokrasi Konstitusi, Melawan Korupsi' tersebut mendapat sambutan hangat para pengunjung. Lebih dari seribu pengunjung dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para mahasiswa dari berbagai fakultas di USU dan kampus lainnya di Medan, dan juga elemen kepemudaan dan kemasyarakatan Kota Medan. Hal ini tak lepas dari kegiatan yang disuguhkan dinilai sangat menarik dan bermanfaat, antara lain, diskusi panel, diskusi kampus (talkshow), hadirnya stan-stan dari MPR, MK, KPK dan USU.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua MK Anwar Usman, Rektor USU Prof. Runtung Sitepu, Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah, serta para dekan dan dosen USU.

Gelaran festival makin mendapatkan apresiasi masyarakat ketika di tengah-tengah puncak acara (15 Mei 2018) digelar

penandatanganan MoU 'Deklarasi Antikorupsi' oleh MPR yang diwakili Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, Ketua MK, Ketua KPK dan Rektor USU.

Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2018 merupakan kali ketiga diadakan dan tetap merupakan hasil kerja sama antara MPR, MK, dan KPK bersama perguruan tinggi. Sebelumnya, pada 24 Oktober 2016 diselenggarakan di Universitas Hassanudin Makassar, dan pada 10 November 2017 digelar di Universitas Indonesia (UI).

Dalam keterangannya saat jumpa pers,

Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono mengatakan bahwa persoalan korupsi harus mendapatkan perhatian lebih oleh seluruh elemen bangsa, dalam konteks penanggulangan dan pencegahan. Bambang menegaskan, kunci penanggulangan korupsi adalah di bidang pelaksanaan hukum yang tegas dan tak pandang bulu. Selain itu, juga perlu dibangun budaya hukum di tengah masyarakat.

"Karena itu MPR saat ini melalui Badan Pengkajian sedang mempersiapkan draf haluan negara yang akan membuat kearah





mana hukum akan dibangun, termasuk target-target untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi sampai 100 tahun ke depan. Sehingga tidak ada lagi keluhan bahwa sudah banyak yang kita lakukan, tapi korupsi tetap saja bermunculan. Mudah-mudahan upaya-upaya MPR ini ada manfaatnya untuk Indonesia,” tandasnya.

### Banyak Pengetahuan Baru

Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah saat ditemui usai Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2018 mengungkapkan bahwa festival ini dampaknya sangat luar biasa kepada para pengunjung, tertutama para mahasiswa.

“Saya melihat dari tiga kali penyelenggaraan festival serupa banyak sekali pengetahuan baru terkait korupsi yang dapat diserap mahasiswa. Padahal hal baru itu merupakan tindakan keseharian mahasiswa, bahkan sudah dianggap biasa. Misal, nitip absen atau minta diabsenin teman, itu korupsi juga. Bolos kuliah juga termasuk korupsi. Ini memang hal kecil, tapi jika dibiasakan maka perilaku korupsi mahasiswa akan makin meningkat di masa depan,” ujarnya.

Siti Fauziah melihat banyak mahasiswa terhenyak ketika menyadari bahwa hal-hal

sepele dan kecil yang ternyata masuk kategori korupsi, dan dampak ke depannya sangat berbahaya buat diri mereka. Apalagi mereka adalah generasi muda penerus kepemimpinan bangsa.

“Saya rasa festival ini harus secara kontinyu diselenggarakan di berbagai kampus di Indonesia, sebab sangat positif untuk mahasiswa. Apalagi kerjasama tiga lembaga negara ini MPR, MK dan KPK sangat pas dan solid. KPK adalah dalam bidang pemberantasan korupsi, MK dalam bidang hukum penyelesaian sengketa konstitusi, MPR dalam bidang legislasi seperti diketahui anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Jadi, sinergitas tiga lembaga ini sangat pas,” ungkapnya.

Siti Fauziah juga mengungkapkan bahwa dalam momen festival tersebut, MPR melalui Biro Humas Setjen MPR RI juga membuat booth stand pameran MPR RI. Booth stand MPR mendapatkan respon luar biasa pengunjung mahasiswa. Di booth stand MPR, pengunjung bisa memperoleh berbagai informasi seputar MPR RI, mulai dari program MPR sampai profil pimpinan dan anggota MPR.

“Di booth MPR, kita sekaligus memperkenalkan berbagai hal seputar MPR, ter-

masuk seputar Sosialisasi Empat Pilar MPR berikut metode-metode penyampaiannya, yang ternyata banyak menarik keingintahuan pengunjung,” imbuhnya.

Di booth MPR juga, lanjut Siti Fauziah, tim Humas Setjen MPR mengadakan kuis berupa pertanyaan seputar MPR, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan juga tantangan seperti menyanyikan lagu-lagu perjuangan, mengucapkan isi Pancasila, isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Antusiasme para mahasiswa luar biasa. Saya dan tim Humas sampai kewalahan memberikan berbagai pertanyaan dan tantangan. Walaupun ada beberapa yang masih salah-salah atau keliru dalam menjawab, tapi mereka berusaha keras untuk mempelajari. Dan Alhamdulillah, masih banyak juga mahasiswa yang betul-betul baik pengetahuannya seputar MPR dan seputar bangsa,” ungkap Siti Fauziah.

Siti Fauziah menilai kegiatan ini sangat positif. “Kami percaya dengan terus belajar dan berupaya sungguh-sungguh, generasi muda Indonesia mampu memahami nilai-nilai luhur bangsanya untuk modal mereka sebagai penerus kepemimpinan bangsa,” tandasnya. □

DER

Wakil Ketua MPR Abdul Muhaimin Iskandar

## Karut Marut Problematika Sektor Usaha

Pada kesempatan buka bersama di rumah dinas, Wakil Ketua MPR Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti berbagai hal, antara lain soal impor beras, dan keluhan para pengusaha.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Abdul Muhaimin Iskandar menyesalkan perbedaan data soal panen beras sehingga melahirkan kebijakan impor. Karena itu Muhaimin meminta pemerintah untuk menghentikan impor beras. Ini penting, karena saat ini berdasar data dari Kementerian Pertanian, stok beras dalam negeri masih berlimpah.

“Segera hentikan impor beras, Menko Perekonomian harus mengambil alih kendali. Beri kesempatan petani menjual produknya

tanpa ada desakan beras impor,” ungkap Cak Imin, begitu Muhaimin biasa dipanggil.

Intervensi Menko Perekonomian, kata Muhaimin, diperlukan untuk mengajak Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan duduk bersama dan membahas perbedaan data panen dengan tuntas. Karena, menurut Cak Imin, perbedaan data BPS ini problem lama yang tidak pernah selesai. Sementara para gubernur juga menolak impor beras yang dilakukan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin kepada

wartawan usai kegiatan buka bersama dengan sejumlah asosiasi pengusaha. Acara tersebut berlangsung di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (22/5).

Perwakilan asosiasi yang hadir pada acara buka bersama itu, antara lain Asosiasi Mainan Indonesia (AMI), Asosiasi Importir dan Distributor Mainan Indonesia (AIMI), Perkumpulan Pengusaha Pakaian dan Perlengkapan Bayi, Indonesian Iron and Steel Association (IISA), serta Asosiasi Industri Mesin dan Perkakas Indonesia.

Perlu diketahui, sebelumnya Perum Bulog melakukan kontrak pembelian beras sebanyak 300.000 ribu ton dari Vietnam dan 200.000 dari Thailand. Impor beras itu merupakan yang ketiga sejak 2018.

Sebelumnya, dalam kegiatan bukber dengan para pengusaha, Muhaimin juga menerima berbagai keluhan menyangkut persoalan yang dihadapi dalam mengelola usaha mereka. Antara lain keterlibatan oknum polisi dalam penanganan SNI. Akibatnya, SNI tidak bersifat pembinaan, tetapi penindakan.

Selain itu, para pengusaha juga mengeluhkan membanjirnya produk impor, dan banyaknya tenaga kerja asing. Banyaknya produk dan tenaga kerja asing itu membuat produk dalam negeri makin terjepit.

Menanggapi keluhan para pengusaha nasional, Cak Imin menegaskan bahwa Pemerintah harus serius memproteksi perusahaan dalam negeri. Dan, memerhatikan produk lokal, terutama yang langsung berhubungan dengan pabrik, tenaga kerja, dan home industri.

“SNI boleh asal mamakai pijakan bahwa tujuannya adalah pembinaan. Karena itu urusan SNI jangan sampai diurus polisi, biarlah diurus PPNS saja”, kata Cak Imin.

Dalam proses pembuatan atau pelaksanaan pembangunan, kata Muhaimin, ketentuan kandungan lokal harus ditegakkan. Karena saat ini banyak ditemukan pelanggaran oleh perusahaan asing, yang tidak mematuhi ketentuan



penggunaan produk dalam negeri. Kalau pelanggaran ini dibiarkan akan menyebabkan kerugian makin besar bagi industri lokal.

“Ada kebijakan aneh yang sangat

merugikan perusahaan lokal. Jika mereka menggunakan tenaga asing maka dikenakan pajak sebesar 30%. Sedangkan perusahaan asing yang memakai tenaga kerja luar hanya

100 dolar. Ini jelas tidak menunjukkan adanya keberpihakan dengan perusahaan dalam negeri”, kata Muhaimin lagi. □

MBO

**Kampus BSI Kalimalang, Jakarta Timur**

## Kemajuan Teknologi Harus Memperhatikan Kearifan Lokal

Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar memberi orasi ilmiah pada peringatan 30 Tahun Bina Sarana Informatika (BSI). Temanya, ‘Kesiapan Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Menghadapi Era Digital dan Revolusi Teknologi 4.0.’

**P**ERUBAHAN yang terjadi selama 30 tahun ini begitu cepat dan mendasar,” ujar Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar saat menjadi pembicara di Kampus Bina Sarana Informatika (BSI), Kalimalang, Jakarta Timur, 23 Mei 2018. Dalam seminar dengan tema ‘Kesiapan Perguruan Tinggi & Mahasiswa Menghadapi Era Digital & Revolusi Teknologi 4.0’, pria yang akrab dipanggil Cak Imin itu mengungkapkan, duapuluh tahun lalu, kalau lima orang berkumpul harus izin dari aparat keamanan. Sekarang, menurut Cak Imin, izin itu sudah tidak diperlukan lagi. “Kalian mau berkumpul, sudah tak perlu izin,” paparnya.

Setelah 20 tahun dilewati, bangsa ini sekarang menikmati kebebasan demokrasi. Bagi Cak Imin, demokrasi dan kebebasan itu seperti oksigen, diperlukan setiap orang. Bila tanpa oksigen tentu manusia tak bisa hidup. Pun demikian ketika otoritarian membelenggu kehidupan manusia maka orang tak bebas berekspresi. Dalam masa otoritarian, menurut Cak Imin, membuat kebodohan. “Kalau pada masa sekarang generasi muda tak pintar, itu kebangetan,” paparnya.

Hal demikian dikemukakan sebab dalam kebebasan dan demokrasi melahirkan kreasi dan inovasi. Dalam masa ini banyak lahir dan tercipta teknologi baru, terutama dalam komunikasi. Pria asal Jombang, Jawa Timur, ini menyebutkan, terciptanya teknologi baru membawa perubahan yang radikal dan mendasar. “Dunia internet telah melahirkan revolusi,” ungkapnya. Dari perubahan ini membawa dampak pada masalah tenaga kerja, bisnis, dan hubungan antarmanusia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Kita harus cepat menyesuaikan perubahan,” paparnya.

Dampak teknologi yang membawa perubahan, menurut Cak Imin, harus dibaca secara cermat. “Perubahan teknologi harus tetap perlu memerhatikan kearifan lokal,” ujarnya. Dicontohkan, media sosial yang berkembang di masyarakat sering membuat hubungan antarmanusia menjadi renggang. “Anak sekarang lebih suka memegang handphone,” ujarnya. Akibat yang demikian membuat anak mengabaikan orangtuanya. Tak hanya itu, aneka media sosial membuat terjadinya tsunami berita. Masalahnya, ketika ‘hoax’ banyak bermunculan. Untuk itu, dia mengharapkan agar masyarakat waspada terhadap berita yang tidak benar. “Bila kita tak waspada, kita akan termakan sampah informasi,” paparnya.

Cak Imin menyatakan, kehadiran teknologi di satu sisi bisa memperkuat persatuan bangsa namun di sisi yang lain dapat membelah persatuan masyarakat. Atas itulah, ia mengusulkan adanya tata hubungan dan budaya baru dalam menghadapi majunya teknologi. Dalam membangun rasa kebangsaan, tegas Cak Imin, semangat tak boleh luntur. “Ego yang ada diperkecil demi kepentingan yang lebih besar,” ujarnya.

Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta, Bina Sarana Informatika memiliki puluhan kampus. Kampusnya tersebar di segala penjuru Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Tasikmalaya, Jogjakarta, Purworejo, Solo, Magelang, Tegal, Purwokerto, Semarang, Pontianak, Sukabumi, dan kota lainnya. □

AWG

Ngobrol Bareng Netizens Bali

# Ma'ruf Cahyono Ajak Netizens Rawat Jatidiri Bangsa

**S**ENJEN MPR RI Ma'ruf Cahyono hadir dan memberikan pengarahan pada acara bincang-bincang dengan komunitas Netizens Bali, Kamis (10/5/2018). Acara yang berlangsung di Bali Room Hotel Bintang Plasa Kuta Bali itu diikuti 56 warga net dari berbagai wilayah Bali. Dari pihak Setjen MPR, selain Ma'ruf Cahyono, juga hadir Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, Kepala Bagian Pengolah Data dan Sistem Informasi (PDSI) Andrianto.

"Sebetul sampai pendaftaran ditutup, sehari sebelum pelaksanaan, masih banyak pengelola blog yang mau ikut, tapi mengingat tempat terbatas maka kami batasi 56 netizens saja," ungkap Casmudi, pengelola blogger Kudeta (Kompasiana Pulau Dewata, selaku panitia pelaksana. Para warga net ini, kata Casmudi, datang dari berbagai profesi, antara lain: PNS, calon pengacara, mahasiswa, ibu rumah tangga, finalis Miss Internet 2017, dan lainnya.

Pertemuan dengan warga net di Bali ini bukanlah yang pertama kali diselenggarakan. Kegiatan melibatkan para pengelola blog ini sudah dimulai sejak 2015. Diawali acara 'Netizens Jakarta Ngobrol Bareng Bersama MPR'. Kemudian, acara berlanjut terus hingga sekarang, dan sudah melibatkan warga net dari berbagai kota di Indonesia. Antara lain Solo, Surabaya, Bandung, Medan, dan Manado.

Tujuan kegiatan ini, seperti dikemukakan oleh Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, adalah untuk mengajak para blogger ikut menjelaskan program-program MPR, terkait Empat Pilar, kepada masyarakat. "Kalau sehari saja satu blogger menulis satu alenia di blok masing-masing, itu sangat besar pengaruhnya pada masyarakat," kata Siti Fauziah.

Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono juga menganggap para blogger punya peran yang luar biasa. Blogger termasuk unsur pendukung yang mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam membangun pendapat masyarakat.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf mengajak para blogger dari berbagai segmentasi ini untuk berkolaborasi dalam menyampaikan pesan-pesan Empat Pilar kepada masyarakat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Terutama dalam merawat jatidiri bangsa. Karena MPR adalah organ ketatanegaraan mempunyai tugas penting sebagaimana diamanatkan oleh kita semua terkait dengan jatidiri bangsa," katanya.

Lebih lanjut Ma'ruf Cahyono menegaskan, jatidiri bangsa adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari situ dapat kita ketahui apa yang dimaksud nilai-nilai ketuhanan sebagai bangsa yang religius. Lalu apa pula yang dimaksud bangsa yang humanis atau memanusiakan manusia, bersatu atau nasionalis, musyawarah mufakat, dan adil.

Usai pengarahan Sesjen MPR dilanjutkan

diskusi. Dipandu oleh Mira Said, seorang netizens dari Jakarta yang menjadi mitra MPR dalam kegiatan tersebut. Diskusi berlangsung menarik. Banyak pertanyaan, saran, masukan, dan usulan disampaikan warga net Bali. Intinya, mereka menyambut positif acara yang baru pertama kali diselenggarakan di Bali tersebut.

"Kegiatan ini sangat positif, merangkul teman-teman media untuk menyebarkan konten positif di internet," kata Martina Carissa, seorang peserta pengelola blogger #themartinacarissa, yang juga dikenal sebagai finalis Miss Internet 2017 ini. □

SCH



**KH. Agus Salim**

## “Memimpin itu Menderita, Bukan Menumpuk Harta”

**D**I AWAL berdirinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki sosok pejuang kemerdekaan yang intelek dan mahir berdiplomasi. Dia adalah KH. Agus Salim. Sebagai diplomat, Agus Salim memang tidak memakai bambu runcing atau senjata lainnya untuk membela NKRI. Tetapi ia berjuang demi kepentingan bangsa dan negara melalui kepandaian berdiplomasi dan kemahirannya di bidang jurnalistik.

Kemahiran KH. Agus Salim dalam berdiplomasi mendapat pengakuan dari berbagai kalangan. Belakangan, Ketua MPR bahkan kerap membanggakan Agus Salim. Menurut Zulkifli, sosok Agus Salim adalah peletak dasar-dasar diplomasi Indonesia. Dia sosok diplomat ulung yang disegani semua kawan dan lawan bicaranya.

Kemampuan Agus Salim berdiplomasi banyak dibantu oleh kemampuannya menguasai sembilan bahasa asing. Selain bahasa Melayu dan Minang yang menjadi bahasa ibu, Agus Salim juga menguasai bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Mandarin, Latin, dan Turki. Ia juga menguasai beberapa bahasa daerah, seperti Jawa dan Sunda.

Kemampuan itu menjadi salah satu alasan bagi pemerintah Indonesia untuk mengugaskannya mewakili Indonesia dalam berbagai perundingan. Pada 1947 misalnya, Agus Salim bersama Sutan Syahrir menjadi wakil Indonesia dalam Konferensi Inter-Asia di New Delhi. Selanjutnya ia memimpin delegasi Indonesia ke Timur Tengah untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Hasilnya, Indonesia memperoleh dukungan kemerdekaan dari Mesir (10 Juni 1947), Lebanon (29 Juni 1947), dan Suriah (2 Juli 1947).

Dalam kehidupan sehari-hari, Haji Agus Salim merupakan satu dari sedikit pemimpin bangsa yang mau hidup susah. Kesederhanaannya itu dilandasi prinsip kehidupannya yang sangat terkenal. Yaitu *Leiden is Lijden*, yang artinya memimpin adalah jalan menderita.

Jangankan mobil mewah, rumah pun Agus Salim tak punya. Ia menjalani hidup dengan berpindah-pindah, dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya, keluar dari satu gang

untuk masuk gang yang lain pula.

Padahal, jika mau, tidaklah sulit bagi Agus Salim untuk hidup bergelimang harta. Kalau saja ia ingin kaya misalnya, Agus Salim bisa terus bekerja sebagai konsulat Belanda di Arab Saudi. Karena saat itu ia sudah mendapat gaji yang lebih dari cukup, sekitar 200 Gulden per bulan. Sedangkan saat itu untuk bisa hidup berkecukupan, hanya butuh gaji sekitar 15 Gulden saja.

Tetapi peluang itu ia tinggalkan dan memilih



kembali ke Indonesia pada 1915. Sejak itu ia bergulat dengan segala kesederhanaan, di tengah perjuangannya menggeluti dunia politik dan jurnalistik sekaligus.

Sebuah kisah menyebutkan, Agus Salim pernah tinggal di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Rumahnya itu berada di dalam gang yang berliku dan melewati di kawasan becek. Ia juga pernah tinggal di bilangan Jatinegara, dan hanya menempati satu ruangan. Selain dengan keluarganya, ruangan tersebut digunakan untuk menumpuk koper dan beberapa kasur digulung.

Bahkan disalah satu kontrakannya itu pernah terjadi peristiwa yang sangat memilukan. Kebetulan toilet di rumah yang dia tempati itu rusak. Setiap kali disiram, air dari dalam WC itu meluap. Peristiwa itu selalu berulang, sang istri pun selalu menderita karena luberan kotoran WC menimbulkan bau. Saking baunya, sang istri sampai muntah

menahan jijik.

Kisah yang tak kalah mengharukan terjadi ketika salah satu anaknya meninggal dunia. Lantaran tidak punya uang untuk membeli kain kafan, Agus Salim membungkus jenazah anaknya dengan taplak meja dan kelambu. Ia menolak pemberian kain kafan baru dengan dalih orang yang masih hidup lebih berhak memakai kain baru.

Begitulah sosok seorang pejuang, negarawan, dan politisi KH Agus Salim, hidupnya jauh dari kemewahan. Dia tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Meski begitu, Agus Salim tidak pernah mau dibidang miskin. Karena, menurutnya, kekayaan itu tergantung hati seseorang, bukan harta bendanya.

Semangat itulah yang terus dia ajarkan kepada semua orang, tak hanya anak dan istrinya saja. Sehingga saat berceramah di hadapan Bung Karno, Bung Syahrir, dan Soeharto, dia mengatakan: “Memimpin adalah menderita, bukan menumpuk harta.” Ucapan itu sangat dikenang oleh berbagai kalangan.

Agus Salim lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, 8 Oktober 1884, dengan nama Mashudul Haq (berarti “pembela kebenaran”). Bapakny Soetan Salim gelar Soetan Mohamad Salim adalah Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Sedangkan ibunya adalah Siti Zainab.

Sebagai anak petinggi, Agus Salim berkesempatan memperoleh pendidikan yang bagus. Pendidikan dasar ditempuhnya di Europeesche Lagere School (ELS), sekolah khusus anak-anak Eropa. Setelah itu, ia melanjutkan ke Hoogere Burgerschool (HBS) di Batavia. Dia tercatat sebagai lulusan (HBS) terbaik se-Hindia Belanda.

Tamat HBS, Agus Salim bekerja sebagai penerjemah, sebelum akhirnya berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, pada 1906. Di sana dia bekerja di Konsulat Belanda. Pada saat yang sama Agus Salim juga berguru pada Syeh Ahmad Khatib yang masih ada hubungan keluarga, pamannya. □

**MBO**

# Kisah Pecinta Durian

**B**UKU ini tidak terlalu tebal. Persisnya 200 halaman. Dengan Intro XV halaman. Bercerita tentang kisah perjalanan penulisnya, seorang ahli geografi dari Korea Selatan, mengunjungi beberapa kota di Asia Tenggara. Perjalanan yang diringkaskan sebagai menuju tempat kebahagiaan.

Perjalanan ini bermula dari bidang studi internasional yang diambilnya di Seoul National University, yang membawanya pada kajian tentang Asia Tenggara. Walau telah mengunjungi lebih dari 100 negara, cerita perjalanannya di buku ini, hanya di lingkungan negara-negara Asia Tenggara yang menjadi bidang kajiannya. Bermula dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan terakhir tentang Indonesia.

Cerita tentang perjalanannya di Singapura lebih banyak mengenai kehidupan sosialnya. Bahkan dimulai dengan cerita tentang Ibu-ibu yang bekerja. Tentu saja dibandingkan dengan keadaan di negerinya, Korea Selatan. Eje Kim adalah seorang ibu yang bekerja. Juga upaya untuk menjadi negara nomor satu di dunia. Kalaupun diceritakan tentang durian, hanya merupakan bagian kecil. Apalagi Singapura bukanlah penghasil durian.

Sama halnya dengan Malaysia. Malah dimulai dengan pertemuannya dengan Roti Boy, yang dengan membaca buku ini baru saya tahu berasal dari Malaysia. Tapi dia juga bercerita tentang Menara Petronas, kebiasaan orang-orang Malaysia ke kedai kopi, budaya peranakan beserta masakannya, atau mie rebus terenak dan laksa. Lebih-lebih ketika mengunjungi Penang. Sebagaimana kisah perjalanan, Eje Kim juga selalu menceritakan berbagai jenis dan ragam makanan. Anehnya, durian Musang King yang terkenal dari Malaysia tidak diceritakannya. Mungkin karena fokus sesungguhnya bukan hanya durian.

Dapat dikatakan, yang paling banyak diceritakan adalah makanan. Demikian halnya tentang Thailand. Bahkan cerita tentang keluarga Raja Bhumibol beserta keluarganya cukup panjang lebar. Juga budaya sanuk di masyarakat Thailand. Semacam budaya keceriaan, “bagi orang Thailand sebanyak apapun uang diperoleh tanpa sanuk hidup tidaklah bahagia” (halaman 79). Ketika mengunjungi Chantaburi barulah cerita tentang durian mencuat. Bahkan dikenal adanya sindroma Yoyo, yang beratnya bertambah dikala musim durian tiba, dan kembali berkurang dikala musim durian berlalu. Sebagaimana kita ketahui, Thailand merupakan penghasil utama durian, dan bahkan mengekspornya ke seluruh dunia. Tapi cerita itu tidak diungkap di

buku ini.

Ketika di Manila, Filipina, kisahnya dimulai dengan kehidupan masyarakatnya. Bak kisah perjalanan, dimulai dengan cerita Jeepney, yang merupakan alat transportasi terkenal di kota itu. Cerita tentang Jose Rizal, pahlawan rakyat Filipina juga cukup lengkap. Termasuk tokoh-tokoh wanita Filipina. Meski begitu, cerita tentang Balut, telur bebek yang beserta embrionya dan merupakan makanan terkenal di Filipina, juga menjadi bagian dari cerita. Walau begitu, cerita tentang durian juga tidak dilewatkan. Terutama ketika mengunjungi kota Davao, di Filipina Selatan, yang ditulisnya sebagai Kota Durian. Di

kota ini dapat ditemukan patung durian, air mancur durian, bahkan selalu diselenggarakan festival durian disertai pemilihan Miss Durian, Putra Durian, atau Dewi Durian. Bahkan Koran yang terbit di kota ini diberi nama Durian Post. “Durian menjadi media pemersatu penduduk Davao yang melintasi agama, etnis, dan selera” (halaman 129).

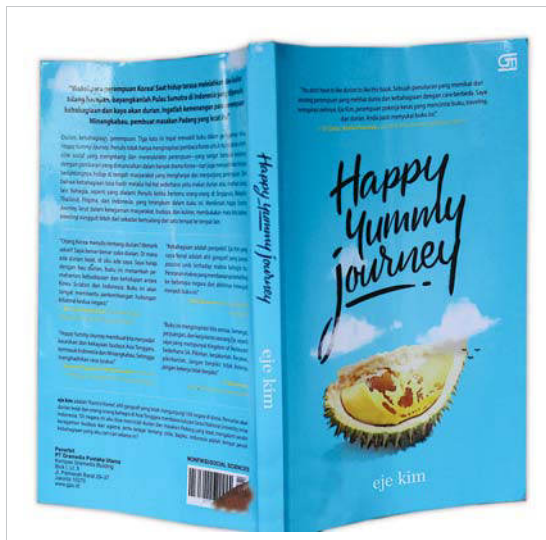
Di Indonesia, Eje Kim hanya mengunjungi Bali, Jakarta, Bandung, Padang, dan Bukittinggi. Ceritanya dimulai tentang Kopi nan semerbak. Tentu tak melupakan Kopi Luwak yang populer di seluruh dunia. Yang menarik diulas kunjungan ke Sumatera Barat (Padang dan Bukittinggi). Uraianya menyangkut Rumah Makan Padang yang menggurita ke seantero nusantara. Termasuk Rendang,

sebagai masakan terenak di dunia, sebagaimana yang dilansir CNN di tahun 2011. Tentu saja Eje Kim yang banyak memerhatikan peranan kaum perempuan, memberi catatan tersendiri atas budaya matrilineal yang berlaku di Sumatera Barat. Bahkan menjadi sub judul tersendiri (halaman 169).

Tentang durian diberinya beberapa catatan. Pulau yang paling terkenal sebagai penghasil durian di Indonesia adalah Sumatra, pulau terbesar nomor satu di Indonesia dan nomor enam di dunia (ketika membacanya saya bertanya dalam hati: Bagaimana dengan Kalimantan?). Di halaman yang sama (186), dia menulis “Orang-orang Bandung yang bahagia juga tidak lepas dari durian. Mereka sangat menyukai buah ini, bahkan konon es krim durian yang lezat itu untuk pertama kalinya dibuat dan dijual oleh orang Bandung”.

Inti cerita Eje Kim buah durian ternyata memberi rasa bahagia. Membacanya cukup menarik. Apalagi dilengkapi dengan foto-foto berwarna. □

Dedes Erlina, (Psikolog)



**Happy Yummy Journey**  
Eje Kim, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017





## Jalan Buntu Untuk Melanjutkan Kekuasaan

Lengsernya Presiden Soeharto dari kekuasaannya terjadi tidak secara serta merta. Berbagai peristiwa yang mengiringi mulai 1997 hingga 21 Mei 1998. Krisis keuangan di Asia dan kekuasaan yang penuh dengan kolusi dan nepotisme menjadi bara isu yang dilontarkan oleh mahasiswa. Martir dari mahasiswa membuat kekuasaan Soeharto tinggal menunggu hari. Upaya menyelamatkan kekuasaan selalu mengalami jalan buntu. Pada H-2, Soeharto bertemu dengan ulama. Dalam pertemuan itu, tanda-tanda dia akan mundur sudah terpancar di wajahnya.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**ELAMA beberapa hari di awal Mei 2018, di plasa depan Gedung Nusantara V dan Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, terpajang puluhan foto. Separuh di antara foto-foto yang dipamerkan itu menggambarkan peristiwa yang terjadi pada peristiwa Mei 1998, seperti demonstrasi mahasiswa di kompleks Parlemen, pasukan keamanan yang berkeliling kota naik panser, mobil yang terguling korban kerusuhan, dan keriuhanan masyarakat pada saat-saat genting terjadi.

Kenangan abadi dan saksi bisu sejarah perjalanan bangsa itu dipamerkan di Rumah Kebangsaan itu memang untuk memperingati 20 Tahun Reformasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai penyelenggara

pameran, memandang perlu untuk mengenang peristiwa itu agar bangsa ini sudi belajar dari pada masa lalunya. Karena DPR menganggap acara itu sangat penting maka tak heran bila Ketua DPR Bambang Soesatyo membuka langsung acara yang terselenggara berkat kerja sama dengan salah satu media grup itu.

Peristiwa Mei 1998 tercatat sebagai salah satu babak besar perjalanan bangsa, ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Peristiwa lengsernya Soeharto terjadi tidak serta merta. Terjadi secara bertahap, hari demi hari terjadi berbagai peristiwa atau gerakan, mulai dari gerakan kecil kemudian terus membesar hingga menjadi bola salju yang tak terbendung lagi. Puncaknya terjadi

pada 21 Mei 1998.

Setahun sebelumnya, 1997, terjadi krisis keuangan, krisis moneter, di Asia. Krisis itu bermula dari Thailand, kemudian menular ke banyak Negara, seperti Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Laos, Singapura, Cina, Taiwan, Vietnam, dan Brunei. Krisis itu membuat mata uang negara-negara tersebut turun, atau rendah dibanding dolar Amerika. Akibatnya, harga barang-barang naik beberapa kali lipat.

Turunnya nilai mata uang rupiah membuat kebutuhan masyarakat menjadi tidak terbeli. Contohnya harga kertas naik sangat tinggi sehingga kebutuhan mahasiswa akan barang ini menjadi bergejolak. Tak hanya itu yang menimbulkan keresahan, banyak buruh pabrik di-PHK karena pabrik tak mampu lagi membeli





bahan baku. Juga banyak proyek menjadi mandeg karena harga material melonjak.

Krisis ini juga berdampak pada pengguna jasa bus. Kalau itu, ada 300.000 penumpang bus terlantar di Terminal Pulogadung, Kampung Rambutan, dan Lebak Bulus, Jakarta. Penyebabnya, bus antarkota antarprovinsi (AKAP) enggan melayani penumpang jika harga tiketnya tetap berpatokan pada tarif lama. Pihak bus yang melayani jurusan Pantura, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, saat itu, minta kenaikan harga tiket. Alasannya, karena kebutuhan operasional tiba-tiba naik.

Bila krisis keuangan di negara-negara lain cepat tertangani, namun tidak demikian yang terjadi di Indonesia. Semenjak itu krisis yang menyeruak dan menggelayuti pundak masyarakat. Akibatnya, keresahan di dunia ekonomi menjadi pemicu berkobarnya protes masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa.

Dalam situasi demikian, ditambah dengan tahapan kekuasaan Presiden Soeharto yang semakin langgeng lewat Pemilu 1997 membuat isu politik kian bertambah hangat. Tidak hanya soal ekonomi, namun juga soal kolusi dan nepotisme. Kekuasaan yang ada tidak berbeda dengan kekuasaan yang sudah-sudah, yakni hanya mengakomodir segelintir orang dekat dengan Soeharto.

Tidak responnya kekuasaan terhadap gejala ekonomi dan politik memperbesar aksi demonstrasi di kalangan mahasiswa. Setiap hari mahasiswa di kampus-kampus di seluruh kota di Indonesia melakukan demonstrasi menuntut perbaikan ekonomi.

Sebagai barometer gerakan mahasiswa, demonstrasi mahasiswa di Jogjakarta pada 8 Mei 1998 yang selanjutnya terkenal dengan *Peristiwa Gejayan*. Aksi mahasiswa di Kota Gudeg itu menjadi 'penyemangat' bagi mahasiswa di kota lain. Dalam peristiwa itu diceritakan, beberapa kampus di Jogja melakukan berbagai ragam aksi. Selepas sholat Jumat, sekitar 5000 mahasiswa Universitas Gajah Mada melakukan aksi di Bundaran Kampus UGM. Di saat yang sama, di beberapa kampus juga terjadi aksi mahasiswa.

Sore harinya, mahasiswa di kampus lain bermaksud bergabung dengan rekan-rekan mereka yang ada di Bundaran UGM. Untuk mencegah berkumpulnya ribuan massa dalam satu lokasi maka keinginan mahasiswa dari perguruan tinggi untuk bergabung dengan mahasiswa UGM di Bundaran UGM dicegah oleh aparat keamanan. Karena tak menemukan titik kesepakatan antara mahasiswa dan aparat keamanan soal aksi ini maka terjadilah bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan. Suasana sangat tegang. Aparat keamanan mengejar para demonstran hingga ke dalam kampus di Universitas Sanata Dharma dan IKIP Negeri Jogjakarta (Universitas Negeri Jogjakarta).

Demonstrasi yang melibatkan ribuan massa dan berlokasi di tempat strategis itu bertahan hingga tengah malam. Puluhan panser dan ratusan aparat keamanan tetap berjaga-jaga di area itu. Diceritakan, pada 00.15 WIB aparat keamanan mulai

bertindak untuk membubarkan massa. Dengan menggunakan panser aparat keamanan melakukan penyerbuan sambil menembakan gas air mata. Suasana sangat mencekam. Di pihak mahasiswa banyak jatuh korban, dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Dan, dalam aksi itu diketahui seorang demonstran bernama Moses Gatutukaca dinyatakan gugur. Dia gugur menjadi martir perjuangan.

Peristiwa Gejayan yang diberitakan banyak media tersebut menjadi penyemangat bagi mahasiswa untuk membangun solidaritas di antara mereka. Di sisi yang lain, peristiwa itu menunjukkan sikap kekuasaan dan aparat yang semakin tak kenal kompromi menghadapi gerakan mahasiswa. Seolah-olah tak ada lagi ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah.

Peristiwa Gejayan agaknya tidak dijadikan pelajaran bagi aparat keamanan dalam menangani demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Buktinya, selang empat hari





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kemudian, 12 Mei 1998, terjadi penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang melakukan unjuk rasa. Empat mahasiswa, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie, gugur menjadi martir gerakan mahasiswa.

Peristiwa yang selanjutnya dikenang sebagai Tragedi Trisakti tersebut boleh dikata mirip dengan apa yang terjadi di Jogjakarta, yakni keinginan dari para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, dalam perjalanannya aksi tersebut pecah menjadi huru hara, terjadi bentrok antara aparat keamanan dan mahasiswa.

Tragedi Trisakti membuat keadaan Jakarta menjadi mencekam. Sehari berikutnya, situasi Jakarta khususnya menjadi lebih tidak terkendali. Di beberapa tempat di Ibu Kota, pada 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan massa. Di pusat-pusat pertokoan terjadi aksi penjarahan. Tak hanya itu, terjadi pula pembakaran barang-barang yang ada di

sekitarnya. Tak hanya terjadi di Jakarta, kejadian serupa juga terjadi di Medan, Sumatera Utara; dan Solo, Jawa Tengah.

Kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat itu rupanya memicu kekhawatiran dari banyak kepala daerah. Hingga sampai-sampai Gubernur Jawa Timur, Basofi Sudirman, saat itu, melakukan siaran langsung dari radio agar masyarakat tidak mudah terpancing dan terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggungjawab. Himpunan tersebut dipancarkan melalui radio-radio dan dilakukan secara berulang-ulang.

Dalam situasi yang demikian gawat membuat Presiden Soeharto berada dalam kondisi yang serba sulit. Hingga akhirnya pada 19 Mei 1998 dia bertemu dengan para ulama dan tokoh masyarakat, seperti Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid, Emha Ainun Nadjib, Nucholish Madjid, Ketua MUI Ali Yafie, Prof. Malik Fadjar dari Muhammadiyah, Yusril Ihza Mahendra, KH

Cholil Baidowi dari Muslimin Indonesia, Sumarsono dari Muhammadiyah, serta Achmad Bagdja dan Ma'aruf Amin dari NU. Dalam pertemuan tersebut terlihat tanda-tanda Soeharto akan mundur. Di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat, Soeharto mengatakan akan melakukan reshuffle kabinet Pembangunan VII dan menyebut kabinet hasil reshuffle itu sebagai Kabinet Reformasi.

Namun, segala daya upaya dari Soeharto untuk melakukan berbagai tindakan untuk menyelamatkan kekuasaannya mengalami kebuntuan. Sementara kondisi di Jakarta semakin tidak menentu. Akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto membuat keputusan yang penting, menyatakan mengundurkan diri. Dengan raut muka yang penuh kekecewaan dan tampak lelah, pria asal Kemusuk, Bantul, Jogjakarta, itu dalam pidato pengunduran diri menyatakan: "Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII, namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara-cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkan Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memerhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik."

Lebih lanjut dalam pidato yang disiarkan langsung oleh televisi itu, mantan Pangdam Diponegoro itu lebih lanjut menuturkan: "Oleh karena itu dengan memerhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memerhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI". □

AW/dari berbagai sumber



# Martir yang Selalu Ditunggu Kepulangannya

Dalam perjuangan reformasi, puluhan generasi muda menjadi martir perjuangan. Masalah hukum para martir itu sampai saat ini belum tuntas. Para keluarga terus menuntut agar masalah ini diselesaikan. Bahkan ada di antara orangtua para korban masih tetap menunggu anaknya pulang.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PADA 12 Mei 2018, Karsiah Sie, di Taman Pemakaman Umum Al Kamal, Kebon Jeruk, Jakarta, terlihat sedang menaburkan bunga di atas pusara anaknya, Hendriawan Sie. Hendriawan adalah salah satu dari mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, yang menjadi martir dalam gerakan reformasi. Ia bersama dengan Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, dan Hafidhin Royan terkena peluru tajam saat melakukan demonstrasi bersama mahasiswa Trisakti lainnya pada 12 Mei 1998.

Sebagai babak penting dalam sejarah bangsa pada umumnya dan Universitas Trisakti pada khususnya, peristiwa yang dikenal dengan Tragedi Trisakti itu selalu diperingati oleh kampus yang berada di bilangan Grogol, Jakarta, itu.

Dalam peringatan Tragedi Trisakti tahun ini, seperti biasa pihak kampus menggelar acara dimulai dari upacara tabur bunga di empat lokasi penembakan, di Monumen Tragedi 12 Mei, dan makam para martir reformasi. Dalam peringatan itu, Rektor

Universitas Trisakti, Ali Ghufron, kepada media massa mengatakan, pihak kampus terus mengawal penuntasan kasus tersebut. Ali mengakui dan merasa belum ada penuntasan dari penembakan yang menimpa keempat mahasiswa Trisakti itu. Dia mengatakan, keempat mahasiswa itu terkena tembakan, bukan dari peluru nyasar. "Dari luka tembak ditemukan peluru di bagian organ vital, di kepala dan dada," ujarnya seperti yang ter kutip di *Jawa Pos*, 13 Mei 2018.

Sebagai martir reformasi membuat perguruan tinggi yang berdiri pada 1965 itu berharap, Hendriawan Sie, Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, dan Hafidhin Royan mendapat gelar Pahlawan Reformasi. Alasan Trisakti menuntut agar keempat mahasiswanya mendapat gelar tersebut, sebab mereka aktivis untuk mewujudkan reformasi. Ali berharap, tragedi itu dijadikan pelajaran bahwa negara harus terbuka dalam mengungkap fakta. Sebagaimana menurut laporan Komnas HAM, lembaga yang menyelidiki kejadian itu, penembakan terhadap empat mahasiswa di lingkungan kampus merupakan pelanggaran HAM. Sudah dilakukan penelitian dan berkas perkara serta pelakunya sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun, Ali dan seluruh civitas akademika Universitas Trisakti menyesalkan kasus ini belum disidangkan. "Kasus seperti ini tak boleh terulang," ujarnya.

Dalam era media sosial, pada hari itu juga, 12 Mei 2018, di *twitter* dengan kata kunci *Tri Sakti* dan *Mei 1998* menjadi topik terhangat. Berdasarkan laporan *Trend24.in*, *Tri Sakti* dan *Mei 1998*, mendapat respon atau *re-tweet* dari pengguna media sosial.

Sehari kemudian, tepatnya 13 Mei 2018, keluarga korban yang lain memperingati hal yang sama di depan *Mall Klender*, Jakarta





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Timur. Mall yang terletak di pinggir jalan besar tersebut, dalam peristiwa Mei 1998, merupakan salah satu tempat yang memakan banyak korban jiwa.

Peringatan Tragedi Trisakti dan peristiwa reformasi lainnya perlu dikenang, sebab menurut sejarawan Asvi Warman Adam, salah satu tujuan reformasi adalah menolak kediktatoran. Dari tujuan tersebut, Asvi mengatakan, setiap upaya yang mengarah pada kediktatoran harus dihindari. "Tujuan reformasi perlu dirawat. Jika tidak kejadian seperti dulu bisa terulang," ujarnya pada media massa.

Mantan aktivis 1998, Syafiq Alielha, mengakui, tak banyak generasi muda apalagi yang lahir dan tumbuh selepas 1998 paham dan mengingat esensi perjuangan yang dilakukan para mahasiswa pada era yang disebut era reformasi. Dia menyesalkan

publikasi perjuangan reformasi 1998 tak banyak. "Di sekolah-sekolah pun peristiwa itu tidak diajarkan," ujarnya.

Dari memudar, tak terjaganya ingatan, dan tak banyaknya publikasi tentang peristiwa reformasi membuat tujuan reformasi belum tuntas dan maksimal. "Nilai reformasi belum bisa diterapkan secara total," ujar Ali. Apa yang dikatakan Ali dipertegas oleh Sumarsih. Menurut perempuan 66 tahun yang juga merupakan ibunda Norma Irawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang menjadi korban dalam Peristiwa Semanggi I, reformasi sudah dibajak dan dirusak. Menurut Sumarsih, tuntutan reformasi belum semua direalisasikan bahkan dia mengatakan reformasi di antaranya gagal.

Sumarsih menyesalkan di antara pejuang reformasi yang kini duduk di lembaga negara malah terkesan mengabaikan nilai dan tujuan

reformasi. Dia mengetahui apa yang diperjuangkan anaknya sehingga saat puteranya itu meninggal, dan ia merasa bertanggungjawab untuk melanjutkan perjuangan reformasi.

Dalam perjuangan reformasi, banyak generasi muda menjadi martir, dan kasusnya juga belum terungkap. Hal demikian juga dialami oleh Dionysius Oetomo Rahardjo. Rahardjo adalah ayah dari Petrus Bimo Anugrah. Bimo adalah mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, angkatan 1990-an. Dia merupakan aktivis mahasiswa 1998. Sejak Maret 1998 hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. "Dua puluh tahun sudah kami kehilangan anak laki-laki tercinta," ujar Rahardjo sebagaimana terkuip di *Koran Tempo* akhir pekan, 12-13 Mei 2018.

Selama 20 tahun dan tidak tahu di mana anaknya berada membuat Rahardjo merasa menunggu dalam ketidakpastian. "Selama puluhan tahun menjadi siksaan batin," ujarnya. Sebagai ayah yang mencintai anaknya, Rahardjo menyimpan hal-hal yang terkait atas hilang anaknya. Dokumentasi yang ada disimpan dengan rapi. Apa yang dilakukan, menyimpan dokumentasi Bimo Petrus, agar ia selalu ingat anaknya yang kedua itu. Meski sampai saat ini kabar anaknya itu tidak jelas, namun ia dan istrinya masih menunggu kepulangan anaknya. "Kami mencoba bersabar dan ikhlas serta menyerahkan semuanya kepada Tuhan," ujarnya. "Kami masih yakin Bimo masih ada," tambahnya.

Di koran itu diceritakan, Rahardjo dalam perjalanan pencarian dan penantian kabar anaknya mengaku sempat putus asa, sebab ditipu oleh harapan yang diberikan orang-orang yang tak bertanggungjawab. Dikisahkan, dirinya pernah didatangi orang yang mengaku tahu keberadaan Bimo, namun meminta sejumlah uang. Meski sudah 20 tahun, dirinya tetap berharap pada pemerintah agar kasus penghilangan paksa kepada 13 aktivis 1998 itu dituntaskan. "Apapun hasilnya, saya ikhlas dan menyerahkan semua pada Tuhan," ucapnya. □

AW/dari berbagai sumber





# Kelompok Ciganjur, Bersatunya Mahasiswa dan Tokoh Nasional

Reformasi 1998 terjadi karena mahasiswa, dosen, dan tokoh nasional satu suara dalam perubahan. Mereka di kampus bahu-membahu menggalang kekuatan. Keterpaduan mahasiswa dan tokoh nasional terlihat dalam pertemuan di Ciganjur. Hasil pertemuan tersebut tak beda dengan tuntutan reformasi.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**ITUASI Jakarta menjelang Sidang Istimewa MPR pada 10 hingga 13 November 1998 terasa tegang. Meski Presiden Soeharto sudah menyatakan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, namun demonstrasi belum mengendur. Setiap hari di Jakarta terjadi aksi mahasiswa dari berbagai kelompok yang menuntut beragam hal. Tak hanya mahasiswa yang di Jakarta yang turun ke jalan, mahasiswa dari luar Jakarta pun berduyun-duyun ke Jakarta untuk melakukan hal serupa.

Menyiasati hal demikian, sebagian kelompok mahasiswa merasa bahwa gerakan reformasi tak akan berjalan maksimal bila hanya didorong oleh para mahasiswa. Untuk itu kelompok mahasiswa dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ), Keluarga Mahasiswa ITB, dan Senat Mahasiswa Universitas Siliwangi Bandung mencari siasat lain agar daya dobrak gerakan reformasi belum masif dan

cepat terealisasi. Untuk itu para mahasiswa ingin memfasilitasi dan mengajak tokoh-tokoh nasional yang dirasa bisa mendorong percepatan tuntutan reformasi untuk bersama dengan mereka dalam satu gerakan.

Setelah ditimbang-timbang akhirnya terpilihlah beberapa tokoh yang bisa mewakili segala kelompok. Mereka adalah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Amien Rais, Megawati Seokarnoputri, dan Sultan Hamengkubowono X. Mantan aktivis FKSMJ, Usmar Ismail, seperti termuat dalam sebuah media online mengatakan, saat itu kami melihat dengan kaca mata yang lebih jernih. Makanya kami meyakini bahwa sesuatu itu akan berhasil jika diserahkan kepada ahlinya. Dengan mengangkat empat orang itu, kami berharap mereka bisa membawa arah revolusi sosial yang tengah terjadi. "Itu pertimbangan FKSMJ," ujarnya.

Banyak sudah kupasan mengenai sosok Gus Dur, Amien Rais, dan Megawati. Unik

dari salah satu tokoh yang ada saat itu adalah Sultan X. Saat dirinya menjadi Gubernur Jogjakarta, dalam masa-masa perjuangan reformasi, dirinya bersama dengan Wakil Gubernur Jogjakarta, KGPA Alun VIII, memimpin aksi massa di Alun-Alun Utara Keraton Jogjakarta. Sebagai seorang gubernur bawahan Presiden (Soeharto), Sultan X secara terus terang mendukung gerakan reformasi.

Pada 21 Mei 1998, di hadapan ribuan masyarakat Kota Gudeg, ia menyerukan kembali pada semangat *kejuangan Jogyakarta yang dijiwai asas kerakyatan dan laku prasaja (berlaku sederhana)*. Dengan prinsip tersebut maka generasi muda calon pemimpin bangsa tetap setia pada semangat kerakyatan dan kesederhanaan. "Itu memang merupakan akar budaya bangsa yang sebenar-benarnya," ujarnya.

Keempat tokoh yang diusung oleh para mahasiswa pada 10 November 1998

mengadakan pertemuan di kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sebelum pertemuan dimulai, kediaman Ketua PBNU itu dijaga oleh para mahasiswa. Ratusan mahasiswa menjadi pagar ketika Amien Rais, Megawati, dan Sultan Hamengkubowono X, serta undangan penting lainnya menuju ke bagian dalam kediaman Gus Dur.

Dalam pertemuan yang dilakukan di kediaman Gus Dur di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, para aktivis dan tokoh menyatakan sikap yang termuat dalam Deklarasi Ciganjur. Isinya: *Pertama*, kami bangsa Indonesia mengakui, menyadari, dan meyakini bahwa Negara Republik Indonesia adalah amanah dari Allah

kami sadar dan siap melakukan apapun yang terbaik demi keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Termasuk antara lain menyatakan diri salah, dan meminta maaf. Bahkan lengser dari jabatan apabila hal itu dirasa baik dan bijaksana secara pribadi, demi kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Setelah keempat tokoh tersebut melakukan dialog, diskusi, dan bisa jadi perdebatan, akhirnya pertemuan tersebut menghasilkan *delapan kesepakatan*. Kedelapan kesepakatan itu adalah: *Pertama*, menghimbau kepada semua pihak agar tetap menjunjung tinggi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa secara utuh dengan semangat

dan daerah.

*Keempat*, agar dalam pelaksanaan reformasi diletakkan dalam perspektif kepentingan generasi baru Indonesia dalam menghadapi tantangan bangsa di masa yang akan datang.

*Kelima*, segera dilaksanakannya Pemilu yang jujur dan adil yang dilaksanakan oleh pelaksana independen, di mana panitia pemilu terdiri atas peserta pemilu, dan diawasi oleh tim independen. Pemilu merupakan jalan demokratis untuk mengakhiri pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Presiden BJ Habibie, sekaligus menjadi cara untuk menetapkan pemerintahan yang baru secara legitimate. Selambat-lambatnya dalam



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib kita pertahankan, kita amankan, dan kita selamatkan dari ancaman mara bahaya yang datang setiap saat.

*Kedua*, bahwa bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat telah melalui sejarah dengan kenangan tersendiri yang pahit dan getir, maupun yang manis. Sementara Indonesia akan terus bernyanyi, karena rakyatnya cinta damai, kerukunan, kekeluargaan, hormat menghormati, dalam kerangka persatuan dan kesatuan.

*Ketiga*, selaku warganegara yang cinta tanah air, kami siap melakukan bela negara. Karena kami adalah pemilik sah negeri ini, kami adalah tuan di negeri sendiri, bukannya manusia tak bermartabat.

*Keempat*, selaku tokoh masyarakat ataupun pemimpin masyarakat dan pemuda,

Bhinneka Tunggal Ika, dalam Negara Kebangsaan dan Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Para pemimpin formal maupun informal haruslah konsisten dengan semangat ini.

*Kedua*, mengembalikan kedaulatan rakyat dan memberdayakan lembaga-lembaga perwakilan sebagai penjelmaan aspirasi rakyat yang mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa. *Ketiga*, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebagai asas perjuangan di dalam proses pembangunan bangsa ke arah masyarakat yang adil dan sejahtera, melalui cara-cara yang demokratis. Dalam rangka itu, haruslah dilakukan desentralisasi pemerintahan, sesuai dengan kemampuan daerah, dan ditetapkan penimbangan keuangan yang adil, antara pemerintah pusat

tiga bulan setelah Pemilu pada Mei 1999 berlangsung, pemerintahan baru itu harus sudah terbentuk melalui SU MPR.

*Keenam*, penghapusan dwifungsi ABRI secara bertahap, paling lama 6 (enam) tahun, dari tanggal pernyataan ini dibacakan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

*Ketujuh*, dilakukan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menghapus dan mengusut pelaku KKN, diawali dengan pengusutan harta kekayaan Soeharto, dan para kroninya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

*Kedelapan*, mendesak seluruh Pengamanan (PAM) Swakarsa Sidang Istimewa MPR 1998 untuk segera membubarkan diri saat ini juga, dan kembali ke rumah masing-masing agar tidak memperkeruh keadaan. □

AW/dari berbagai sumber



## Prof. Warsono

Rektor Universitas Negeri Surabaya

### Sinergitas Antara Kampus dan Negara Perlu

INDONESIA adalah negara besar yang juga memiliki masalah yang besar pula. Masalah negara sebesar Indonesia ini perlu penanganan yang baik dan dibutuhkan sinergitas antarsemua elemen bangsa.

Sinergitas itu tergambar secara riil saat lembaga negara, MPR RI, menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, menurut saya, sangat bagus saat menyampaikan materi Empat Pilar MPR sehingga terkesan tidak kaku dan bisa diserap mahasiswa.

Metode penyampaian oleh Bapak Mahyudin diselingi dengan berbagai cerita menarik, cerita-cerita lucu, dan menggunakan bahasa kekinian sangat menarik perhatian mahasiswa. Saya rasa ini sangat baik dan luar biasa. Jadi, inti yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa dapat, yakni ingin menggugah kembali pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur bangsanya, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Saya rasa sinergitas antara kampus dan negara tersebut harus terus dijaga, di masifkan lagi ke seluruh kampus. Intinya, saya sangat mendukung upaya MPR dalam memberikan pemahaman kembali nilai luhur bangsa. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

## Lia Angelina

Mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya USU

### Perbanyak Kegiatan Kebangsaan di Kampus

KAMPUS adalah tempat generasi muda Indonesia menimba ilmu. Segala kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan, apalagi tentang bangsa dan Negara, sangat baik diselenggarakan di kampus-kampus di Indonesia. Karena, banyak mahasiswa minim info tentang kebangsaan, seperti masalah korupsi, masalah UU dan lainnya.

Nah, penyelenggaraan Festival Konstitusi dan Antikorupsi yang diselenggarakan di Universitas Sumatera Utara (USU) dan sebelumnya pernah diselenggarakan di beberapa universitas di beberapa wilayah di Indonesia seperti Universitas Indonesia dan Universitas Hasanudin Makassar sangat baik.

Apalagi, narasumber yang ditampilkan sangat luar biasa, seperti dari unsur MPR, KPK, dan MK. Mahasiswa banyak mendapatkan pengetahuan baru dari penyelenggaraan acara tersebut. Saya, contohnya, jadi banyak tahu seputar tugas dan wewenang MPR RI yang selama ini hanya mendengar dari berita-berita. Begitu ada stan MPR, langsunglah saya sempatkan bertanya seputar MPR.

Saya rasa, para mahasiswa sangat membutuhkan kegiatan semacam itu. MPR juga, saya rasa, mesti menggelar berbagai acara semacam itu di kampus-kampus.

Festival Konstitusi dan Antikorupsi yang digelar ternyata membuka mata kami tentang kondisi persoalan korupsi di negara kita. Saya yakin dengan kerjasama tiga lembaga (MPR, KPK dan MK) akan ada kemajuan lebih jauh dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi di Indonesia. □

DER



## Ganti atau Lanjut Sama-Sama Sah

Mardani Ali Sera Anggota MPR dari Fraksi PKS

### Gerakan Mencari Pemimpin Yang Baik

Menjelang Pemilu Presiden 2019, di tengah masyarakat muncul gerakan yang ingin mengganti Presiden, dan mereka populer dengan kaos #2019GantiPresiden. Sebaliknya juga ada yang tetap ingin mempertahankan Joko Widodo. Mereka mengusung hastag #2019 Tetap Jokowi. Semua gerakan ini sah menurut demokrasi.

Namun yang perlu ditegaskan dalam berkampanye harus menggunakan data, mampu mencerdaskan masyarakat, tidak menghembuskan isu yang memecah belah, serta tidak melakukan kekerasan. Tujuannya untuk menghasilkan pemimpin yang baik. Berikut argumentasi dari dua anggota MPR mengenai ganti atau tetap Joko Widodo.

**G**ERAKAN ganti Presiden pada 2019 melalui kaos dengan hastag #2019GantiPresiden merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat agar berhati-hati dalam memilih pemimpin. Apalagi posisi Presiden yang menentukan hitam putih negeri ini. Memang hasil kajian kami, Pak Joko Widodo orang baik namun nilainya cuma 6. Kami ingin yang nilainya 8. Jadi kampanye ini bertujuan mendapatkan pemimpin yang lebih baik.

Gerakan yang kami lakukan, lewat #2019Ganti Presien secara demokrasi dan hukum adalah sah, legal, dan konstitusional. Karena kami ingin melakukannya sesuai dengan proses demokrasi dalam Pemilu 2019.

Gerakan ini sudah dideklarasikan pada 6 Mei 2018 di Jakarta. Telah mendapat dukungan dari 34 provinsi dan 317 kabupaten. Gerakan ini ada panduan lewat buku yang telah disebar dan melalui [www.2019gantipresiden.org](http://www.2019gantipresiden.org).

Lewat gerakan ini kami ingin mengatakan agar masyarakat tidak dibohongi oleh pencitraan yang dilakukan. Sudah cukup apa itu pencitraan dan pembohongan. Sudah cukup untuk membohongi masyarakat.

Saat deklarasi, kami membacakan aspirasi nasional yang menyatakan, kami relawan nasional 2019 ganti presiden dengan ini menyatakan sikap keprihatinan atas kemiskinan ketidakadilan, ketidakberpihakan, dan ancaman terhadap kedaulatan, serta krisis kepemimpinan yang terjadi di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, kami bertekad akan terus berjuang bersama seluruh rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, berdaulat bermartabat, adil, makmur, dan berakhlak mulia.

Dengan memohon ridho Allah SWT dan dukungan dari seluruh rakyat, kami siap mengawal jalannya pemilu yang jujur adil dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Hingga terwujudnya 2019 ganti presiden secara sah dan konstitusional pada 17 April 2019.

Gerakan ini membesar dan mendapat respon antusias dari masyarakat. Bila ada yang melarang gerakan #2019GantiPresiden itu bertentangan dengan konstitusi kita, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 3 tentang Kebebasan Berserikat dan Menyatakan Pendapat. Sesungguhnya gerakan ini baik,



sebab masyarakat saat ini merasa ada partisipasi dan wadah aktif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saya yakin, kampanye ini akan berhasil kalau masyarakat merasa ada banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, seperti masalah ekonomi khususnya. Contohnya, harga telur di Malaysia cuma Rp11.000/kg, harga beras di Thailand Rp 6.000/kg. Dan, masih banyak

contoh lainnya. Nah, coba kita bandingkan dengan harga yang ada di Indonesia?

Kami kelompok yang fair sehingga bila ada gerakan #2019TetapJokowi atau apalah namanya, kami merasa gembira jika ada kalangan lain ingin berkampanye dengan maksud yang berbeda dengan kami. Tak ada masalah bila ada kelompok yang tetap menginginkan Joko Widodo sebagai Presiden, atau tetap menginginkan mantan

Wali Kota Solo itu dua periode. Silahkan mereka dua atau bahkan tiga periode, namun kami tetap ingin 2019 ganti Presiden. Seperti inilah demokrasi. Semua mempunyai hak dan legal.

Menjelang Pemilu Presiden 2019, kami yakin kalau masyarakat kian dewasa, dapat menyatakan beda pilihan sekaligus saling menghormati. □

AWG

**Eva Kusuma Sundari** Anggota MPR dari Fraksi PDIP

## Harus Ada Gagasan Dalam Berkampanye

**P**ROBLEM bagi masyarakat dan partai pendukung Presiden Joko Widodo adalah bagaimana mengabarkan dan menyebarkan informasi tentang kinerja Presiden seluas-luasnya. Yang kita lihat sekarang, serangan dari oposisi terhadap Presiden sangat masif. Mereka menggunakan data yang tidak benar dan dilakukan dengan sangat agresif.

Serangan tersebut sebenarnya gampang dimentahkan bila kita mempunyai data dan memberikan data itu seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam membantah tuduhan yang tidak benar, kita juga harus aktif merespon serangan yang ada. Perlu diketahui, kekuatan Joko Widodo dan pemerintahan sekarang basisnya pada kinerja beliau. Jadi kita tidak berwacana. Untuk itu, dalam format kampanye yang akan datang perlu ditambahkan dengan gagasan-gagasan untuk penyempurnaan atau pun keberlanjutan dari kinerja-kinerja yang sudah ada.

Kita tidak ingin terjebak pada adu opini. Kita lebih mengedepankan argumentasi dengan berdasarkan data dan fakta. Jadi bukan dengan mengaduk-aduk emosi, tetapi kita harus mengeksplorasi rasionalitas. Mutu demokrasi kan bergantung pada adu gagasan yang realible atau berbasis data.

Bila ada kampanye atau hastag #2019GantiPresiden, hal demikian tidak perlu direspon secara reaktif karena mereka tidak mempunyai gagasan. Kampanye model seperti itu cuma sekadar ingin mengganti, sehingga kampanyenya tidak bermutu, hanya emosional. Bila ingin mengganti Presiden maka harus ada gagasan dan

alasan yang kuat. Misalnya ingin ganti Presiden karena alasan ini dan itu. Kampanye ganti Presiden sekarang kan tidak punya alasan dan argumen yang kuat, hanya lebih pada benci dan tidak suka. Jadi gerakan ganti Presiden tidak mencerdaskan.

Kita akui memang ada gerakan tandingan seperti #2019TetapJokowi. Hal demikian karena ada aksi maka ada reaksi. Aksi dan

Kampanye ganti atau tetap Joko Widodo itu sah dan legal, tak ada larangan. Namun untuk berkampanye yang berkualitas harus ada unsur gagasan, bukan karena benci, tidak suka, atau cinta. Substansi demokrasi adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi seharusnya gagasan yang ada tetap berorientasi pada memajukan dan memakmurkan masyarakat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

reaksi itu suatu hal yang wajar. Meski demikian, kita tekankan kepada masyarakat yang pro Jokowi, dalam berargumen harus tetap menggunakan data dan fakta. Sebagai petahana tentu pendukung Joko Widodo mempunyai banyak akses informasi sehingga bodoh kalau kita tidak menggunakan data dan fakta. Dari sinilah para pendukung Joko Widodo perlu membangun argumentasi berdasarkan kinerja dan gagasan yang berdasarkan data dan fakta.

bukan karena suka atau tidak.

Dalam berkampanye ada larangan black campaign, menghembuskan isu SARA, dan melakukan kekerasan. SARA itu memecah belah masyarakat. Tahapan Pilpres belum dimulai sehingga bila ada kampanye soal Presiden, seperti dalam debat Pilkada 2108 Jawa Barat kemarin, di mana salah satu pasangan calon mengeluarkan kaos ganti Presiden, hal demikian merupakan mencuri-curi waktu kampanye. □

AWG

Sarasehan Nasional Kebudayaan

# Pembudayaan Pancasila Adalah Keniscayaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**T**EPAT dua hari setelah bom bunuh diri yang menimpa tiga gereja di Surabaya, Selasa (15/5/2018), Lembaga Pengkajian MPR RI menggelar Sarasehan Nasional Kebudayaan. Tema yang diambil dalam sarasehan itu adalah 'Kebudayaan Pancasila sebagai Peradaban Indonesia.' Acara tersebut berlangsung di Ruang Saptaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR, DPR dan DPD RI Senayan, Jakarta.

Setidaknya ada sebelas budayawan dan akademisi yang hadir dan menyampaikan pemikirannya mengenai Kebudayaan Pancasila sebagai Peradaban Indonesia. Mereka itu adalah Prof. dr. Suhartono Suryopranoto, Prof. Dr. I Wayan Ardika, MA., Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ., Prof. Dr. Darwis A. Sulaiman, I Nyoman Nuarta, Zawawi Imron, Prof. Dr. Nurhayati Rahman, Prof. Dr. H. Anwar Arifin, Prof. Dr. Haryono, Acil Darmawan Hardjakusumah, SH., serta Prof. Dr. Abdul Hadi WM.

Terlepas ada tidaknya hubungan antara bom Surabaya dengan kegiatan sarasehan,

yang pasti keprihatinan bangsa Indonesia terhadap peristiwa pengeboman itu tergambar di sepanjang pelaksanaan sarasehan tersebut. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid misalnya, saat membuka sarasehan, menyinggung masalah terorisme. Hidayat mengutip pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyebutkan bahwa akar masalah terorisme adalah kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks Pancasila, kata Hidayat, masalah kesenjangan ini tertuang dalam Sila V, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bila negara ingin memberantas teror dan terorisme secara efektif dan maksimal maka negara harus menghadirkan Sila V. "Agar permasalahan yang ada bisa diatasi," papar pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu.

Menurut Wakil Ketua MPR dari Partai Keadilan Sejahtera ini, Sarasehan Nasional dengan tema: Kebudayaan Pancasila sebagai Peradaban Indonesia itu patut diapresiasi. Karena kegiatan tersebut mengingatkan kembali pentingnya Pancasila

sebagai budaya bangsa. "Agar Pancasila bisa merasuk ke jiwa seluruh bangsa Indonesia," harap Hidayat Nur Wahid.

Dalam tahun politik ini, lanjut Hidayat Nur Wahid, kompetisi antarpolitical politik dan masyarakat terjadi sangat luar biasa. Di sinilah pentingnya budaya Pancasila. "Bila lupa Pancasila kita khawatir politik yang terjadi hanya berorientasi jangka pendek. Hanya sekedar menang Pilkada dan Pilpres," ujarnya.

Untuk itu, kata Hidayat Nur Wahid, sarasehan tersebut merupakan momentum yang sangat bagus untuk mengingatkan semua masyarakat. "Kita segarkan kembali budaya Pancasila," tegasnya. Menyegarkan budaya Pancasila saat ini, apalagi di tengah maraknya ancaman teror dan terorisme, menurut Hidayat, sangat perlu. Dia yakin bila kita melaksanakan Pancasila — di mana sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa— dengan baik maka masalah teror dan terorisme bisa diatasi. "Tidak ada agama manapun yang mengajarkan teror dan



terorisme,” paparnya.

Pernyataan Hidayat Nur Wahid, itu senada dengan statemen yang disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian Rully Chairul Azwar. Dalam acara jumpa pers, sehari jelang sarasehan, Rully menjelaskan bahwa bangsa ini memiliki Pancasila yang secara *genuine*, nilai-nilainya digali oleh para pendiri bangsa. Dari Pancasila, menurut Rully, Indonesia memiliki modal awal untuk pembangunan peradaban, karena Pancasila adalah ideologi, falsafah, dasar negara, dan jati diri bangsa.

“Selain banyaknya budaya dan kearifan lokal yang jika dihayati dengan baik maka bisa memberi kontribusi positif bagi pembangunan peradaban bangsa,” ujar Rully.

Rully menyayangkan Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini telah 72 tahun merdeka, namun nilai-nilai dasar yang ada tidak mewarnai perilaku elit dan sebagian masyarakat. Menurut Rully, budaya Pancasila belum menjadi perilaku untuk membentuk kepribadian. Sikap dan perilaku

politik serta kebijakan pembangunan malah dibentuk oleh pemikiran pragmatis jangka pendek. “Pemecahan masalah yang ada tidak berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila,” ujar pria asal Bengkulu itu.

Akibatnya, solusi yang dihasilkan menjadi parsial, tidak membentuk sistem dan budaya Pancasila. Rully mengingatkan, Pancasila pernah digagas untuk menghasilkan bangsa yang berdikari yang dielaborasi oleh Bung Karno menjadi Tri Sakti. Maka penting menjadikan Pancasila sebagai basis nilai untuk membangun bangsa yang maju, karena kaitan kebudayaan dengan pembangunan peradaban tidak perlu diragukan. Bagi Rully, peradaban maju dunia selalu dikaitkan dengan nilai budaya yang dianut masyarakat.

Nilai Pancasila tidak mencerminkan perilaku elit dan sebagian masyarakat, menurut Rully, disebabkan oleh merebaknya kultur munafik, di mana antara perkataan dan perbuatan tidak sinkron. “Banyak aturan tetapi tidak bisa dilaksanakan, karena

penegakan hukum yang lemah,” paparnya. “Juga maraknya perilaku koruptif dan minimnya keteladanan dari kalangan pemimpin,” tambahnya.

### **Kehilangan Identitas**

Selain karena kehadiran para budayawan, Sarasehan itu semakin menarik karena para pimpinan dan anggota Lembaga Pengkajian MPR mengenakan pakaian adat, asal daerahnya masing-masing. Ketua Lembaga Pengkajian Rully Chairul Azwar misalnya, dia mengenakan baju khas Bengkulu. Jaffar Hafsa yang bertindak selaku moderator memakai pakaian dari daerah Makasar, demikian pula yang lainnya.

Setelah dibuka oleh Hidayat Nur Wahid, sarasehan dilanjutkan dengan curah pendapat. Diawali oleh Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Profesor. Dr. Haryono. Menurut Haryono, pembudayaan Pancasila bukan hanya tanggung jawab BPIP, tapi seluruh rakyat

Indonesia. Karena pembudayaan Pancasila sangat luas dan harus dilakukan secara terus-menerus di seluruh bidang kehidupan.

Sistem demokrasi Indonesia belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai Pancasila. Bahkan sejak era reformasi, sistem demokrasi Indonesia terasa semakin liberal. Persaingan antarcaleg bukan hanya terjadi di antara parpol, tetapi juga di antara partai politik yang sama.

“Padahal Pancasila mengajurkan sikap gotong royong, tetapi karena liberal maka sifat tersebut tidak ada. Bahkan parpol kesulitan memilih kader terbaiknya menjadi

budaya asing, sementara budaya lokal dilupakan. Padahal ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan dan identitas diri.

“Ancaman terbesar imperialsme dan kolonialisme, bukan penindasan militer atau tekanan secara ekonomi. Tapi yang paling bahaya adalah eksploitasi secara kultural dapat menghilangkan kepercayaan dan identitas”, kata Haryono lagi,

Kalah dalam kekuatan militer, menurut Haryono, bisa dibangun secara cepat, seperti Jepang. Tapi kalau wataknya yang diambil butuh waktu lebih lama. Satu satunya

Padahal Pancasila harus menjadi rujukan dan referensi bersama.

Sementara itu Acil Darmawan Hardjakusumah, SH., menyoroti soal perilaku manusia Indonesia yang semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, bagi personil grup Bimbo ini bangsa Indonesia membutuhkan adanya revitalisasi Pancasila. Alasannya, karena saat ini bangsa Indonesia sudah kehilangan karekturnya sendiri.

“Kita harus mengembalikan Pancasila sebagai karakter bangsa. Jangan sampai bangsa Indonesia lupa dan kehilangan Pancasila,” ujar Acil.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

anggota DPR”, tutur Haryono.

Untuk mempererat persatuan, masih menurut Haryono, bangsa Indonesia harus keluar dari kepompong primordial, memperpendek jarak perbedaan antargolongan, dan menyatu menjadi Indonesia. Tetapi semua itu membutuhkan satu titik temu, yaitu Pancasila. Baik Pancasila sebagai dasar negara, maupun sebagai pandangan hidup.

Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi acuan bagi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nyatanya, sejak reformasi, bidang ekonomi pasar dan politik malah berubah menjadi kapitalisme. Semua ini tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau dibiarkan berarti membiarkan tidakan yang bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup juga banyak dilupakan oleh masyarakat. Buktinya sebagian besar masyarakat lebih memilih

jalan adalah kembali pada Pancasila dan nilai gotong royong. Karena banyak generasi sekarang bersifat individual lantaran tidak berpijak pada Pancasila.

### Revitalisasi Pancasila

Semua orang, terutama para pejabat, ingin kaya. Agar masa tuanya tidak susah, supaya jaminan kesehatan dan pendidikannya aman. Mestinya dalam negara kesejahteraan, negara mengambil alih prinsip kepentingan dasar, sehingga orang tidak menjadi rakus.

Untuk itu, menurut Hartono, Lembaga Pengkajian MPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mengembalikan GBHN, sebagai pedoman perencanaan pembangunan nasional. Karena tanpa GNHN Pancasila semakin sulit untuk direalisasikan. Tanpa GBHN pembangunan tidak berkesinambungan, sehingga tiap periode dan tingkatan daerah jalan sendiri-sendiri.

Saat ini banyak nilai-nilai dan kearifan lokal yang terpinggirkan dengan masyarakatnya. Ini bisa terjadi, salah satunya karena banyak gunung yang berubah menjadi milik perorangan. Padahal, di sekitar gunung-gunung itu terdapat banyak kearifan lokal, yang terpaksa ditinggalkan karena gunungnya menjadi milik perorangan.

Persoalan seperti itu, menurut Acil, banyak terjadi di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Gunung-gunung yang sebelumnya menjadi tempat persemaian kearifan lokal tiba-tiba ada ketetapan dari Jakarta, yang mengubah gunung itu menjadi milik perorangan, yang bisa dikelola sesuai keinginannya.

“Ini tidak bisa dibenarkan. Jakarta terus-menerus melakukan pengambilan tanah. Kita sebagai sebuah bangsa sudah kehilangan banyak karakter lokal, yang semestinya bisa menjadi kekayaan budaya,” sebut Acil.

Karena itu, Acil meminta agar MPR

melakukan dialog kebudayaan dengan intensitas yang lebih banyak, dan dengan seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali dengan anggota masyarakat yang ada di daerah.

Pendapat lainnya datang dari Prof. Franz Magnis-Suseno SJ. Dia menilai, Pancasila beserta kelima silanya merupakan sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Apalagi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, sejak awal memang sangat besar. Indonesia adalah bangsa paling majemuk, tetapi Pancasila membuat bangsa Indonesia merasa satu. Padahal, negara lain gagal mengatasi persoalan perbedaannya. Dan, mengalami ancaman perpecahan selama bertahun-tahun.

Bahkan, menurut lelaki keturunan bangsawan asal Polandia ini, pada 1998 seluruh pengamat yakin bahwa Indonesia akan terpecah, seperti Uni Soviet atau Yugoslavia. Tetapi ternyata perkiraan itu tidak terjadi. Kuncinya adalah karena satu sama lain, semua bersedia menerima perbedaan identitasnya masing-masing.

“Sikap seperti itu sudah terlihat sejak 18 Agustus 1945, saat agama mayoritas tidak menuntun keutamaan bagi kelompoknya. Ketika itu umat Islam tidak memaksakan Piagam Jakarta, dan merelakan Pancasila. Itu adalah pengorbanan besar umat Islam yang menjadi Indonesia tidak mengenal mayoritas dan minoritas”, kata Prof. Magniz lagi.

Masa paling gawat dalam mempertahankan Pancasila, menurut penerima anugerah Bintang Mahaputra Utama atas jasa-jasanya di bidang kebudayaan dan filsafat, terjadi pada saat Soeharto lengser. Tetapi tokoh-tokoh bangsa saat itu mampu membawa bentuk yang Indonesia lebih demokratis dengan hak asasi, tetapi tetap di bawah Pancasila.

Karena itu, kata Prof. Magniz, bangsa Indonesia harus tetap fokus pada Pancasila. Apalagi, Pancasila juga akan terus diancam oleh ideologi eksklusif yang datang dengan claim kebenaran mutlak dan paling benar. Karena itu, penting untuk memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran di sekolah. Jangan sampai generasi muda lupa dan tidak mengenal Pancasila. □

AWG-MBO



## Pendidikan Pancasila Perlu, Jika ...

**U**PAYA Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membudayakan Pancasila melalui jalur pendidikan sudah dilakukan sejak lama. Tetapi keinginan itu tidak gampang diwujudkan. Terbukti, hingga kini materi Pancasila belum berdiri sendiri dan masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

Tetapi, desakan untuk menjadikan Pancasila sebagai materi dalam kurikulum pendidikan nasional terus disuarakan. Pada seminar hasil kerjasama MR dengan MUI, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai, pentingnya pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah. Karena Pendidikan Pancasila di sekolah dinilai mampu membentuk karakter anak.

Karena itu peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2018 hendaknya menjadi momentum memasukkan kembali mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok dalam semua jenjang kurikulum pendidikan nasional. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan internasional yang beroperasi di Indonesia. Agar generasi muda memiliki daya tahan ideologis yang kokoh.

Harapan tersebut sepertinya belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Karena untuk menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang berdiri tersendiri tidak gampang. Dibutuhkan guru yang bisa membidangi pelajaran tersebut. Artinya, dibutuhkan fakultas khusus tentang Pancasila, dan magister yang ahli tentang Pancasila. “Sekarang fakultasnya saja belum ada, apalagi gurunya”, kata Abdul Fikri Fakhri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Menurut Abdul Fikri, hingga saat ini masih terjadi polemik seputar perlunya mata pelajaran Pancasila di sekolah. Kalau sekedar Pendidikan Moral Pancasila (PMP) itu artinya mengkerdeilkan Pancasila. Karena sesungguhnya, Pancasila itu bukan hanya persoalan moral. Tetapi, kalau Pancasila dalam arti yang lebih luas maka dibutuhkan struktur pendidikan dan pendidik yang sangat banyak.

Keinginan mengembalikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, lanjut Fikri, mengandung persoalan yang sangat kompleks. Apalagi, hingga kini, Indonesia belum memiliki *blue print* pendidikan yang disetujui bersama. Akibatnya, setiap terjadi pergantian pendidikan, rancangan pendidikan pun ikut berubah.

Karena itu, apa yang dilakukan selama ini menempelkan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan yang lain sudah cukup baik. Bahkan, dengan cara seperti itu siswa jadi tahu bahwa Pancasila meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena Pancasila terdapat dalam seluruh bidang pendidikan, termasuk ekonomi, agama, dan sosial.

“Kecuali kalau di antara sesama warga bangsa masih ada yang suka menunjuk “Saya Pancasila” dan yang lain tidak Pancasila maka pendidikan Pancasila yang berdiri sendiri sudah sangat mendesak untuk direalisasikan. Selama itu tidak terjadi, apa yang ada selama ini sudah cukup baik”, ujar Abdul Fikri. □

Gresik, Jawa Timur

# Mahyudin: Waspadaai Penjajahan Model Baru



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI Mahyudin melakukan kunjungan kerja dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR di beberapa wilayah di Jawa Timur, Kamis (19/4/2018). Wilayah pertama yang dikunjungi adalah Gresik. Bertempat di Resto Joyo Roso, Mahyudin menyampaikan materi Empat Pilar MPR di hadapan sekitar seribu kader DPD Golkar Kabupaten Gresik, dan masyarakat umum seputar Gresik. Hadir dalam acara tersebut, anggota MPR Fraksi Partai Golkar Eni Maulani S., dan mantan Bupati Gresik, KH. Robbach Ma'sum.

Dalam paparan materinya, Mahyudin mengungkapkan tentang sejarah Indonesia dan mengapa Indonesia dijajah Belanda sangat lama. "Indonesia adalah negara besar. Dari sisi geografis sangat luas dengan penduduk sangat besar. Tapi, negara sebesar Indonesia memiliki sejarah kelam, di jajah sangat lama oleh bangsa kecil dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah, yakni Belanda," ungkap Mahyudin.

Mengapa Negara berpenduduk kecil tersebut bisa menjajah bangsa besar Indonesia. Hanya satu kuncinya, yakni menggunakan siasat *divide et impera* atau siasat pecah belah/ adu domba. Dan, siasat pecah belah itu masih ada hingga sekarang, tapi dalam bentuk lain. Kalau dulu pecah belah secara fisik, tapi sekarang pecah belah secara ekonomi dan politik.

Lebih jauh, Mahyudin mengatakan bahwa potensi penjajahan

model baru dengan metode lama tersebut mesti diwaspadai oleh seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan yang mempersatukan bangsa yang beragam antara lain gotong royong, toleransi, dan saling menghormati dibenturkan dengan munculnya ego sektoral, ego kedaerahan, dan ego agama, fanatisme SARA yang berlebihan, sehingga menyepelkan yang lain. Itu yang membuat ikatan persatuan akan goyah dan lama kelamaan akan hancur.

"Itulah salah satu tantangan bangsa yang luarbiasa berat, tapi bagaimana pun kita harus tetap bersatu di tengah gempuran dan serbuan fitnah, serta adu domba, apalagi memasuki tahun politik 2018 dan 2019. Untuk itulah saya berpesan kepada peserta kader Golkar khususnya dan seluruh kader parpol umumnya, raihlah kemenangan dalam pilkada dan pileg, tapi hindarilah menyentuh isu sensitive, isu SARA. Jangan sampai memperoleh kemenangan, tapi meninggalkan kehancuran dan merusak persatuan bangsa," tandas putera Kalimantan Timur ini.

## Waspada Tantangan Global

Di tengah penyampaian sosialisasi, Mahyudin juga menyampaikan beberapa hal krusial terkait berbagai permasalahan bangsa Indonesia, diantaranya bangsa ini memasuki tantangan global. Pengaruh





globalisasi yang semakin luas dengan persaingannya yang semakin tajam. Namun, di tengah-tengah itu, bangsa ini masih terlena menjadi bangsa yang konsumtif dan hanya mengandalkan sumber daya alam yang melimpah. Saat ini, lebih parah lagi, pengaruh media sosial menimbulkan dampak negatif. Rakyat saling melancarkan hasutan dan fitnah di dunia maya. Etika dan kesantunan sepertinya tidak ada tempatnya lagi.

Potret keadaan tersebut tergambar pada lirik lagu Iwan Fals yang berjudul: *Mimpi Yang Terbeli*. Yang liriknya seperti ini: 'Segala produksi ada di sini menggoda kita tuk memiliki, hari-hari kita berisi hasutan, hingga kita tak tau diri sendiri'. Lihat kapitalisasi masuk ke Indonesia tanpa bisa kita bendung. Kita bisa lihat semua produk hampir semua dimiliki asing.'

Lebih lanjut Mahyudin mengutarakan, In-

onesia yang memiliki penduduk yang besar, sekitar 260 juta, adalah potensi pasar yang sangat besar dan Indonesia punya kemampuan untuk membeli, karena Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah.

"Inilah kita secara tidak sadar masuk ke dalam pusaran penjajahan ekonomi yang membuat kita terus-menerus menjadi masyarakat konsumtif dan terus menggerus sumber daya alam kita sendiri," ungkapnya.

Mahyudin mengatakan, semestinya dengan sumber daya alam yang sedemikian besar, Indonesia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan memenuhi pasar global dengan mengelola sumber daya alamnya menjadi produksi jadi. Bukan hanya menjual bahan mentah hasil alam yang lama kelamaan akan habis.

"Maka dari itu mumpung sedang dalam tahun politik, pilkada dan nantinya juga pileg

dan pilpres, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memilih kepala daerah, wakil rakyat, bahkan pemimpin nasional yang mengedapankan sektor industri. Agar industri di Indonesia bergairah dan mampu disejajarkan dengan negara-negara industri lainnya," tandasnya.

### **Mahyudin Disebut Pejabat Gaul**

Lokasi terakhir rangkaian kunjungan kerja Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di Jawa Timur, melakukan sosialisasi Empat Pilar di Auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Hadir dalam acara tersebut Rektor Unesa Prof. Warsono, para dekan dan dosen Unesa, serta sekitar 500 lebih mahasiswa dan mahasiswi Unesa berbagai Fakultas.

Sekitar 15 menit saat Mahyudin menaiki podium memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar, antusiasme peserta mahasiswa. Para



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

peserta memberi respon sangat luarbiasa terhadap metode penyampaian Mahyudin yang disebut mahasiswa sangat kekinian dan gaul. Memang sejak awal, Mahyudin naik podium di tengah-tengah menyampaikan materi, selalu menyelipkan beberapa kata, kalimat, kisah, candaan yang sangat akrab dan dipahami anak muda.

Salah satunya ketika Mahyudin membicarakan soal pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, sehingga tidak terjadi konflik. Seperti yang terjadi di Suriah, yang menyebabkan rakyatnya susah karena perang yang tak juga selesai.

“Kita memiliki elemen perekat persatuan, yakni Pancasila. Selain itu ada dua hal jika kita semua ingin bahagia dalam menjalani sesuatu, yakni bersyukur dan bersabar. Kalian mahasiswi dapat pacar syukuri, putus pacar sabar. Jangan jadi generasi yang

cengeng, Cuma karena putus pacar saja meraung-raung curhat di media sosial. Makanya jangan rindu berat kamu gak akan kuat, biar aku saja,” ujarnya disambut riuh tepuk tangan mahasiswa peserta.

Mahyudin dalam kesempatan tersebut, masih di sela-sela memberikan materi sosialisasi, mengungkapkan bahwa dirinya juga orang kekinian, salah satunya tahu permainan digital yang sedang tren saat ini, yakni Mobile Legend, apalagi dia juga didaulat menjabat Dewan Pembina Indonesia e-Sport Association (IeSPA).

“Jangan salah, saya player juga bukannya *noob*. Saya juga tahu beberapa *player* hebat,” katanya disambut *standing applause* peserta. Kepada rektor, para dekan dan dosen Unesa yang hadir, Mahyudin menjelaskan bahwa beradaptasi di lingkungan anak muda sangat perlu agar apa

yang diajarkan kepada mereka akan mudah diterima dan tidak terkesan kaku.

Karena merasa respon mahasiswa terhadap dia sangat luarbiasa, peraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ini kemudian berbicara perihal pentingnya Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) MPR dipahami rakyat Indonesia, terutama generasi muda. Hal tersebut dimulai pasca reformasi, di mana Pancasila seperti terlupakan.

“Dulu saat saya duduk di sekolah menengah ada pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), saat mahasiswa ada penataran P4 selama 2 minggu, kalau tidak lulus akan mengulang sampai lulus. Saat ini pasca reformasi tidak ada lagi. Pancasila hanya dihafal tanpa dihayati. Padahal Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita berasal dari nilai-nilai luhur bangsa, bukannya kerjaan ‘ngarang-ngarang,’ tegasnya.

Hebatnya, lanjut Mahyudin, para pendiri bangsa sangat mampu melihat jauh ke depan. Mereka melihat dan membandingkan antara kultur bangsa Indonesia saat itu dengan perkembangan dunia, yakni di Barat ada kapitalis dan liberalis, sedangkan di belahan dunia Timur ada sosialis.

“Para pendiri bangsa kemudian mencari jalan tengah. Munculah Pancasila. Inilah jalan tengah, jalan damai jalan kompromi yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri yang ternyata mampu membuat bangsa kita utuh selama ini. Pancasila muncul sebagai perekat kita semua tanpa Pancasila maka kita akan terpecah belah,” ujarnya. □

DER



Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI)

# MPR Sebarkan Empat Pilar Pada Ormas Wanita Islam



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**I DEPAN ratusan anggota Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) yang sedang mengikuti pembukaan Musyawarah Nasional XIII di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPD/DPD Senayan, Jakarta, 27 April 2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan menceritakan tentang kunjungannya di beberapa kabupaten di Jawa Timur.

Di Jawa Timur, kata Zulkifli Hasan, ibu-ibu berkeluh kesah mengenai mahalnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. "Mereka mengatakan harga semua kebutuhan pokok jadi meningkat," ujar Zulkifli Hasan. Keluhan itu juga ditanyakan kepada anggota BMOIWI dan mereka mengatakan sama dengan apa yang dialami oleh ibu-ibu di Jawa Timur.

Apa yang terjadi itu, menurut pria asal Lampung, itu sebagai bentuk adanya ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan yang terjadi, kata Zulkifli Hasan, tidak hanya dalam soal harga kebutuhan sehari-hari namun juga pada kepemilikan sumber daya alam dan penguasaan sektor ekonomi. "Ketimpangan tersebut tidak boleh dibiarkan. Ketimpangan



sesuatu yang paling berbahaya bila tidak diatasi," ujarnya. Ketimpangan, lanjut Zulkifli Hasan, diibaratkan seperti rumput yang kering, mudah terbakar.

Untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kekayaan, Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa Indonesia merdeka agar bisa berdaulat. Konstitusi amanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. "Dalam Sila V Pancasila jelas disebutkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujarnya.

Masih soal cerita ibu-ibu di Jawa Timur, Zulkifli Hasan menyatakan, mereak tidak hanya curhat masalah kebutuhan sehari-

hari, namun juga merasa heran mengapa aspirasi politik masyarakat tidak nyambung dengan aspirasi partai politik. Tak nyambungnya aspirasi tersebut, Zulkifli Hasan menyebutnya sebagai kesenjangan politik. "Kesenjangan politik bisa terjadi karena adanya transaksi dalam politik," paparnya.

Akibat politik transaksional, menurut Zulkifli Hasan, karena elit politik lebih mengedepankan kelompok yang menguntungkan daripada memikirkan aspirasi rakyat. Akibatnya, timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik. Menghadapi yang demikian, mantan Menteri Kehutanan itu berharap, agar umat Islam bersatu dan memilih pemimpin yang paham masalah umat.

Bila umat Islam bersatu maka kekuatan yang ada bisa dikonversikan ke dalam kekuatan ekonomi dan politik yang membawa kemaslahatan bagi semua. Semua itu, menurut Zulkifli Hasan, dimulai dari keluarga. "Hancur dan cemerlangnya peradaban dimulai dari keluarga," ujarnya. "Di sinilah peran ibu-ibu sangat menentukan," tambahnya. □

AWG

PD Salimah Depok

# Empat Pilar MPR Membuka Diri Untuk Semua Elemen Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan, satu idiom zaman *old* yang sangat relevan dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni: 'tak kenal maka tak sayang'. Jika rakyat Indonesia tidak mengenal Empat Pilar MPR yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika maka tidak akan tumbuh rasa cinta dan sayang kepada bangsa dan negara.

Hal tersebut disampaikan HNW saat memberikan keynote speech di hadapan ratusan anggota Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (PD Salimah) Kota Depok, dan ibu-ibu majelis taklim seputar Kota Depok peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sosialisasi ini diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan PD Salimah, di Gedung Puri Sekar Peni. Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/4/2018).

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Walikota Depok, anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Barat VI Mahfudz Abdurrahman, Ketua DPD PKS Kota Depok H.M Hafid Nasir, dan Ketua PD Salimah Kota Depok, Raden Siti Nurani.

"Namun, sayang dan cinta kepada bangsa dan negara bukan sayang dan cinta monyet yang hanya hangat di permukaan, tapi cinta dan sayang secara tulus seperti cinta kita kepada keluarga yang memberikan secara total segala yang terbaik yang bisa kita berikan. Begitu juga dalam konteks negara, membuktikan cinta kita kepada negara dengan memberikan segala yang terbaik," katanya.

Untuk itulah, menurut HNW, MPR sesuai perintah UU melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berbagai metode yang tepat kepada berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia. "MPR tidak milih-milih dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi terbuka buat semua elemen masyarakat. Asal dia warga bangsa Indonesia maka dia bisa mengikuti sosialisasi. Saya tekankan juga betapa pentingnya kegiatan sosialisasi ini, sebab akan mengembalikan kembali pemahaman rakyat Indonesia akan nilai-nilai luhur bangsanya," ujarnya.

Berbicara soal Pancasila, HNW menjelaskan, Pancasila adalah kesepakatan seluruh rakyat Indonesia dan menjadi dasar dalam pembentukan dan penegakan negara Indonesia. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang memang sudah ada yang kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang juga berbeda-beda dan beragam.

Pancasila, lanjut HNW, juga adalah perekat. Pancasila mampu merekatkan Indonesia yang keberagamannya sangat luar biasa. Pentingnya kehadiran Pancasila bisa dirasakan ketika negara besar, negara adikuasa Uni Soviet saja bisa hancur, terpecah-pecah, menjadi beberapa negara. Konsep *Glassnost* dan *Perestroika* yang diluncurkan Pemimpin Soviet Michael Gorbachev tak mampu mempertahankan



Soviet yang sangat tinggi keberagamannya. *Perestroika* merupakan upaya Gorbachev menyelesaikan masalah kompleks yang dihadapi Uni Soviet yang bertujuan agar terjadinya restrukturisasi dalam negara. Pada praktiknya, konsep perestroika justru menjadi awal kehancuran total Uni Soviet.

“Kita bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa ternyata mampu menjadi perekat dan menyatukan bangsa Indonesia yang keberagamannya sangat tinggi. Untuk itulah kita sebagai rakyat Indonesia mesti menjaga Pancasila agar tidak terusik,

upayakan untuk memahaminya, kemudian mencintai dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan harus terus diviralkan dengan berbagai cara salah satunya dengan mengikuti Sosialisasi Empat Pilar,” tandasnya. □

DER

## Sosialisasi Empat Pilar PP Salimah

# Hidayat Nur Wahid: Semarakkan Tahun Politik Tapi Tetap Terikat Empat Pilar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan bahwa tahun politik yang ditandai Pilkada 2018, serta Pileg dan Pilpres 2019 akan penuh dengan kontestasi dan kompetisi yang sangat luar biasa ketatnya. Namanya kontestasi pasti akan ramai dengan berbagai fenomena, baik positif maupun negatif.

“Namun, saya mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bergairah semarakkan dan berpartisipasi aktif dalam tahun politik tersebut. Walaupun penuh dengan ‘drama’ atau apapun itu, kita semua harus tetap terikat dengan Empat Pilar MPR, tetap terikat Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya, usai menjadi narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR di Ballroom Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

Sosialisasi Empat Pilar bertema: “Pengokohan Ekonomi Perempuan Sebagai Sarana Penguatan Jati Diri Bangsa” ini diikuti ratusan pengurus dan anggota PP Salimah. Selain HNW, juga hadir sebagai narasumber adalah anggota MPR RI Fraksi PKS Mustafa Kamal.

Lebih lanjut HNW mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres artinya adalah impelemnetasi dari pengamalan Pancasila, pengamalan UUD NRI Tahun 1945

dalam rangka menjaga NKRI dan tetap memahami kebhinnekaan Indonesia. Yang tidak boleh dilakukan adalah menjadikan tahun politik sebagai momen saling fitnah, saling menyebar kebencian dan kabar hoax, menyebarkan permusuhan atau konflik.

“Justru ditahun politik ini kesempatan kita semua untuk berlomba-lomba membuktikan bahwa kitalah yang paling Pancasila, kita betul-betul paling UUD NRI Tahun 1945, kita paling NKRI dan kita paling menjaga kebhinnekaan bangsa. Mari buktikan itu semua dengan kompetisi yang sehat,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

HNW juga mengungkapkan bahwa fenomena sekarang ini seiring gelaran tahun politik banyak sekali bermunculan berbagai materi dukung-mendukung pilihan caleg bahkan capres. Ada bermunculan hastag

atau tagar #2019GantiPresiden lalu ada lagi #2019JokowiTetapPresiden.

“Melihat fenomena tersebut, rakyat mesti menyikapi dengan bijak. Semua itu adalah bagian dari demokrasi dan demokratisasi

yang kemudian tidak perlu diambil tindakan-tindakan represif, intimidasi. Sekali lagi jadikan tahun politik sebagai pembuktian bahwa kita paling Empat Pilar,” tandasnya. □

DER



### Sosialisasi Empat Pilar MPR di Aceh

# Ma'ruf Cahyono: Hindari Pengaruh Radikalisme dengan Mamahami Jati Diri Bangsa

**S**EKRETARIS Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengungkapkan, sangat mengutuk aksi terorisme yang kembali mengganggu ketenangan rakyat Indonesia dengan menyerang tiga rumah ibadah dan markas Polrestabes di Surabaya belum lama. Peristiwa itu meninggalkan duka mendalam sebab merenggut korban jiwa dan luka-luka. Sebelumnya juga terjadi kerusuhan dilakukannya kasus terorisme di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat yang juga merenggut lima korban jiwa di pihak aparat Polri.

“Ingat, bukan sifat dan karakter bangsa Indonesia melakukan aksi kejam seperti itu. Itu karena pengaruh paham radikal yang sangat ekstrim,” katanya ketika membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Unmuha Convention Center (UCC) Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (14/5/2018). Untuk itu Ma'ruf Cahyono mengajak seluruh hadirin untuk mengheningkan cipta dan berdoa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

untuk para korban.

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar ini diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Yayasan Laskar Muda Indonesia (YLMi). Diikuti ratusan peserta, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Medan serta

beberapa unsur mahasiswa dan organisasi kepemudaan seperti Pemuda Paguyuban Daerah Kabupaten/Kota, Pemuda Muhammadiyah Aceh, IMM, HMI, PMII dan lainnya.

Dalam kesempatan itu hadir pula Pimpinan



Lembaga Pengkajian MPR RI Ahmad Farhan Hamid, Ketua Aisiyah Aceh Ibu Zaidar Ja'far, Ketua Dewan Penasihat YLMI Irvanusir Rasman, dan Kapolsek Lueng Bata, Banda Aceh.

Selanjutnya, Ma'ruf Cahyono menegaskan bahwa pemahaman jatidiri bangsa yang benar akan memunculkan karakter bangsa yang baik dan sesuai nilai-nilai luhur bangsa yang ada dalam Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Bicara tentang Empat Pilar MPR adalah bicara tentang jatidiri bangsa Indonesia. Pemahaman dan implementasi jatidiri bangsa yang kuat akan membentengi rakyat Indonesia dari pengaruh pemahaman radikalisme,” tandasnya.

### TAP MPR Terkadang Terlupakan

Dalam momen Sosialisasi tersebut, Ma'ruf Cahyono juga membicarakan soal Ketetapan (Tap) MPR RI. Menurut Ma'ruf, banyak rakyat Indonesia terutama generasi muda, mahasiswa, dan pelajar, ketika ditanyakan soal UU, Perpu, Perpres, Perda sebagian besar mengetahui dan memahaminya. Tapi, ketika ditanya soal Tap MPR ternyata banyak yang belum mengetahui dan memahaminya. Tap MPR adalah bagian dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang kedudukannya berada satu tingkat di bawah UUD, dan berada di atas UU atau Perpu,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perpres, Peraturan Pemerintah dan Perda.

“Jika mahasiswa, pelajar, dan masyarakat mempelajari Tap MPR isinya sangat luarbiasa, mengatur segala hal penting terkait kehidupan berbangsa dan bernegara kita, antara lain tuntutan-tuntutan reformasi dijawab semua dalam TAP MPR. Juga soal otonomi daerah, soal demokratisasi, soal kebebasan pers, dwifungsi ABRI sampai soal pemberantasan KKN semua ada dan dijawab oleh Tap MPR yang dinyatakan masih berlaku di bawah UUD,” katanya.

Masyarakat Indonesia, lanjut Ma'ruf Cahyono, harus memahami dan mendalami bahwa Indonesia memiliki perangkat aturan konstitusional dan juga menjadi panduan bagus untuk memandu pemerintah dan

seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yakni Tap MPR itu.

“Saya rasa jika semua rakyat menyadari dan memahami hal tersebut maka sesungguhnya fenomena merisaukan yang viral terjadi saat ini, dan fenomena merisaukan lainnya tidak perlu terjadi. Sebab semua ada jawabannya, seperti etika kehidupan berbangsa, bagaimana mewujudkan politik yang demokratis, penegakan hukum yang adil, menciptakan perilaku perekonomian yang berorientasi untuk semua. Maka kenallah Tap MPR. Jika sudah kenal maka pahami lalu akan merasakan betapa luarbiasanya Tap MPR,” terangnya. □

DER

Kabupaten Karanganyar

# Wayang Kulit, Warisan Budaya Adiluhung



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid membuka secara resmi Pagelaran Seni Budaya Wayang Kulit dalam rangka Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Sabtu (5/5/2018) di Lapangan Desa Suruh, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Lakon Wahyu Cakraningrat dibawakan oleh Ki Dalang Danang Suseno.

Dalam sambutannya, Hidayat Nur Wahid mengatakan, sosialisasi Empat Pilar MPR dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, pagelaran wayang kulit. Ia bercerita, beberapa waktu lalu, sosialisasi dilakukan dengan komunitas dalang wayang Beber di Sragen, Jawa Tengah. Di Jawa Barat dilakukan dengan pagelaran wayang golek, dan di Padang, Sumatera Barat, juga dengan tarian-tarian.

Hidayat mengatakan, pertunjukan wayang merupakan warisan budaya dan mengulang apa yang telah dilakukan oleh Walisongo dalam penyebaran agama Islam dengan pertunjukan wayang kulit. Menurut Hidayat, dengan pertunjukan wayang kulit, MPR melanjutkan tugas dengan memberikan sosialisasi melalui media yang akrab di masyarakat, yakni wayang. Tujuannya, membuat masyarakat berkumpul, memahami

sosialisasi Empat Pilar dan makin mencintai negaranya.

“Tugas negara adalah memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Salah satunya melalui wayang kulit yang sudah dinyatakan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2003,” kata pengagum Kresna, tokoh pewayangan ini.

Ia mengatakan, wayang merupakan warisan dan kekayaan kebudayaan bernilai adiluhung. Yang bisa disaksikan dan didengar pesannya dari ki dalang, diantaranya tentang bagaimana menjalankan nilai-nilai luhur, prinsip bernegara, prinsip keamanan, atau bagi lingkungan masyarakat kita di tengah perbatasan dunia.

“Sosialisasi menegaskan bahwa antara negara dan keberagaman tidak memiliki tabir atau pemisahannya. Bagaimana kita bisa menyelamatkan NKRI dan menjalani kehidupan kenegaraan dan keagamaan dengan baik. Ini menjadi kepedulian kami agar NKRI tetap terjaga,” katanya. Ia menambahkan, “Dengan sosialisasi kita tegaskan bahwa kita semua bersaudara, dan satu Indonesia. Sesama penggemar wayang tidak boleh saling menghancurkan.”

Ke depan, kata Hidayat, sosialisasi akan terus dilanjutkan dengan berbagai unsur, lembaga, ormas, dan kalangan profesi. “Mari sukseskan sosialisasi ini dengan perantara wayang kulit, agar menghadirkan kebaikan bagi warga Karanganyar pada khususnya.”

Kepala Biro Humas MPR RI, Siti Fauziah mengatakan, pagelaran wayang kulit ini diharapkan bukan hanya sebagai tontonan semata, melainkan juga tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi bagian dari upaya pelestarian seni budaya.

Malam itu, dalang Ki Danang Suseno, putra dalang ternama Ki Manteb Sudarsono, ini membawakan lakon ‘Wahyu Cakraningrat’ yang menceritakan tentang upaya tiga orang satria, yaitu Raden Lesmono Mandrakumara, Raden Sombo Putro, dan Raden Abimayu yang berebut mendapatkan kekuasaan. Ketiganya sama-sama berambisi besar menjadi Ratu. Untuk itu, mereka harus bertarung untuk mendapat gelar “Wahyu Cakraningrat”. Namun mendapatkan Wahyu Cakraningrat tidaklah mudah karena sejumlah syarat harus dipenuhi agar Wahyu Cakraningrat bisa *majing* atau sejiwa dengan satria terpilih.

Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah mampu handayani (membuat contoh yang baik) kepada rakyat, berpegang pada kejujuran, mampu memberikan keteladanan, mampu memberikan rasa tenteram kepada rakyat, mampu memberi rasa kasih sayang pada rakyat. Selanjutnya mempunyai perilaku amanah, mampu merekatkan seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang, agama, ras dan budaya, serta harus peduli terhadap lingkungan. Merupakan pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada para calon pemimpin di Indonesia.

Pagelaran Wayang Kulit ini dihadiri pula oleh anggota MPR RI, Martri Agoeng dari Fraksi Partai PKS, Kepala Bagian PDSI, Biro Humas MPR RI, Andrianto, Plt Bupati Karanganyar, juga para tokoh masyarakat Karanganyar. Menjelang pagelaran, Hidayat menyerahkan wayang kulit kepada Ki Dalang yang merupakan putra asli dari Karanganyar. □

EFP



Kampus UKI Cawang, Jakarta

# Muhaimin: Kesenjangan Berpotensi Perpecahan

Alasannya, karena Indonesia terdiri dari berbagai keragaman. Ramalan itu ternyata tidak benar, dan hanya Timor Timur yang terpisah dari ibu pertiwi.

“Waktu itu kita berhasil menutup ekspansi besar-besaran masuknya nilai-nilai asing



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Jakarta Selatan, Senin (21/5).

Berbicara dengan tema: ‘Mempertahankan Semangat Nasionalisme di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,’ Cak Imin menyatakan, sudah banyak keberhasilan yang dicapai bangsa Indonesia selama era reformasi. Tetapi, masih banyak juga kekurangan yang harus segera dibenahi. Salah satunya adalah persoalan kesenjangan yang masih terus memprihatinkan.

“Semangat Hari Kebangkitan Nasional harus mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, tidak tertinggal oleh bangsa-bangsa lain”, ujar Cak Imin.

Muhaimin mengingatkan, ada berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan NKRI. Antara lain munculnya aliran-aliran baru yang ada di tengah masyarakat. Juga timbulnya kesenjangan makin lebar. Bahkan, kalau kesenjangan tersebut tidak segera diatasi akan berpotensi terjadinya perpecahan bangsa semakin besar.

Pada saat berlangsung reformasi, kata Muhaimin, berbagai pengamat luar negeri meramalkan bahwa bangsa Indonesia akan terpecah menjadi negara-negara kecil, seperti yang menimpa Yugoslavia.

dari luar, dan mampu mengikat persatuan, sehingga kita terhindar dari perpecahan yang lebih besar,” ungkap Muhaimin. Tetapi keberhasilan itu, lanjut Muhaimin, harus segera diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan yang lebih nyata bagi seluruh warga Indonesia, agar NKRI ini tetap terjaga.

Di masa depan, kata Muhaimin, kehidupan demokrasi akan semakin di butuhkan. Karena demokrasi menjamin keterlibatan seluruh masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, demokrasi juga menjamin kesamaan derajat seluruh warga, artinya semua sama di depan hukum. Demokrasi juga mengutamakan aspek kemanusiaan dibanding aspek lainnya.

Pada kesempatan itu, Muhaimin juga mengingatkan bahwa keragaman merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, semua potensi yang dimiliki oleh seluruh kekuatan bangsa Indonesia, harus mampu dijadikan energi nasional untuk membangun bangsa.

“Apa jadinya kalau Papua atau Batak tidak ada di Indonesia. Lalu apa pula jadinya kalau Indonesia ini hanya terdiri dari suku Jawa saja. Tentu tidak akan seindah sekarang”, kata Muhaimin. □

MBO

**M**ENYINGGUNG pentingnya peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar meminta segenap bangsa Indonesia menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai spirit untuk menjadi negara maju. Sekaligus menjadi kekuatan agar bangsa Indonesia untuk mampu bersaing, berdiri sama tinggi, dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain di dunia.

Pernyataan itu disampaikan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin usai menyampaikan kuliah umum di hadapan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta. Kuliah Umum dalam rangka Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum UKI itu berlangsung di Kampus UKI Cawang,

Universitas Negeri Makasar (UNM)

# Indonesia Akan Maju dengan Lima Jatidiri



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DIHADAPAN civitas akademika Universitas Negeri Makasar (UNM), Sesjen MPR RI Ma'ruf Cahyono meminta agar semua mahasiswa selalu memegang lima jatidiri bangsa. Yaitu, bangsa yang religius, berperikemanusiaan, memegang persatuan, kerakyatan, dan berkeadilan.

Pernyataan itu disampaikan Sesjen MPR saat memberikan sambutan pada acara Dies Natalis ke-19 Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia (HMPI). Acara tersebut berlangsung di Teater Room, Gedung Pinisi UNM, Kamis (3/5). Hadir pada acara tersebut Rektor UNM Prof. Dr. Husain Syam M.Tp., serta Ketua Umum HMPI periode 2018-2020 Andi Fajar Asti, M.Pd.

Kelima jatidiri itu, menurut Ma'ruf, sudah ada dalam diri setiap bangsa Indonesia. Sehingga tidak perlu ada butir-butir yang mengaturnya. Dan, jangan sampai bertanya lagi mana jatidiri yang lima itu. "Sedih rasanya kalau ada generasi baru yang tidak hafal Pancasila, apalagi tidak paham soal jatidiri bangsa," kata Ma'ruf.

Indonesia yang religius, kata Ma'ruf, adalah cita-cita yang harus dicapai. Selain melaksanakan ajaran agamanya, setiap warga negara harus menghormati ajaran agama orang lain. Sila kedua menginginkan

bangsa Indonesia menjadi manusia yang humanis. Tidak gampang tersulut untuk menyakiti orang lain, apalagi sampai membunuh dan memutilasi.

"Kalau di UNM begitu, di Makasar begitu, dan 34 provinsi seperti itu, niscaya Indonesia ini aman", kata Ma'ruf lagi.

Indonesia, kata Ma'ruf, adalah generasi yang bersatu. Karena itu kita tidak akan mudah bertikai, karena hal-hal kecil. Bangsa Indonesia akan terus membangun dirinya demi kepentingan nasional atau national interesting.

"Indonesia yang demokratis, rakyatnya memegang kekuasaan dengan jalan musyawarah. Disertai keadilan sosial bagi semua adalah cita-cita yang ingin dicapai. Indonesia yang maju adalah Indonesia yang lima jatidiri itu", sebut Ma'ruf.

Bangunan politik yang dilaksanakan di Indonesia, menurut Ma'ruf, sesuai dengan inspirasi rakyat. Karena DPR dipilih rakyat, Presiden dan kepala daerah juga dipilih oleh rakyat. Bahkan, pembuatan UU yang dulu berada di tangan presiden kini juga sudah menjadi kewenangan DPR. Semua itu memperlihatkan bahwa rakyatlah yang paling berdaulat di Indonesia.

Sebelumnya, Rektor UNM Prof. Dr. Husain Syam M.Tp., dalam sambutannya me-

ngatakan, dunia industri akan semakin merambah dunia, tak terkecuali Indonesia. Akibatnya, tenaga kerja manusia akan terpinggirkan, dan digantikan robot. Diperkirakan, sebanyak 1,5 miliar pekerjaan hilang, diambil alih oleh robot.

Persoalannya, banyak mahasiswa yang belum siap menghadapi era industrialisasi yang makin besar merambah ke Indonesia. Mereka masih bersikap seperti era dahulu, sebelum industrialisasi, sehingga terancam akan jadi penonton.

"Kondisi ini harus disebar luaskan, kita semua harus bersiap menghadapi risiko industrialisasi yang makin besar. Kita butuh *transfer of knowledge* agar bisa sejajar dengan bangsa lain, dan tidak sekedar



menjadi penonton dalam kemajuan zaman", ujar Husain Syam.

Karena itu, sangat penting bagi para mahasiswa untuk memahami nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan nenek moyang. Karena dalam alur industrialisasi juga akan datang nilai-nilai dari luar, yang belum cocok dengan bangsa Indonesia.

Selain menyampaikan sosialisasi, kehadiran Ma'ruf di UNM juga dimanfaatkan untuk menyaksikan pembukaan Wisata Pendidikan Nasional 2018. Di UNM, kegiatan Wisata Pendidikan Nasional ini dilaksanakan tiap tahun untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Berbagai lomba diselenggarakan untuk meramaikan acara tersebut. Salah satunya adalah lomba kemampuan para guru. □

MBO

## Sulawesi Barat

# MPR Gelorakan Empat Pilar melalui “Pesona Seni Pesisir”

PANTAI Labuang Majene, Sulawesi Barat, Kamis malam (10/5/2018), tampak semarak bagaikan pasar malam. Di tepi pantai itu berdiri sebuah panggung dan tenda yang memang dipersiapkan untuk pertunjukan kesenian. Ratusan warga masyarakat dari Kota Majene dan sekitarnya berdatangan ke sana. Begitu pula para pedagang kecil memanfaatkan keramaian itu untuk mendulang rezeki.

Malam itu, di Pantai Labuang Majene, MPR

Anas dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pagelaran Seni Budaya Nusantara ini adalah salah satu dari tujuh program sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui kebudayaan. MPR mengambil peran melaksanakan sosialisasi Empat Pilar dari sabang sampai merauke dengan tujuan agar gelora dan semangat Empat Pilar melalui seni budaya bisa mengembalikan lagi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sampai ke seluruh rakyat Indonesia.

pagelaran budaya tingkat nasional dan internasional. Selain sebagai tempat untuk mempromosikan budaya yang kita miliki ke seluruh dunia.

Sementara Iskandar, mewakili Bupati Majene, dalam sambutannya menyatakan, sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui Pagelaran Seni Nusantara di Pantai Labuang ini sangat strategis. Ia berharap, melalui payung Empat Pilar masyarakat Majene yang majemuk tidak terpecah belah.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RI bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Majene mengadakan pertunjukan kesenian yang dikemas dalam sebuah acara Pagelaran Seni Budaya Nusantara. Pagelaran bertema “Pesona Seni Pesisir” diselenggarakan dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR ini memang diperuntukkan buat masyarakat penggemar seni budaya tradisional di Majene dan sekitarnya.

Pagelaran Seni Budaya Nusantara yang diselenggarakan di Majene ini termasuk salah satu metode sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Hadir anggota MPR RI dari kelompok DPD RI Muhammad Asri Anas; Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Majene, Iskandar; Kapolres, Dandim, serta pejabat tingkat kecamatan dan desa.

Mewakili pimpinan MPR RI, Muhammad Asri

Anas yang juga Pimpinan Badan Anggaran MPR itu menjelaskan, sosialisasi Empat Pilar sengaja menggunakan media seni budaya untuk membangkitkan kembali kesenian lokal yang semakin tergerus oleh seni budaya dari luar. Dia berharap agar Kabupaten Majene bisa menjadi kota pendidikan, kebudayaan, dan kesenian. Untuk itu, Asri Anas mengajak masyarakat Majene untuk bersama-sama berusaha dan memperjuangkan agar gedung kesenian di Kota Majene bisa betul-betul terwujud.

Dengan memiliki Gedung kesenian, menurut Asri Anas, kita bisa menghidupkan seni budaya serta menggali nilai-nilai dasar seni budaya asli Indonesia. “Seni budaya warisan leluhur yang sudah diakui dunia harus kita dilestarikan,” ujar Asri Anas. Gedung kesenian, menurut Asri Anas, juga dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan

Iskandar mengapresiasi usulan Asri Anas agar pemerintah setempat dapat membangun sebuah Gedung Kesenian di Kota Majene.

Iskandar juga mengucapkan terimakasih kepada Setjen MPR RI yang telah memilih Pantai Labuang sebagai tempat sosialisasi Empat Pilar MPR RI. “Mudah-mudahan melalui pagelaran seni ini dapat membuat masyarakat Majene semakin memahami Empat Pilar. Serta mendukung berdirinya Gedung Kesenian di Majene,” ujarnya.

Pagelaran seni budaya di Pantai Labuang menampilkan berbagai jenis kesenian daerah di Sulawesi Barat, yaitu: Teater Flamboyan Mandar, Sanggar Seni Bura, Rebana Api-api, Komunitas Sure ‘Bolong’, Ladang Tari Sossorang, One Do (Polewali Mandar). □

JAZ

## Prambanan

# Perlu Pemahaman Mendalam Tentang Indonesia

Dengan mengetahui secara mendalam negaranya maka warga negara akan semakin cinta dengan negaranya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan warga negaranya tidak mengerti akan negaranya. Indonesia tidak boleh menjadi asing bagi warga negaranya.

“Negara harus menjelaskan dirinya, ideologinya, undang-undang dasarnya, hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Dengan mengetahui secara mendalam negaranya maka warga negara akan semakin cinta dengan negaranya,” kata Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi Empat

Pilar MPR di GOR Manisrenggo, Kecamatan Prambanan, Minggu (6/5/2018).

Karena alasan-alasan itulah, kata Hidayat Nur Wahid, MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi ini dimaksudkan agar warga negara memiliki pemahaman mendalam tentang Indonesia sehingga menumbuhkan cinta kepada negara.

“Kalau Indonesia semakin baik dan bagus kita akan semakin cinta. Kalau Indonesia mengalami darurat narkoba, darurat korupsi, kita perlu melakukan kritik dan perbaikan,” ujarnya.

Pemahaman terhadap negara itu diperlukan, kata Hidayat, karena ada yang mulai lupa akibat perkembangan yang terjadi. Dia memberi contoh negara besar dan maju seperti Uni Soviet bisa terpecah menjadi beberapa negara. “Setelah glasnost dan perestroika, Uni Soviet bisa pecah karena ideologi komunis adalah ideologi yang diimpor,” ujarnya.

Sesungguhnya, menurut Hidayat, Indonesia yang merupakan negara kepulauan lebih rentan untuk terpecah. Sama seperti glasnost dan perestroika di Uni Soviet, namun reformasi di Indonesia tidak membuat Indonesia terpecah. “Mengapa kita tidak bubar? Karena kita mempunyai ideologi (Pancasila) yang menyatukan para tokoh dan anak bangsa,” jelas Hidayat.

Karena itu, Hidayat menambahkan Sosialisasi Empat Pilar MPR ini adalah untuk memahami bahwa Indonesia adalah milik semua. “Kita perlu mengenal lebih dalam (tentang Indonesia) supaya tidak mengalami perpecahan seperti Uni Soviet,” tandasnya.

Di sela menyampaikan materi, Hidayat mengajukan sejumlah pertanyaan kepada peserta, namun tidak bisa dijawab secara lengkap. “Tanggal dan jam berapa, serta tahun berapa hijriyah Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang bisa menjawab secara tepat, hadiahnya berangkat umrah,” tanyanya dari atas podium. Beberapa peserta antusias menyampaikan jawaban, tapi tak satu pun yang tepat.

Hidayat kemudian mengajukan kuis lagi, dengan iming-iming hadiah bagi yang bisa menjawab secara tepat. “Apa penyebab Uni Sonyet almarhum?” tanya Hidayat. Sayangnya, beberapa peserta jawabannya tidak persis seperti yang dikehendaki politikus senior dari PKS itu.

Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diikuti sekitar 400 peserta yang memenuhi GOR merupakan kerjasama MPR RI dengan Komunitas Pencinta Sunnah Rosul (KPSR). Turut berbicara sebagai narasumber anggota MPR Fraksi PKS, Sukamta. □

BSC



LCC DKI Jakarta

# Ma'ruf Cahyono: Jaga Jatidiri Bangsa Jangan Sampai Hilang

**S**EKRETARIS Jenderal (Sesjen) MPR RI Ma'ruf Cahyono, SH., MH., Kamis sore (3/4/2018), membuka secara resmi putaran final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi DKI Jakarta. Acara ini berlangsung di Aula Kampus SMK Negeri 1 di Jl. Budi Utomo, Jakarta Barat. Dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Drs. H. Bowo Irianto, MM.; Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang juga Ketua Panitia Pelaksana LCC Drs. H. Suharno, M.Pd.; Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP dan SMA Drs. Sulaksono, MPd.; serta Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi Setjen MPR Tugiyana dan Kepala Bagian Pengamanan MPR Drs. Riskandar.

LCC Empat Pilar merupakan salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar MPR memang diperutukkan bagi siswa-siswi SLTA. Untuk LCC Empat Pilar DKI Jakarta tahun ini pihak panitia penyelenggara melakukan seleksi terhadap 51 tim (setiap tim terdiri dari 10 orang) dari 51 SLTA yang ada di wilayah DKI Jakarta. Hasilnya, keluar sembilan tim dari sembilan sekolah yang maju ke babak putaran final yang berlangsung dua hari (3 dan 4 Mei 2018).

Kesembilan tim itu adalah SMA Negeri 8, SMA Negeri 34, SMA Negeri 26, SMA Negeri 81, SMA Negeri 58, SMA Negeri 99, SMA Negeri 61, SMA Negeri 84, dan SMA Negeri 78 Jakarta. Pemegang gelar juara pertama dalam lomba ini akan mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam putaran final LCC Empat Pilar tingkat nasional di Jakarta, Agustus mendatang.

Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi ke-18 yang menyelenggarakan LCC Empat Pilar tingkat provinsi. Dan, LCC DKI Jakarta ini termasuk istimewa, karena baru satu-satunya LCC dari sekian banyak LCC tingkat provinsi yang telah diselenggarakan diadiri langsung oleh Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono.

Mendengar laporan Ketua Panitia Pelaksana LCC bahwa sembilan peserta ini



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

merupakan hasil seleksi dari 51 sekolah yang ada di DKI Jakarta, Ma'ruf menyatakan, itu artinya sosialisasi Empat Pilar dengan metode LCC ini sudah sampai pada tataran sekolah-sekolah. "Ini yang kita harapkan," ujar Ma'ruf dalam sambutannya.

Menurut Ma'ruf, LCC adalah salah satu dari sekian banyak metode untuk membunikan nilai-nilai kebangsaan. MPR akan terus membunikan nilai-nilai kebangsaan ini karena tantangan ke depan akan semakin berat. Untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, lanjut Ma'ruf, kita harus memiliki dua modal, yakni ketahanan ideologi dan daya saing.

Dari segi daya saing, kata Ma'ruf, mau tidak mau kita juga harus bersaing dengan saudara kita sendiri dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Maka, "Di sinilah pentingnya jatidiri, dan jatidiri harus berada pada setiap warga bangsa Indonesia," katanya. Karena yang menjadi kekhawatiran generasi tua, menurut Ma'ruf, adalah jangan sampai nilai-nilai baik menjadi hilang, atau menjadi perilaku yang bukan karakter bangsa kita.

"Kalau ada warga bangsa yang tak takut nilai-nilai itu hilang maka patut dipertanya-

kan," tegas Ma'ruf. Untuk itu, kepada para siswa, peserta LCC Empat Pilar, Ma'ruf berharap, nilai-nilai luhur harus terus kita jaga agar jangan sampai hilang. Oleh karena itu, tambah Ma'ruf, ilmu yang diserap dari sosialisasi Empat Pilar model LCC Empat Pilar ini tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tapi harus berlanjut pada tataran pelaksanaan.

Sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Drs. H. Bowo Irianto, MM., dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada MPR yang telah menyelenggarakan LCC ini. Kegiatan ini, menurut Bowo Irianto, sangat dibutuhkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. "Karena tantangan ke depan semakin berat, dan krisis sosial akan semakin gawat," kata Bowo Irianto.

Jum'at (4/4/2018), juga bertempat di Aula SMK Negeri 1 Jakarta, kesembilan tim peserta akan bertarung memperebutkan satu tiket untuk maju ke putaran final LCC Empat Pilar tingkat nasional. Menurut rencana Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono termasuk salah satu juri pada lomba tersebut. □

SCH

Kalimantan Timur

# MPR Safari Ramadan di Balikpapan dan PPU

**W**AKIL Ketua MPR Mahyudin melakukan safari Ramadan ke pesantren, jamaah masjid, dan masyarakat yang berada di Balikpapan dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kunjungan pertama Mahyudin di Balikpapan adalah bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Islam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Di pesantren yang beralamat di Karang Joang, Balikpapan Utara itu, Mahyudin bertemu dengan 300 santri. "Selain Sosialisasi Empat Pilar, kita ke sini juga untuk silaturahmi," ujarnya, 19 Mei 2018. Dia mengatakan, MPR rajin masuk ke pesantren untuk menyosialisasikan Pancasila",

Di hadapan santri yang semuanya memakai baju putih itu, Mahyudin yakin para santri yang ada berpaham *ahlus sunnah waljamaah*. Dia berharap agar generasi muda tidak terkontaminasi dengan paham yang salah. Agar tak terkontaminasi dengan paham yang salah maka MPR melakukan sosialisasi Pancasila di pesantren. "Kami antisipasi pemahaman yang salah dengan Pancasila," paparnya.

Kepada wartawan Mahyudin mengatakan bahwa program sosialisasi seperti ini sudah lama dilakukan oleh MPR. "Dan, sekarang masyarakat semakin sadar akan pentingnya ideologi Pancasila," ujarnya. "Di bulan puasa

narkoba," paparnya. Dia menegaskan, para santri harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menguasai ekonomi.

Selepas melakukan buka puasa di Pesantren Al Banjari, Mahyudin menuju ke *Islamic Center*. Di pusat pengembangan Islam yang dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan itu, Mahyudin tidak hanya menunaikan sholat taraweh, namun juga memberi *kultum* kepada jamaah. Dalam *kultum*-nya, pria asal Kalimantan Timur itu mendoakan agar Balikpapan aman. "Doa ini penting, sebab diakui di beberapa kota telah terjadi terorisme," ujarnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ujarnya. Sosialisasi telah dilakukan MPR ke seluruh elemen masyarakat dengan beragam metode. "Untuk sosialisasi ke pesantren perlu ditingkatkan, apalagi ada tantangan kebangsaan seperti adanya terorisme," ujarnya.

Untuk menangkal terorisme, menurut politisi dari Partai Golkar, itu perlu keterlibatan semua pihak. "Saya kira kita perlu bersama untuk menangkal terorisme," paparnya. Meski demikian, dia menegaskan, tidak setuju apabila terorisme dikaitkan dengan Islam. "Saya percaya terorisme bukan ajaran Islam," ungkapnya. Dia mengharapkan agar MUI mengeluarkan fatwa tentang terorisme. "Jangan dikaitkan Islam dengan terorisme," tegasnya.

ini kita perkuat *ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basariyah*", tambahnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Heti Latifah, yang ikut menjadi narasumber dalam sosialisasi itu menuturkan bahwa mereka yang berada di Al Banjari harus bangga menjadi santri, sebab sebelum Indonesia merdeka santri ikut berjuang memerdekakan Indonesia. "Banyak santri diangkat menjadi pahlawan," ujarnya.

Heti Latifah mengajak para santri untuk terus memperjuangkan cita-cita pendahulunya, namun dengan cara kekinian. "Berjuang di zaman sekarang lebih sulit karena musuh tak seperti pada masa lalu," ungkapnya. "Musuh kita sekarang seperti kemiskinan dan

Menurut Mahyudin, ada ideologi yang mendompleng Islam untuk melakukan tindak kekerasan. "Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*," ujarnya. Dikatakan ummat Islam tidak pernah melakukan kekerasan atau pembunuhan. Ia memberi contoh pembunuhan yang dilakukan Hitler dan genosida di Bosnia dan Rohinya dilakukan bukan oleh umat Islam. "Umat Islam malah sering menjadi korban," tegasnya.

Untuk menjaga agar kejadian kemanusiaan tak terulang, MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar. "Saya keliling Indonesia untuk menyampaikan Empat Pilar," ujarnya. "Empat Pilar intinya adalah menjaga persatuan bangsa," tambahnya. Di Indonesia banyak agama. Sebagai negara Pancasila, semua



yang tinggal di Indonesia wajib beragama. “Yang tak beragama tak boleh tinggal di Indonesia,” tegasnya.

Dalam kesempatan Mahyudin mengingatkan, agar kita berhati-hati dalam bertindak. “Jangan suka menyebarkan *hoax*,” harapnya. “Yang aneh-aneh jangan di-*copy paste* kemudian di-*share*,” ucapnya.

Lebih lanjut dalam pesannya, Mahyudin berharap agar umat Islam meningkatkan amalan selama bulan puasa. Dirinya senang melihat selama bulan puasa, umat Islam rajin

beribadah, seperti sholat taraweh, membaca Alqur’an dan berinfaq. “Bulan puasa bulan penuh berkah dan ampunan,” ujarnya. Meningkatnya ibadah ini diharapkan dapat dipertahankan hingga selepas puasa. “Puasa adalah bulan untuk melatih diri. Beruntunglah orang yang selepas puasa menjadi orang yang lebih baik,” ujarnya.

Hari kedua Safari Ramadan di kota minyak itu, 20 Mei 2018, Mahyudin menjelang buka puasa mengunjungi Masjid Al Munawar. Di masjid yang berada di perempatan besar

Kota Balikpapan itu, dia memberi tauziah menjelang buka.

Di hadapan ratusan jamaah, saat tauziah, alumni Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, itu menuturkan jihad bisa dilakukan lewat berbagi harta. Bila tetanggamu tak punya beras, beri dia beras. Jihad dengan berbagi harta, menurutnya, tepat dilakukan di Indonesia sebab masih banyak rakyat yang belum menikmati dampak pembangunan. Masih ada masyarakat yang belum menikmati listrik, pendidikan yang berkualitas, dan jaminan kesehatan yang memadai. “Masih ada orang yang tak mampu berobat sehingga meninggal dunia,” ucapnya. “Sehingga jihad sekarang adalah memberantas kemiskinan,” tegasnya.

Pria berdarah Bugis dan Banjar itu menyebut ada disparitas pembangunan di Jawa dan luar Jawa. Salah satunya dalam dunia pendidikan. “Pendidikan di Jawa sangat berkualitas sementara di luar Jawa masih ketinggalan,” ungkapny. “Seharusnya kualitas pendidikan di manapun harus sama,” tegasnya. Hal-hal demikianlah yang menurut Mahyudin perlu diselesaikan. Menyelesaikan masalah kesenjangan, menurut Mahyudin, merupakan amanah konstitusi. Negara



harus bisa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam acara silaturahmi dan Sosialisasi Empat Pilar tersebut, Mahyudin menyatakan, sebenarnya bangsa Indonesia memiliki jiwa gotong royong, namun sifat yang demikian mulai terkikis. “Sekarang tumbuh budaya individualis, tak peduli pada yang lain,” paparnya. Hal demikian bisa terjadi, menurut mantan Bupati Kutai Timur itu, karena budaya global.

Untuk itulah, lanjut Mahyudin, MPR melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Tugas ini merupakan perintah UU MD3,” ujarnya. Soal Pancasila, dulu pada masa Orde Baru ada Penataran P4 dan pelajaran PMP. “PMP mengajarkan kita tentang toleransi, tertib, dan saling menghormati,” paparnya. Sayang dalam masa itu, secara bersamaan pemerintah menggunakan Pancasila untuk kepentingan politik.



Akibatnya, Penataran P4, BP7, PMP, dan semua hal yang terkait Pancasila dibubarkan.

Seiring perjalanan waktu, rupanya rakyat menginginkan penguatan Pancasila. “Untuk itulah MPR melakukan sosialisasi Empat Pilar,” tegasnya. Tentu dengan metoda yang berbeda dengan masa lalu.

Selepas Safari Ramadan di Balikpapan, Mahyudin melanjutkan perjalanannya ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Di kabupaten yang berada di seberang Balikpapan itu, dirinya bertatap muka dengan ratusan warga di sana. Pertemuan yang dilakukan di Graha Pemuda itu dalam rangka



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sosialisasi Empat Pilar dan buka puasa bersama.

Dalam sosialisasinya, Mahyudin menyebut tantangan-tantangan kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia. “Krisis kepercayaan rakyat kepada pemimpin merupakan salah satu tantangan kebangsaan,” ujarnya. Dipaparkan banyak kepala daerah, aparaturnya penegak hukum bahkan ketua lembaga negara ditangkap KPK. Sebagai pejabat negara seharusnya mereka menjadi negarawan, melayani publik. Namun sangat disayangkan mereka menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat, karena melakukan tindak korupsi. “Seharusnya mereka menjadi teladan bagi masyarakat,” tegasnya. Untuk itu, Mahyudin berharap, korupsi disudahi agar masyarakat tidak hilang kepercayaan pada pemimpin.

Lebih lanjut dipaparkan, lunturnya nilai-nilai luhur di masyarakat juga disebabkan dampak globalisasi. “Globalisasi merupakan salah satu tantangan kebangsaan,” ungkapnya. Ciri dari globalisasi adalah mengubah sifat gotong royong menjadi individualistik. “Di

antara kita ada yang tidak peduli pada yang lain,” ujar pria asal Kalimantan Timur itu.

Tantangan-tantangan kebangsaan yang ada, tutur Mahyudin, dijawab oleh MPR dengan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR melakukan sosialisasi untuk menyegarkan dan mengingatkan kembali nilai-nilai luhur bangsa. Bila bangsa ini menjadikan nilai-nilai luhur sebagai bagian dari keseharian maka bangsa ini akan dihormati oleh bangsa lain. Dirinya menyebut nama Soekarno banyak dijadikan nama jalan di Afrika. “Setelah Soekarno melakukan KAA di Bandung pada 1955 banyak negara Afrika merdeka,” ujarnya. “Karena Soekarno menjalankan amanat konstitusi maka ia dihormati oleh negara-negara di Afrika dan Asia,” paparnya.

Dari sinilah MPR melakukan sosialisasi. “Kita keliling Indonesia untuk sosialisasi,” tegas mantan Bupati Kutai Timur itu. “Tugas kita untuk saling mengingatkan”, tambahnya. □

AWG



## Rapat Pimpinan MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PIMPINAN MPR RI dengan didukung Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) MPR RI, Rabu (23/5/2018). Rapim yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, ini dihadiri Ketua MPR RI yang juga Pimpinan Rapim Zulkifli Hasan, para Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, EE, Mangindaan, Ahmad Basarah, Muhaimin Iskandar, Ahmad Muzani, Sesjen MPR RI Ma'rif Cahyono, dan pejabat teras Setjen MPR RI.

Rapim digelar untuk membahas program-program kegiatan Pimpinan MPR RI, seperti penerimaan audiensi masyarakat,

pemerintah dan lembaga negara serta negara sahabat, acara buka puasa bersama berbagai elemen masyarakat. Juga membahas momen-momen acara besar nasional yang akan digelar MPR, seperti Sidang Tahunan MPR, Peringatan Hari Konstitusi, Peringatan HUT MPR (Jalan Sehat MPR dan MPR Berzikir).

Dalam Rapim itu para Pimpinan MPR bersepakat agar kegiatan-kegiatan tersebut berjalan lancar dan memberikan sesuatu yang baik buat rakyat dan bangsa. □

DER

## Booth Stand MPR Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2018 Medan

HUMAS Sekretariat Jenderal MPR RI membuka booth stand MPR RI di momen acara Festival Konstitusi dan Antikorupsi kerjasama MPR, MK, dan KPK serta Universitas Sumatera Utara (USU). Acara berlangsung di Auditorium USU Medan, Selasa (15/5/2018).

Letak booth stand MPR sangat strategis, tepat berada di sebelah kanan pintu masuk utama auditorium. Tampilannya apik membuat membuat banyak pengunjung tertarik berminat mampir. Dan, luar



biasa, sebagian besar (sekitar 98%) pengunjungnya adalah mahasiswa dan mahasiswi.

Melihat respon luar biasa dari pengunjung mahasiswa itu, Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah sampai turun tangan membantu staf Humas yang sudah kewalahan melayani berbagai pertanyaan dan permintaan informasi seputar MPR RI. Buku-buku, pamflet tentang MPR, TAP MPR, UUD NRI Tahun 1945 yang disediakan habis 'diserbu' pengunjung.

Suasana kian ramai ketika, ketika Ibu Siti Fauziah yang akrab di sapa Bu Titi itu membuka sesi kuis dengan pertanyaan seputar MPR RI dan kebangsaan. Yang membuat kagum, ternyata mahasiswa pengunjung mampu menyebutkan nama-nama Pimpinan MPR. "Walaupun sering terbalik-balik dan tertukar antara Pimpinan MPR dan DPR, tapi mereka berupaya keras mengingat dan menyebutkan Pimpinan MPR secara berurut dan tepat," ujar Siti Fauziah.

Para pengunjung mahasiswa juga banyak mengetahui berbagai metode penyampaian Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang memang sedang digencarkan MPR RI ke seluruh daerah. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Zainudin Amali**, Ketua Komisi II DPR

## Kita Perbaiki Sistem Pilkada Langsung

**O**ADA April 2018, publik diramaikan dengan wacana mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi ke DPRD. Pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan pemilihan melalui wakil-wakil rakyat di DPRD. Dengan wacana tersebut maka pemerintah dan DPR harus melakukan revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Wacana ini muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, pada Jumat (6/4).

Wacana tersebut muncul karena pemilihan langsung oleh masyarakat pada kenyataannya banyak menimbulkan permasalahan. Salah satu persoalan mendasar terkait dengan besarnya biaya kampanye dan biaya penyelenggaraan Pilkada. Berdasarkan data dari Kemendagri, biaya penyelenggaraan Pilkada langsung bisa mencapai Rp 18 triliun. Belum lagi biaya dikeluarkan para calon kepala daerah. Tingginya biaya politik itu berujung pada banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Korupsi yang dilakukan kepala

daerah terpilih sulit dibantah adalah untuk mengembalikan modal kampanye.

Wacana mengubah sistem pemilihan kepala daerah secara langsung kembali ke pemilihan melalui DPRD menuai pro dan kontra di masyarakat. Untuk menanggapi lebih jauh persoalan ini, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali angkat bicara. Berikut percakapan dengan politisi Partai Golkar itu seputar wacana dikembalikannya pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

**Saat ini ada wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD. Bagaimana pendapat Bapak?**

Saya meyakini bahwa jika dilihat dari kacamata demokrasi kita maka pemilihan kepala daerah secara langsung lebih baik dibandingkan kita kembalikan lagi pemilihan melalui DPRD. Kalau pemilihan kepala daerah secara langsung menimbulkan eksekse-eksekse negatif, maka eksekse-eksekse negatif itulah yang mesti diperbaiki bukan mengubah sistem pemilihannya. Misalnya, dalam soal biaya kampanye dalam Pilkada langsung. Sebenarnya banyak item dari biaya kampanye itu yang bisa dikurangi, bahkan

dihilangkan. Itu tidak berarti mengubah sistem pemilihannya.

Selain eksekse biaya politik yang tinggi, ada juga yang mengatakan Pilkada langsung menyuburkan *money politics* di masyarakat. Lantas, apakah ada jaminan kalau dilakukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak ada *money politics*? Menurut saya, untuk menghilangkan *money politics* itu maka partai-partai politik harus dibenahi lebih dulu. Yaitu, bagaimana partai politik memilih dan mengajukan calon-calon kepala daerah yang benar-benar memiliki kemampuan memimpin, karakter kerakyatan, memiliki program, serta tidak tergoda untuk melanggar hukum dan sebagainya.

Saya melihat dalam pemilihan secara langsung selama ini telah menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas. Saya beri contoh Tri Rismaharini (walikota Surabaya), Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Emil Dardak (Bupati Trenggalek), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng). Mereka memiliki kemampuan memimpin dan melakukan inovasi untuk mengangkat dan memajukan daerahnya. Juga Joko Widodo, dari Walikota Solo kemudian terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang menjadi presiden.



**Kalau begitu bukan sistem pemilihan kepala daerah yang menjadi persoalan?**

Iya, bukan soal sistem Pilkada-nya yang salah. Bukan mekanisme pemilihan secara langsung yang menjadi masalah. Karena itu, mari kita duduk bersama. Apa yang menjadi persoalan selama ini. Apakah karena biaya politiknya yang tinggi? Kita lihat unsur-unsur atau item-item biaya yang bisa ditekan atau dikurangi. Sekali lagi, saya meyakini bahwa Pilkada secara langsung yang bisa menjamin pelaksanaan demokrasi di negara ini bisa berjalan sesuai dengan tuntutan demokrasi itu sendiri.

**Bagaimana dengan pendapat Ketua DPR Bambang Soesatyo yang menginginkan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD?**

Saya belum dengar secara langsung dari beliau. Karena itu, saya tidak ingin untuk memberi pendapat atau komentar terhadap pendapat orang lain. Kalau saya ditanya soal pemilihan kepala daerah maka itulah pendapat saya yang tidak terikat atau terkait dengan pihak manapun.

**Untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah ini, maka perlu**

**membenahi partai politik lebih dulu. Misalnya soal “mahar” dalam pencalonan kepala daerah. Apakah perlu merevisi UU Partai Politik?**

Kalau ingin melakukan revisi bukan revisi UU Partai Politik, tetapi revisi UU Pilkada. Revisi itu meliputi persyaratan-persyaratan pengajuan calon kepala daerah. Kita memang merasakan bahwa tidak sedikit orang baik yang layak menjadi kepala daerah namun pencalonannya tidak berproses di partai politik. Seharusnya kita terbuka saja. Yang penting seleksi di partai politik harus benar-benar dilakukan sesuai kebutuhan. Jadi bukan karena membayar “mahar” atau lainnya. Partai politik-lah sebagai benteng awalnya. Kemudian rakyat memilih secara langsung. Kalau proses awal di partai politik sudah berjalan baik, maka saya yakin Pilkada langsung akan lebih baik buat demokrasi kita.

**Apakah wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini sudah dibicarakan di Komisi II?**

Justru kami di Komisi II tidak membicarakan wacana itu. Saat ini kami masih sibuk membahas tentang peraturan KPU (PKPU).

Tidak ada wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD di Komisi II. Kita semua di Komisi II sebenarnya sudah sepakat bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itulah yang kita jalankan.

Begitu juga tidak ada pembicaraan di Badan Legislasi (Baleg). Bahkan di internal partai pun (Partai Golkar) tidak ada wacana seperti itu. Bahkan di internal partai, saya sudah menyampaikan dukungan Pilkada secara langsung. Setiap orang bisa berpendapat berbeda sesuai keyakinan argumennya. Tapi posisi di partai pun sampai saat ini adalah mendukung Pilkada secara langsung.

**Apakah dalam waktu dekat ada pembicaraan tentang wacana ini di Komisi II?**

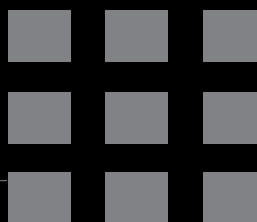
Dalam waktu dekat pun tidak ada pembicaraan tentang wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kalau saya, silakan saja orang untuk berpendapat tentang wacana itu. Tentu mereka punya *reasoning*-nya, apakah karena maraknya mahar, atau banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan tertangkap KPK. Silakan saja. Pada akhirnya pembahasan ada di Komisi II.

Tapi itulah jawaban dan pendapat saya. Dalam sistem apapun, *money politics* tetap ada. Siapa yang bisa menjamin kalau pemilihan kepala daerah di DPRD tanpa *money politics*?

**Bukankah kalau dilakukan pemilihan kepala daerah di DPRD pengawasannya (terhadap *money politics*) itu akan lebih mudah?**

Saya bertanya bagaimana pengawasannya? Saya berkeyakinan bahwa hal-hal yang dilakukan secara ilegal tidak mungkin terbuka dan transparan. Sudahlah, daripada kita mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah kepada DPRD, lebih baik kita perbaiki sistem Pilkada langsung yang sudah berjalan. □





# Menjaga Nilai *Luhur Bangsa*

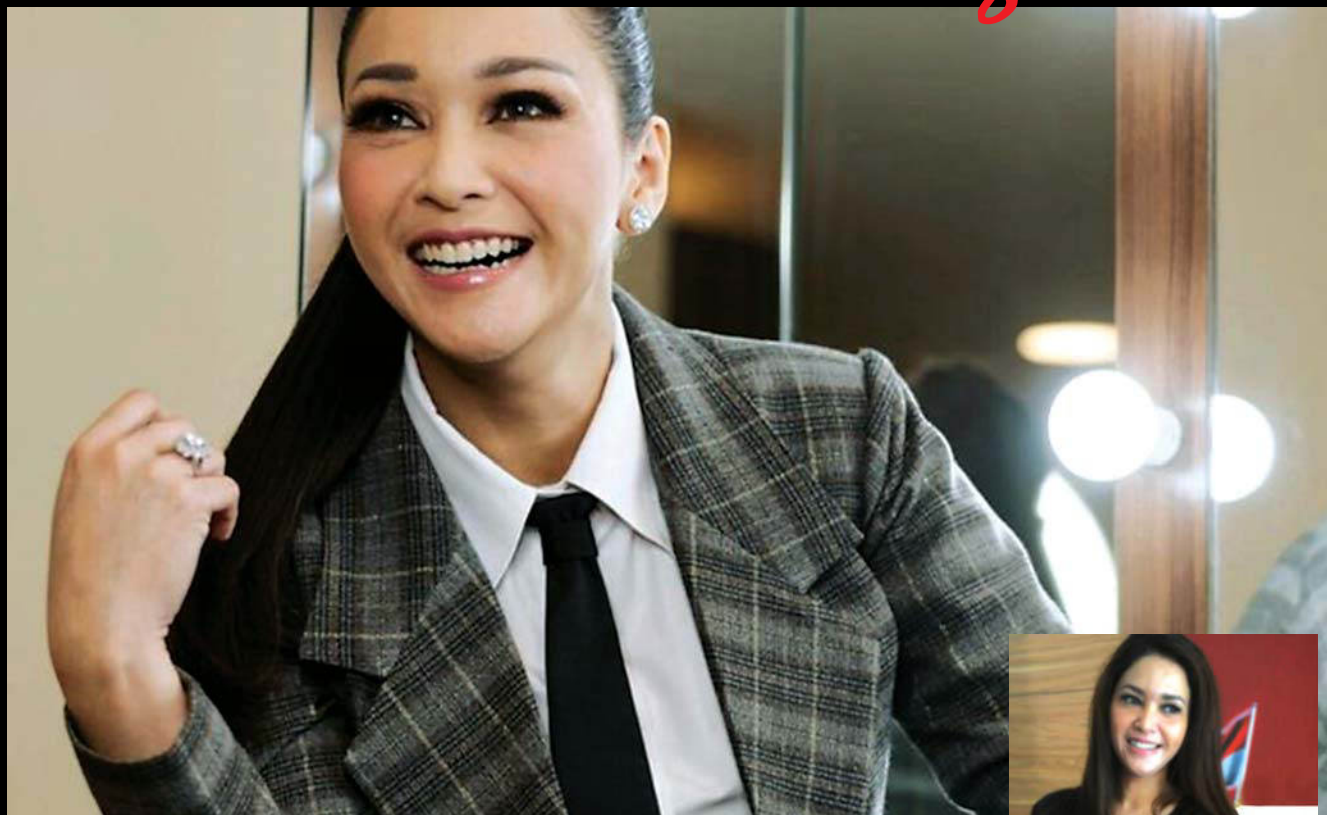


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

## *Maia Estianty*

**P**ERISTIWA terorisme berupa bom bunuh diri di beberapa tempat di Surabaya menghentak berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Betapa teganya membunuh saudara se tanah air, karena hanya berbeda keyakinan dan pemahaman.

Artis dan musisi cantik mantan personel grup musik Ratu, **Maia Estianty**, adalah salah seorang anggota masyarakat sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Dalam cuitannya di ranah media sosial, Maia mengunggah kegundahannya,

"Kejadian demi kejadian, kejadian di Mako Brimob, yang menggugurkan beberapa polisi, kejadian BOM di Surabaya, yang menewaskan saudara2, mengajak saya dan kita semua mendoakan semoga musibah demi musibah tidak ada lagi di bumi Indonesia, yang mengorbankan banyak manusia, dan semoga keluarga yg ditinggalkan senantiasa sabar, dan ikhlas. Semoga Tuhan selalu

melindungi Indonesia dari hal2 yang buruk, negatif, dendam amarah, nafsu keserakahan, kekuasaan, ingin dianggap dan bencana. Semoga Indonesia dan penduduknya di rahmati, dilindungi, diberkati dan diberkahi, dilimpahkan keselamatan, dicurahkan rejeki, kesehatan, ampunan dan perlindungan di manapun berada oleh Allah swt. Amin.

Semoga pemerintah serius menangani TERORIS, dan Teroris bukan ajaran Islam !!!!!!"

Maia berharap agar masyarakat Indonesia berpegang teguh kepada agama dengan pemahaman yang benar, dan berpegang teguh pada Pancasila. "Jangan ada lagi peristiwa seperti itu lagi yang malah akan membawa perpecahan. Tetaplah kepada satu Indonesia bersatu dan damai," katanya, di Jakarta, pertengahan Mei 2018. □

DER

## Canda Tawa Ala Aburizal Bakrie

**A**KHIR Mei 2018, di sore hari di bulan puasa, tokoh nasional dan pengusaha besar Indonesia **Aburizal Bakrie**, yang akrab disapa Ical, di rumah di wilayah Menteng, Jakarta, menerima tamu penting, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Dan, yang ditunggu pun datang.

Sembari jalan memasuki rumah untuk melakukan pertemuan tertutup, Zulkifli Hasan mengeluarkan kata canda. “Puasa tambah gemuk, ya Bang,” kata Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan. Sembari tertawa Ical pun menjawab: “Iya ni puasa malah tambah gemuk .. hahaha.”

Selanjutnya kedua tokoh ini tergelam dalam pembicaraan empat mata di ruang utama rumah kediaman Ical. Sekitar satu setengah jam kemudian, kedua tokoh ini keluar dan memberikan keterangan pers. Salah satu pertanyaan yang paling menarik diajukan oleh pers adalah soal rumor pencalonan Zulhasan di Pilpres 2019.

“Kalau Zulhasan sudah cocok jika nyalon Presiden. Tapi, gak tahu deh, Capres apa Cawapres, nggak mungkin kan diborong,” ujar Ical. Ketika didesak terus dengan pertanyaan oleh wartawan, Ical malah membalas dengan guyon. “Sudah ya, wah wartawannya banyak ya, sudah dikasi kopi belum. Ngopi dulu aja ya, tapi nanti pas magrib.. ha..ha..,” canda Ical. □

DER



**Aburizal Bakrie**



**Olivia Zalianty**

## Bangga Angkat Seni Budaya Bangsa

**A**RTIS cantik **Olivia Zalianty** ternyata sangat fasih membaca puisi. Bakat tersebut dia tunjukkan dalam acara 'Malam Budaya Baca Puisi Perempuan Untuk Indonesia' dalam rangka Hari Puisi Nasional, di Aula Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Minggu (29/4/2018). Acara ini digelar Majelis Nasional Forhati.

Bersama budayawan Nasrudin Anshari (Gus Nas), Olivia membawakan puisi karya Gus Nas berjudul: *Kartini*. Mereka tampil apik, membaca puisi tentang Kartini dari perspektif lain, yakni Kartini dengan berbagai metafor ke masa kini dan mendatang.

Duet Gus Nas dan Olivia sangat memberi kesan tersendiri. Seperti diketahui, Olivia dan Gus Nas telah menggelar berbagai acara baca puisi dalam format pertunjukan yang atraktif, antara lain di Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Ini ini digelar dalam rangka peringatan Heritage World Day.

“Saya sangat bangga bisa membacakan puisi sebagai salah satu seni budaya bangsa yang harus dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa,” katanya usai acara. □

DER

Kota Bukittinggi



# Mengenal Kekejaman Penjajah Melalui Lubang Jepang

**D**IBALIK Bukit Barisan yang membujur di sepanjang pulau Sumatera, tepatnya sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang, terdapat kota nan *rancak*. Masyarakatnya ramah bersahaja, tetap memegang teguh adat istiadat, meski arus budaya dari luar menerpa tiada henti. Keasrian alamnya masih terjaga. Hutan nan lebat dan air bening yang melimpah adalah pemandangan yang mengasyikkan.

Itulah Kota Bukittinggi, sebuah kota berhawa sejuk di Provinsi Sumatera Barat. Kota yang memiliki kaitan sejarah yang sangat kental dengan masa awal berdirinya Negara Kesatuan Negara Indonesia. Bukittinggi juga dikenal sebagai kota wisata. Di daerah itu terdapat banyak obyek wisata. Beberapa diantaranya malah melegenda dan menjadi icon kota Bukittinggi. Sebut saja Jam Gadang, Pasar Ateh, Ngarai Sianok, dan Lubang Jepang.

Lokasi wisata yang disebut paling akhir itu menyimpan misteri dan juga keindahan alam. Selain itu Lubang Jepang (Jepang) juga

menyimpan sejumlah rahasia kekejaman penjajah Jepang. Konon, semua tahanan yang pernah dipenjara di sana tidak pernah bisa keluar lagi.

Di sebut Lubang Jepang, karena tempat wisata berbentuk gua buatan ini memang diprakarsai dan dibuat pada zaman pendudukan penjajah Jepang, sekitar 1942. Lubang Jepang berfungsi sebagai sebuah terowongan (bunker) dan perlindungan untuk kepentingan pertahanan. Selain itu, Lubang Jepang juga dibangun sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang.

Panjang asli Lubang Jepang ini diperkirakan mencapai 8 km sehingga dikenal sebagai terowongan terpanjang di Asia. Tetapi yang dijadikan sebagai kawasan wisata hanya mencapai 1.400 m. Di dalam lubang itu terdapat 21 lorong dengan fungsinya masing-masing. Mulai dari ruang amunisi, ruang pertemuan, lubang pelarian, lubang mata-mata, dapur, serta penjara.

Obyek wisata peninggalan penjajah

Jepang ini berada di posisi yang strategis, di tengah kota Bukittinggi. Terdapat beberapa pintu masuk ke Lubang Jepang ini, diantaranya terletak pada kawasan Ngarai Sianok, Taman Panorama, di samping Istana Bung Hatta, dan di Kebun Binatang Bukittinggi.

Tanah yang menjadi dinding terowongan ini dipercaya memiliki kekuatan tersendiri, karena terdiri dari jenis tanah yang jika bercampur dengan air akan semakin kokoh. Terbukti, ketika Sumatera Barat diguncang gempa pada 2009, Lubang Jepang ini tidak banyak terpengaruh. Hanya ada beberapa lapisan semen bagian luar yang runtuh. Bukan bagian dinding aslinya.

Diperkirakan, lubang tersebut digali oleh ribuan tenaga kerja Romusa dari pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Para pekerja dari luar daerah itu sengaja dipekerjakan untuk menjaga kerahasiaan pembangunan lubang tersebut.

Pada 1984, Pemerintah Kota Bukittinggi mulai mengelola Lubang Jepang ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Lubang



**Ngarai Sianok**



**Lubang Jepang**



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang sebelumnya hanya memiliki tinggi 160 diperluas hingga mencapai ketinggian lebih dari 2 meter agar lebih mudah dikunjungi. Selain itu, di tempat ini juga diberi fasilitas kamera pengintai dan pencahayaan yang lebih memadai, untuk memudahkan pengunjung melihat lebih jelas seisi gua. Tak hanya itu, pemerintah juga menambahkan teralis di beberapa lorong untuk menghindari pengrusakan.

Meski sudah mendapatkan penambahan berbagai fasilitas tetapi suasana ngeri yang

ada di dalam lubang itu tak dapat dihilangkan. Apalagi jika pengunjung mengetahui bahwa di tempat itu pernah berguguran ribuan korban kerja paksa. Mereka ini dibunuh secara perlahan dengan cara dimasukkan ke dalam tahanan dan tidak diberi makan sampai akhirnya mati dengan sendirinya.

Selain perasaan ngeri, selama mengunjungi Lubang Jepang ini wisatawan juga dapat merasakan hawa sejuk. Hawa dingin ini dipengaruhi oleh kedalaman lubang yang mencapai 40 meter. Karena itu, semua

pelancong tetap merasa nyaman, sekalipun tidak dilengkapi alat pendingin udara.

Intinya, Lubang Jepang ini sangat cocok untuk istirahat bersama keluarga. Selain murah, berkunjung ke tempat tersebut akan memberikan pengalaman tersendiri bagi anak-anak. Akan lebih baik lagi jika dalam perjalanan menyusuri lubang tersebut ditemani *guide*, karena mereka akan berbagi cerita mengenai sejarah Lubang Jepang tersebut. □

**MBO**

H. Sulaeman L. Hamzah

# Di Saat Orang Katholik Menyediakan Jamuan Lebaran Bagi Orang Islam



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**D**I MANA bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itulah peribahasa yang layak disandangkan kepada H. Sulaeman L. Hamzah, anggota MPR/DPR RI Fraksi Nasdem, Dapil Papua. Lahir dan berdarah Flores, tetapi Sulaeman teramat besar cintanya terhadap tanah Papua, provinsi yang menjadi tempat tinggalnya kini.

Melalui jalur politik, Sulaeman ingin membangun Papua menjadi daerah yang lebih maju. Masyarakatnya lebih terdidik, sejahtera dan beradab, sama seperti daerah lain di Indonesia. Karena itu, selama dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi anggota DPR, selama itu pula Sulaeman akan terus memperjuangkan cita-citanya itu agar menjadi kenyataan.

“Di sana masih sangat tertinggal. Transportasi antardistrik misalnya, lebih banyak dilakukan melalui jalur udara. Makanya, di salah satu Kabupaten (Kabupaten Yahukimo) jumlah lapangan terbang jauh lebih banyak dibanding jumlah distriknya itu sendiri”, kata Sulaeman kepada Majalah *Majelis* saat menyambangi ruang kerjanya, di Gedung Nusantara I, lantai 23, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, beberapa waktu lalu.

Keinginan dan semangat H. Sulaeman untuk berpartisipasi membangun Papua demikian kuatnya. Itu bisa dilihat dari penekanan

kata-kata yang diucapkannya tiap kali menyinggung soal keteringgalan Papua. Tidak itu saja, cinta dan keinginan membangun Papua juga dia tunjukkan melalui ornamen yang terdapat dalam ruang kerjanya. Di sana tidak ada lukisan lain kecuali sepasang pahatan kayu asal Papua dan sebuah koteka.

“Bagaimanapun darah saya adalah Flores Timur, saya tidak pernah melupakan itu. Saya ikut membangun Flores, termasuk memelopori pemekaran Kabupaten Lembata. Tetapi saya sangat mencintai Papua, saya berkewajiban membangun Papua”, kata Sulaeman lagi.

Sulaeman sendiri lahir di Lembata (dulu Flores Timur), 18 Agustus 1954. Tepatnya di Kampung Lewotolok, desa Amakaka, kecamatan I Le Ape, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia adalah anak ke-6 dari 8 bersaudara pasangan Hamzah Lake dan Aminah Magi.

Pada 1970, saat usianya 16 tahun, atau setelah lulus SLTP, Sulaeman pergi berlayar ke Fakfak Irian Jaya. Perjalanan dengan menggunakan perahu layar itu berlangsung satu bulan lamanya. Sampai di sana ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri I Fakfak sembari bekerja sebagai penjaga toko dan gudang.

Selepas SMA, Sulaeman mendapat tawaran menjadi PNS, tetapi





kesempatan itu dia lewatkan. Bapak lima anak hasil pernikahannya dengan Hj. Siti Rukiah ini memilih bekerja pada perusahaan eksplorasi minyak dengan jabatan sebagai *Store Keeper*. Tugasnya, mempersiapkan logistik, dan mengirimkannya ke hutan. Dua tahun keluar masuk hutan, Sulaeman pindah ke perusahaan agen Pertamina. Pekerjaan tersebut ia tekuni, sembari kuliah di Universitas terbuka. Setelah itu, pada 1979, ia berpindah ke perusahaan kayu, mengurus ekspor kayu gelondongan.

“Berebel berbagai pengalaman itu, menginspirasi saya untuk

membuka perusahaan sendiri yang bergerak di bidang *land clearing* (membuka hutan untuk menanam coklat),” cerita Sulaeman.

### **Golkar dan AMPI**

Usaha di bidang *land clearing* itu, ternyata dilakukannya sampai pada waktu tertentu. “Setelah pekerjaan membersihkan hutan selesai, saya membuka usaha penggemukan sapi”, kata Sulaeman lagi. Sebagai pengusaha penggemukan sapi, Sulaeman mendatangkan sapi dari daerah antarpulau ke Jayapura untuk

mencukupi kebutuhan lokal.

Untuk memuluskan usahanya itu ia membina peternak-peternak lokal, untuk bersama-sama dan bekerjasama memenuhi kebutuhan sapi di Papua. Di tengah jalan, usahanya itu menghadapi persoalan ketersediaan sapi, sehingga pada 2005 ia memutuskan impor sapi potong dari Australia.

Selain menggeluti bisnis, Sulaeman juga bergabung dalam organisasi sosial dan politik. Di Fakfak, Sulaeman sempat menjadi anggota Golkar dan underbownya, yaitu Majelis Dakwah Indonesia. Ia juga sempat menjadi ketua AMPI Fakfak selama dua periode. Selain itu, ia juga sempat menjadi pengurus HKTI serta Federasi Buruh Seluruh Indonesia.

“Saya banyak ikut organisasi, karena mau lebih banyak menimba pengalaman. Melalui organisasi ini saya terus mencari ilmu, karena itu meski saya berhenti kuliah, tetapi saya tak pernah berhenti belajar”, kata Sulaeman lagi.

Setelah menetap di Fakfak selama 19 tahun, pada 1989 Sulaeman pindah ke Jayapura. Di tempat barunya ini, ia melanjutkan kebiasaannya berorganisasi. Di Jayapura ia aktif di Golkar dan AMPI, bahkan menjadi pengurus di tingkat provinsi. Selain itu, ia juga menjadi pengurus Kadin Provinsi Papua, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Papua, Ketua Dewan Pakar ICMI, dan pengurus organisasi profesi lainnya.

Aktivitasnya di Golkar membuat Sulaeman memiliki kolega di Golkar Pusat. Dan, itu memberinya keuntungan, karena saat ada pemilihan anggota MPR utusan daerah, Sulaeman-lah orang ditunjuk mewakili daerah Papua.

“Saya jadi anggota MPR mewakili utusan daerah pada periode 1999-2004. Tetapi waktu itu saya kapok, saya menemukan fakta bahwa lembaga legislatif saat itu sangat transaksional, dan itu dilakukan secara terbuka. Karena itu, saya tidak berkeinginan menjadi anggota legislatif lagi”, kata Suleman lagi.

Namun, manusia hanya bisa merencana, Tuhan-lah yang menentukan. Saat ormas Nasional Demokrat (Nasdem) berdiri, ia diminta untuk mendirikan ormas tersebut di Papua. Setahun kemudian ormas Nasdem menjelma menjadi partai politik, dan Sulaeman tak kuasa menolak untuk terlibat di dalam partai bentukan Surya Paloh itu. Alasannya, karena visi misi partai ini selaras dengan cita-citanya



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

soal Papua.

Sulaeman pun menerima mandat untuk mendirikan Partai Nasdem di Papua. Mendirikan partai baru saat itu tidaklah mudah, karena disaat itu masyarakat menilai semua partai politik akan sama saja. “Ibarat burung pipit, di saat petani sedang menanam tidak ada seekorpun yang merapat, tetapi ketika padi mulai menguning burung pipit ramai-ramai turut memanen hasil,” begitulah perumpaan dikemukakan Sulaeman.

Sulaeman pun berhasil mendirikan Partai Nasdem, dan ikut dalam kontestasi Pileg 2014. Ia terpilih menjadi satu-satunya wakil Nasdem dari Papua. Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang, Cinta Sulaeman kepada Nasdem, dan tekak besarnya menjadikan Papua semakin maju menggunakan partai politik membuat Sulaeman makin bersemangat.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

“Saya berharap dapat menambah beberapa lagi anggota DPR RI dari Nasdem Papua. Saya berusaha menjadikan Nasdem di Papua menjelma menjadi partai terbesar, karena visi misi partai Nasdem cocok bagi Papua dan Indonesia” tutur Sulaeman.

### Jamuan Lebaran

Meski sudah sejak lama Sulaeman L. Hamzah meninggalkan kampung halamannya untuk merantau di Papua, tetapi kenangannya waktu kecil di Flores Timur tak pernah terlupakan. Terlebih pada momen-momen puasa seperti sekarang.

Kerukunan antarumat beragama, kata Sulaeman, merupakan salah satu kenangan terindah. Tertutama jika mengingat saat menjalani ibadah puasa di kampung halamannya. Betapa tidak, saat itu Islam di kampungnya hanya sekitar 5-6% saja. Tetapi umat Katolik yang ada di sana memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa secara khusuk. Bahkan, hubungan Islam dan Katolik saling menguntungkan, karena antarpenganut agama sudah menjadi keluarga. Dalam satu rumpun keluarga pasti ada pemeluk kedua agama (Katolik dan Islam), sehingga setiap tahun Natal Dan Idul Fitri dirayakan secara bersama-sama.

“Dulu belum ada listrik untuk penerangan maupun pengeras suara. Untuk membangunkan agar orang bersahur ada petugas yang keliling desa. Dia membangunkan orang Islam dari rumah ke rumah. Caranya,

dia pukul dinding rumah yang terbuat dari bambu sambil berteriak “ bangun..bangun..sahur. Akibatnya, bukan hanya kaum muslimin yang terbangun tapi juga warga Katolik”, cerita Sulaeman.

Tetapi, kebisingan membangunkan sahur itu ternyata tidak membuat orang Katolik marah. Mereka juga merasa diuntungkan, karena bisa bangun pagi untuk berangkat ke kebun di saat masih pagi buta.

Tak kalah mengesankannya lagi, menurut Sulaeman, adalah saat berlebaran. Saat umat Islam melaksanakan sholat led, orang Katolik mendirikan tenda di balai desa untuk memberikan jamuan kepada umat Islam. Sebaliknya, saat Natal, umat Islam gantian yang mendirikan tenda di balai desa dan memberikan jamuan kepada umat Katolik. “Jadi tidak ada yang namanya ribut dengan agama lain”, kata Sulaeman lagi.

Saat ini, umat Muslim dan Katolik hampir seimbang jumlahnya, karena toleransi yang sangat tinggi, bahkan hampir semua rumah ibadah (gereja dan masjid) dibangun secara swadaya. Panitia pembangunan pun bergantian, bangun gereja panitianya Islam dan sebaliknya.

Makanya Sulaeman kerap merasa bingung dan prihatin kalau ada keributan antarumat beragama yang terjadi di daerah lain. Ia berharap, kerukunan hidup antarumat beragama yang terjadi di NTT itu bisa ditiru daerah lain di seluruh Indonesia. □

MBO

Oleh:  
**E.E. Mangindaan**  
Wakil Ketua MPR RI



## Demokrasi Pancasila Untuk Mewujudkan Tujuan Negara

**T**UJUAN pembentukan pemerintah negara Indonesia sebagaimana tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam membentuk pemerintah, Indonesia telah memilih jalan demokrasi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem lainnya.

Demokrasi yang berkembang sejak 1998 telah membawa angin segar bagi warga negara Indonesia. Demokrasi yang sebelumnya selalu diarahkan pada kekuasaan tunggal dan quasi otoritarian telah berubah menjadi demokrasi yang berbasis pada rakyat yang dilakukan dengan pemilihan langsung. Pancasila sebagai dasar negara dalam dua dasawarsa ini seakan menjadi “makhluk” yang dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga Pancasila seakan menjadi fleksibel. Jika dikaitkan antara demokrasi dan Pancasila maka kemudian dengan sangat sederhana muncul gabungan kata “Demokrasi Pancasila”.

Demokrasi Pancasila sudah dikenal sebelum 1998, dan Demokrasi Pancasila pun tetap dan masih dikenal di era reformasi. Pemaknaan Demokrasi Pancasila dalam dua era tersebut tentu berbeda. Demokrasi Pancasila sebelum reformasi selalu diarahkan pada stabilitas politik yang diabdikan bagi jalannya pembangunan. Sedangkan Demokrasi Pancasila setelah reformasi dimaknai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Implementasinya adalah pelaksanaan pemilihan umum yang ditandai dengan kebijakan membuka kran berdirinya partai politik. Selanjutnya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, yang kemudian disusul pemilihan langsung kepala daerah.

Sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika di masyarakat, saat ini telah ditetapkan berbagai peraturan

perundang-undangan dalam rangka menjamin tegaknya demokrasi di Indonesia. Kemajuan pengaturan demokrasi, utamanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, saat ini telah ada undang-undang yang komprehensif tentang pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, dan partai politik.

Jika selama ini pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengaturan sistem politik tersebar dan relatif cepat berubah. Ke depan perlu untuk menjadi satu kodifikasi yang memuat kekhususan serta berlaku untuk jangka waktu yang panjang. Idealnya, pengaturan sistem pemilihan umum, partai politik, susunan dan kedudukan lembaga perwakilan dan permusyawaratan, partai politik, dan aturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem politik di Indonesia dapat dilakukan sinkronisasi dan tidak mudah untuk dilakukan perubahan.

Aspek-aspek sistem politik memang dipahami memiliki koneksi kuat dengan eksistensi partai politik. Sehingga bahasan mengenai pemilihan umum, penyelenggaraan pemilihan umum, dan lembaga perwakilan tidak dapat dilepaskan dari kajian mengenai partai politik, karena keduanya berkaitan dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi, baik dalam sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial.

Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berisi nilai-nilai yang dipandang sebagai norma dasar bernegara (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Sistem Demokrasi Pancasila yang hidup di era yang terbuka harus dapat diarahkan pada upaya mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, pembangunan sistem politik Indonesia diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Seiring dengan datangnya era reformasi pada pertengahan 1998, Indonesia memasuki masa transisi dari era otoritarian ke era demokrasi. Dalam masa transisi itu, dilakukan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk membangun tatanan kehidupan politik baru yang demokratis. Arah baru ini menjadikan Indonesia oleh *Freedom House* (2003), dimasukkan sebagai salah satu dari dua negara demokrasi baru bersama Nigeria yang paling signifikan yang muncul setelah 1997. □